



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017-2022**

**DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

KOTA YOGYAKARTA

2017

PENGANTAR



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah, Sehubungan dengan itu maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menyusun rencana Kerja (RENJA) tahun 2018.

RENJA Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota.

Demikian Semoga penyusunan dokumen renja ini bermanfaat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

AGUS TRI HARYONO, ST, MT

D A F T A R I S I

BAB I	PENDAHULUAN.....	I.1
	1.1. Latar Belakang	I.1
	1.2. Landasan Hukum.....	I.2 - I.5
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	I.5
	1.4. Sistematika Penulisan	I.6 - I.8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA.....	II.1
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.....	II.1 - II.7
	2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	II.9 - II.10
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	II.10 - II.12
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan PeDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.....	II.13 - II.17
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	III.1
	3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	III.1 - III.3

	3.2.	Telaah Visi, Misi dan Program Walikota Yogyakarta dan Wakil Walikota Yogyakarta	III.3 - III.7
	3.3.	Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas PUP ESDM Propinsi DIY.....	III.7 - III.17
	3.4.	Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III.17 - III.22
	3.5.	Penentuan Isu –Isu Strategis	III.22 - III.24
BAB	IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	IV.1
	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.....	IV.1
	4.2.	Strategi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.....	IV.1
BAB	V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAI PENDANAAN PAGU INDIKATIF	V.1
BAB	VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	VI.1
BAB	VII	PENUTUP	VII.1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA	I I · 1
Tabel	2.2	ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA	
Tabel	4.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA.....	VI.1
Tabel	5.1	RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	VI.1
Tabel	6.1	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	VI.1

LAMPIRAN				
----------	--	--	--	--

Tabel	6.2	ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN . PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA	II. 2
Tabel	6.3	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN . PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA.....	V I. 1
Tabel	6.2	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN . PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA.....	V I. 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah sebuah proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan jangka pendek/1 tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RPJMD yang harus disusun oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah. Dokumen Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan rogram, kegiatan dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama lima tahun sesuai tugas dan fungsinya, baik untuk mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah disusun melalui 4 tahapan proses yaitu :

- 1) Tahap persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- 2) Tahap penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Tahap penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah;
- 4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada rancangan awal RPJMD, dimana untuk selanjutnya rancangan Renstra Perangkat

Daerah tersebut akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah setelah melalui proses forum Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Penetapan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah menjadi Renstra Perangkat Daerah dilakukan setelah dari hasil verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah telah dijamin kesesuaiannya dengan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui pendekatan :

- 1) Teknokratis, yang mengharuskan Perangkat Daerah mampu untuk mereview kinerja pembangunan Perangkat Daerah periode yang lalu dan merumuskan prioritas program dan kegiatan berdasarkan kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Partisipatif, yang mengharuskan Perangkat Daerah mampu untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan melibatkan media massa. Disamping itu dalam penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif maupun sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Kewajiban daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
11. Undang – undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2004 tentang Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 tahun 2006 tentang Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;
27. Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016;
28. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2016 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta;
29. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta;
30. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2016 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas PUPKP Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dimaksudkan :

1. Pedoman atau materi untuk menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.
2. Bahan masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta.
3. Pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Dearah.
4. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
5. Acuan dalam penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ.

Adapun penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.

2. Menjamin konsistensi rencana teknis Perangkat Daerah dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman .
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.
5. Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LAKIP, LPPD, LKPJ dan ILPPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, serta dengan Renja Perangkat Daerah.
2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta garis besar isi dokumen.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat penjelasan tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, mencakup : sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2. Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Berisi hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah DIY, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Mengemukakan permasalahan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
3. Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah.
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
5. Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
6. Penentuan Isu-isu Strategis
Mereview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan perangkat daerah, ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah

Renstra Perangkat Daerah Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kebijakan serta Pendanaan

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan indikator kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII

PENUTUP

Penutup

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang urusan pekerjaan umum, perumahan, yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengairan, drainase, bina marga, perkotaan, penerangan jalan umum, air limbah, permukiman dan perumahan. Lebih lanjut fungsi, rincian tugas dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

Fungsi Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki fungsi sebagai :

1. Pelaksana urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan pelaporan.
2. Pengelolaan kebinamargaan dan penerangan jalan umum.
3. Pengelolaan prasarana pengairan dan drainase.
4. Pengelolaan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, perumahan, pemakaman dan saluran air limbah.
5. Pengelolaan perencanaan teknis gedung pemerintah.

1. Susunan Organisasi

1. Sekretariat, terdiri dari :

- 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 1.2 Sub Bagian Keuangan;
- 1.3 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2. Bidang Bina Marga, terdiri dari :

- 2.1 Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
- 2.2 Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

3. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

- 3.1 Seksi Peningkatan Pengairan dan Drainase;
- 3.2 Seksi Pemeliharaan Pengairan dan Drainase.

4. Bidang Bangunan Gedung Pemerintah, terdiri dari :

- 4.1 Seksi Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah;
- 4.2 Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah.

5. Bidang Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan, terdiri dari :

- 5.1 Bidang Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan;
- 5.2 Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.

2. Ketugasan Organisasi

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas;
2. Penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. Pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol; dan
5. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang dan administrasi kepegawaian.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Sub Bagian Keuangan

- Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Bidang Bangunan Gedung Pemerintah

1. Bidang Bangunan Gedung Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang bangunan gedung pemerintah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bangunan Gedung Pemerintah mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang bangunan gedung pemerintah;
 - Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang bangunan gedung pemerintah;
 - Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang bangunan gedung pemerintah;
 - Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang bangunan gedung pemerintah; dan
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang bangunan gedung pemerintah.

Seksi Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah

- Seksi Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang perencanaan teknis gedung pemerintah.

Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah

- Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pembangunan gedung pemerintah.

Bidang Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan

1. Bidang Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang perumahan, permukiman dan tata bangunan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan mempunyai fungsi:
 - Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang perumahan, permukiman dan tata bangunan;
 - Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perumahan, permukiman dan tata bangunan;
 - Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang perumahan, permukiman dan tata bangunan;
 - Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang perumahan, permukiman dan tata bangunan; dan
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang perumahan, permukiman dan tata bangunan;

Seksi Perumahan dan Permukiman

- Seksi Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman.

Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

- Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang penataan bangunan dan lingkungan.
- Melaksanakan perencanaan, penataan, pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengelolaan air limbah;

Bidang Bina Marga

1. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang bina marga.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
 - pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang bina marga;
 - perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang bina marga;
 - pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang bina marga;
 - pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang bina marga; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang bina marga.
 - melaksanakan perencanaan, penataan, pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penerangan jalan umum, lampu taman, lampu hias dan lampu antik, panel kontrol, panel meter dan instalasi penerangan jalan umum jaringan kabel dalam tanah dan udara;

Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan

- Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di *bidang peningkatan jalan dan jembatan*

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan penerangan jalan umum;

Bidang Sumber Daya Air

1. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang sumber daya air.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang sumber daya air;
 - perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang sumber daya air;
 - pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang sumber daya air;
 - pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang sumber daya air; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang sumber daya air.

Seksi Peningkatan Pengairan dan Drainase

- Seksi Peningkatan Pengairan dan Drainase dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang peningkatan pengairan dan drainase.

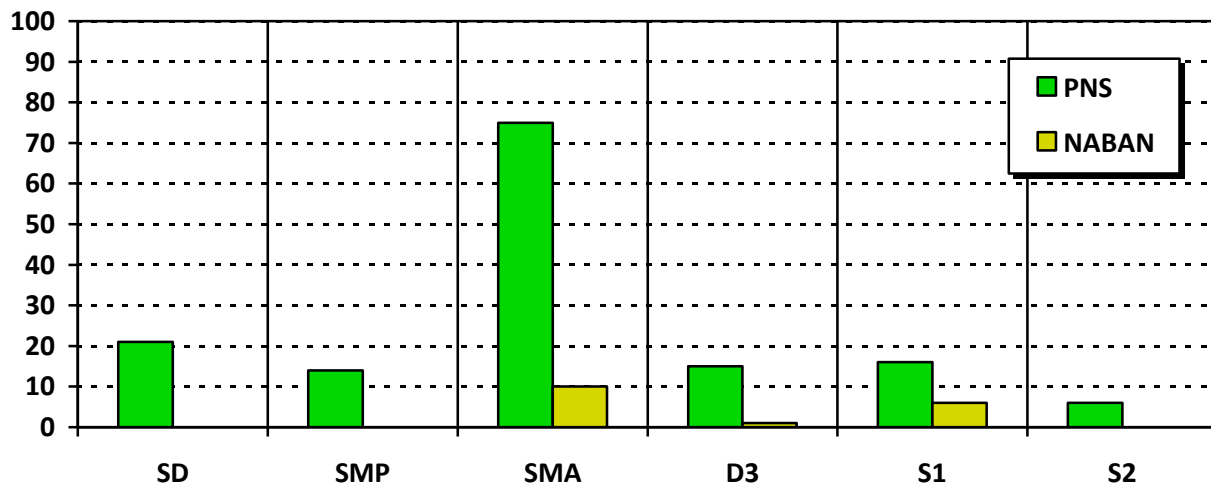
Seksi Pemeliharaan Pengairan dan Drainase

- Seksi Pemeliharaan Pengairan dan Drainase dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pemeliharaan pengairan dan drainase.

2.2 SUMBER DAYA

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 164 orang, yang terdiri dari



1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 119 orang

Berdasar jenis kelamin

- Laki-laki : 102 orang
- Perempuan : 17 orang

Berdasar Kepangkatan / Golongan

- Pegawai Golongan IV : 6 orang
- Pegawai Golongan III : 61 orang
- Pegawai Golongan II : 39 orang
- Pegawai Golongan I : 13 orang

Berdasar Tingkat Pendidikan :

- Magister / S2 : 14 orang
- Sarjana / S1 : 23 orang
- Sarjana Muda / D3 : 2 orang
- SMA / sederajat : 53 orang
- SMP / sederajat : 11 orang
- SD / sederajat : 9 orang

2. Pegawai tidak Tetap / NABAN : 17 orang

- 1) NABAN Keahlian Khusus S1 : 5 orang
- 2) NABAN Keahlian Khusus D3 : 1 orang
- 3) NABAN SMA / SMK : 9 orang

Adapun dari sebanyak 119 Pegawai yang ada, terdiri dari :

- 1) Staf Sekretariat : 29 orang
- 2) Staf Bidang Bina Marga : 22 orang
- 3) Staf Bidang Perumahan dan Permukiman : 40 orang

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 4) Staf Bidang Sumber Daya Air | : 17 orang |
| 5) Staf Bidang Bangunan Gedung | : 49 orang |

2.2.2 Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang meliputi :

1.	Kendaraan dinas roda 2	: 11 unit
2.	Kendaraan dinas roda 3	: 13 unit
3.	Kendaraan dinas roda 4	: 7 unit
4.	Sepeda	: 1 unit
5.	Mesin ketik manual	: 17 unit
6.	Almari Besi	: 14 unit
7.	Rak besi	: 11 unit
8.	Rak kayu	: 7 unit
9.	Filling cabinet	: 45 unit
10.	Almari lereg kaca	: 15 unit
11.	Almari Kayu	: 25 unit
12.	Meja Rapat	: 16 unit
13.	Kursi rapat	: - unit
14.	Kursi lipat	: 175 unit
15.	Meja kerja	: 76 unit
16.	Kursi kerja	: 76 unit
17.	LCD Projector	: 2 unit
18.	Handycam	: 1 unit
19.	Kamera digital	: 1 unit
20.	Wireless	: 1 unit
21.	Komputer / PC	: 30 unit
22.	Notebook / Laptop	: 5 unit
23.	Printer	: 30 unit

2.2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berdasarkan target Renstra periode sebelumnya. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berdasar Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Tabel 2.2.3

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PUPKP
KOTA YOGYAKARTA

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU)		95%		91%	92%	93%	94%	95%	91%	92%	93%	94%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan		82%		78%	79%	80%	81%	82%	78%	79%	80%	81%	83.45%	100%	100%	100%	100%	101.77%
3	Persentase kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan	72.50%			70.50%	71%	71.5%	72%	72.50%	70.50%	71%	71.50%	72%	72.50%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase cakupan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	69.41%	100%	100%	100%	60%	69.41%
6	Persentase cakupan sistem air limbah setempat yg memadai	60%			20%	30%	40%	50%	60%	20%	30%	40%	50%	60%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman		78%		64%	67%	71%	75%	78%	64%	67%	71%	75%	78%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan		84%		80%	81%	82%	83%	84%	80%	81%	82%	83%	84%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra

Renstra K/L	Tantangan	Peluang
Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung	Untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang handal didukung sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel dibutuhkan dana yang besar , sarana dan prasarana pendukung serta kebutuhan sumber daya yang kompeten .	Infrastruktur yang handal dan berkualitas dapat terwujud dengan kemajuan teknologi , adanya peluang kerja sama dengan berbagai pihak , mengefektifkan dan mengefisienkan dana yang terbatas

dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel		
---	--	--

Berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral DIY (DPUPESDM)

Renstra Dinas PUP-ESDM DIY	Tantangan	Peluang
<p>Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang andal dan memadai, merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman yang penjabarannya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan; - Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan kondisi dan fungsi sarana prasarana sumber daya air dan drainase dengan ketersediaan sumber daya , sarana prasarana dan dana yang tersedia serta mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat . - Mengoptimalkan kondisi dan fungsi sarana prasarana jalan dan jembatan . - Memberikan pelayanan air minum memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi 	<p>Infrastruktur yang handal dan berkualitas dapat terwujud dengan kemajuan teknologi , adanya peluang kerja sama dengan berbagai pihak , mengefektifkan dan mengefisienkan dana yang terbatas</p>

<p>dan kecepatan tempuh rata-rata;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai . - Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis; - Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan,kenyamanan dan kemudahan; - Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal . 	<p>standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelayanan sarana prasarana sanitasi yang terpadu yang ramah lingkungan. - Memberikan pelayanan pembangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan,kenyamanan dan kemudahan; - Menata program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal . 	
--	---	--

Berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Setempat (KLHS)

RTRW dan KLHS	Tantangan	Peluang
<ul style="list-style-type: none"> - Prasarana perkotaan, yang meliputi perumahan dan permukiman permukiman, jalan drainase, air bersih, air limbah dan sanitasi. Pengembangan dan pelayanan prasarana umum mendukung fungsi-fungsi perkotaan, sesuai dengan alokasi ruang yang mengakomodasikan fungsi tersebut; juga menciptakan sistem yang saling menguntungkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana perkotaan. - Pengelolaan perkotaan, yang mengakomodasi pengembangan fungsi-fungsi perkotaan, organisasi ruang untuk mengakomodasikan fungsi perkotaan, dan penyediaan prasarana untuk mendukung fungsi tersebut. Terciptanya iklim dan kondisi yang transparan, 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang handal didukung sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel dibutuhkan dana yang besar , sarana dan prasarana pendukung serta kebutuhan sumber daya yang kompeten . 	<p>Infrastruktur yang handal dan berkualitas dapat terwujud dengan kemajuan teknologi , adanya peluang kerja sama dengan berbagai pihak , mengefektifkan dan mengefisienkan dana yang terbatas</p>

<p>akuntabilitas dan demokrasi dalam pengelolaan pengembangan kota akan melibatkan peran dari partisipasi stakeholder, peran serta masyarakat dan sektor swasta.</p> <p>- Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan akan mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut salah satunya adalah : Program Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p>		
---	--	--

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPUPKP

Permasalahan-permasalahan Pembangunan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta secara garis besar meliputi :

Bidang Sumber Daya Air :

1. Sebagian besar saluran drainase maupun saluran irigasi , baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran rumah tangga dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang.
2. Pembangunan saluran drainase dan saluran irigasi khususnya di lingkungan permukiman tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan saluran, sehingga banyak saluran yang tidak/kurang terpelihara dengan baik.
3. Adanya genangan air yang sering terjadi karena kurang selarasnya sistem jaringan drainase dengan laju perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kota.
4. Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah, dan pada saluran yang lain juga berfungsi sebagai saluran irigasi.
5. Banyaknya bangunan baik permanen dan semi permanen di bantaran sungai ,Drainase dan Irigasi yang mengganggu aliran air dan konstruksi bangunan air.
6. Banyaknya karamba yang dipasang oleh masyarakat menyebabkan terganggunya aliran sungai bahkan bisa membelokkan arah aliran yang menyebabkan rusaknya tanggul sungai.
7. Begitu cepatnya laju perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan diperlukannya infrastruktur permukiman.
8. Usia talud yang rata-rata sudah berumur diatas 20 tahun sehingga perlu direhabilitasi.
9. Konstruksi talud yang rata-rata terlalu curam kemiringannya dikarenakan terdesaknya permukiman .
10. Akibat kewenangan sungai yang masih dipusat sehingga tidak dapat maksimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi .

Bidang Bina Marga :

1. Segi Prasarana Jalan dilihat dari kondisi jalan
Total panjang jalan di kota 235 km, memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar, apabila kondisi cuaca menyebabkan curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi menyebabkan terjadinya genangan yang berdampak pada kerusakan jalan.
2. Penerangan Jalan Umum
Memenuhi kebutuhan infrastruktur kota Yogyakarta salah satunya dengan pengelolaan penerangan jalan umum, saat ini program pengelolaan penerangan jalan umum terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu : PJU Protokol, PJU Kampung, dan PJU Lingkungan, untuk dapat tersedianya fungsi PJU Kota membutuhkan pembiayaan yang besar , salah satunya untuk rekening PJU, sehingga diperlukan strategi untuk mengurangi /mengefisienkan rekening PJU.

Bidang Perumahan dan Permukiman :

1. Tempat tinggal warga miskin yang umumnya kurang tertata baik dan kurang memiliki prasarana dasar permukiman sehingga menimbulkan adanya kawasan kurang layak huni yang tersentra di daerah bantaran sungai Di Kota Yogyakarta prosentase rumah layak huni dibandingkan seluruh rumah adalah sebesar 4,36 % pada tahun 2010.
2. Berkaitan dengan Penyediaan Prasarana Air Bersih Non Perpipaan berupa pemasangan water treatment dan rehabilitasi MCK umum,dari 716 unit MCK yang telah terpasang sebanyak 216 unit ,jumlah ini tentulah sangat sedikit karena jumlah MCK yang telah terpasang water treatment hanya 30,17 %.
3. Dari 43 sarana Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Komunal domestic , 37 diantaranya di tiga bantaran tiga sungai (code,winongo,gajahwong) sebagian besar belum berfungsi optimal .Sistem pembuangan air limbah terpusat di Sewon tersebut telah tersambung dengan saluran pembuangan 10.119 rumah tangga .

Bidang Bangunan Gedung :

1. Belum semua bangunan gedung pemerintah memiliki sarana prasarana yang mendukung bagi penyandang disabilitas .
2. Belum terpenuhinya semua bangunan gedung yang sesuai standar pelayanan .

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Telaah Terhadap Visi Pembangunan

Visi Kota Yogyakarta sebagai mana tertuang dalam RPJMD adalah sebagai berikut ***“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”***

Dalam Mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut terdapat misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , yaitu misi ke 6 :

Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas PUPKP Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : “ Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan “				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5

1	Misi 6 : Membangun Sarana Prasarana Publik dan Permukiman			
	Program- Program pada Dinas PUP-KP Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Sistem Drainase Perkotaan Pembangunan sistem drainase terutama saluran air hujan di kota Yogyakarta sampai saat ini cukup mendapat perhatian, namun sampai saat ini masih terdapat lokasi rawan genangan terutama saat curah hujan tinggi, wilayah kota Yogyakarta banyak terdapat cekungan lahan yang menyebabkan	Sebagian besar saluran drainase maupun saluran irigasi, baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran rumah tangga dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang.	Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk memberika n sosialisasi kepada masyarakat perlunya menjaga kebersihan saluran untuk mengurangi

		limpasan air drainase, tersumbatnya saluran drainase yang ada oleh sampah lingkungan maupun tingginya sampah oleh endapan tanah di saluran yang ada. Perbaikan dan peningkatan kuantitas dan kualitas drainase di Kota Yogyakarta harus terus diupayakan agar seluruh bagian system ini dapat berfungsi dengan baik.		sedimentasi berupa sampah, kotoran rumah tangga dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan mengenggan g serta Mengefektifkan dan mengefisien sikan dana yang terbatas untuk pembangunan saluran drainase baik melalui APBD maupun DAK
	Program Peningkatan dan	Kondisi Jalan Peningkatan kondisi jalan dalam keadaan	Belum terpenuhinya	Adanya dukungan

	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	baik harus terus ditingkatkan selama lima tahun kedepan berkaitan dengan visi misi pembangunan kota untuk menunjang kota pariwisata.	sarana prasarana yang cukup memadai, sumber daya serta dana yang tersedia	anggaran dari pusat dalam bentuk dana DAK
	Program Penataan Perumahan dan Permukiman	Sistem Pengelolaan Sarana Prasarana Lingkungan - Berkaitan dengan Penyediaan Prasarana Air Bersih Non Perpipaan berupa pemasangan water treatment dan rehabilitasi MCK umum, dari 716 unit MCK yang telah terpasang sebanyak 216 unit ,jumlah ini tentulah sangat sedikit karena jumlah MCK yang telah terpasang water treatment hanya 30,17 %.	kebutuhan air bersih non perpipaan berada pada MCK Komunal ,di wilayah kota yogyakarta masih kurang lahan untuk membangun MCK komunal , kemudian kesulitan untuk mendapatkan pengelola untuk, pemelihar aannya	Adanya dukungan anggaran dari pusat dalam bentuk dana DAK

		<p>Bangunan Rumah Layak Huni</p> <p>Di Kota Yogyakarta prosentase rumah layak huni dibandingkan seluruh rumah adalah sebesar 4,36 %</p>	<p>Permasalahan pada kepemilikan sertifikat hak milik pada penanganan rumah tidak layak huni yang merupakan persyaratan pemberian bantuan kepada masyarakat .</p>	<p>Dukungan dana dari pusat baik dalam bentuk DAK, Hibah maupun APBD karena berkaitan dengan pengentasan kemiskinan</p>
--	--	--	---	---

3.3 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3.3.1 Telaah Terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong ”

Dalam Mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut terdapat misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , yaitu misi ke 6 :

Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman

Tabel 3.3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas PUPKP
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong ”				
No	Misi dan Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air			
2	Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya			

	<p>kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.</p> <p>Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase</p>	<p>fungsi lindung kawasan sempadan sungai rendah / bahkan tidak ada sama sekali.</p>	<p>Kebanyakan permukiman pinggir sungai sudah berada/berposisi mepet dengan kali /sungai (baik code,gajahwong,winongo, buntung, belik/manunggal, widuri, kali tekik) sehingga bila terjadi hujan deras/banjir maka akan menyebabkan talud ambrol/rusak sehingga membahayakan</p>	<p>Melakukan penataan kawasan dibantaran sungai dengan program M3K (Mundur, Munggah, Madep Kali).</p>
--	---	--	--	--

			<p>an permukiman dan Untuk wilayah kota Yogyakarta tidak bisa diterapkan sesuai dengan aturan yang ada, dan kewenangan sungai sesuai peraturan pemerintah no 38 tahun 2011 berada di pusat dalam hal Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO)</p>	
--	--	--	---	--

		<p>Sistem Drainase Perkotaan</p> <p>Kualitas fasilitas drainase cenderung masih rendah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran-saluran yang ada dimensinya sudah tidak mencukupi untuk kondisi sekarang - Banyaknya utilitas bawah tanah yang melintang maupun memanjang di dalam SAH (kabel, pipa dll) - Kualitas fasilitas drainase berkaitan dengan cakupan infrastruktur 	<p>Dukungan pihak-pihak terkait serta anggaran dari pusat baik dari dana keistimewaan maupun DAK untuk penyelesaian masalah sistem drainase perkotaan</p>
--	--	---	---	---

			<p>sistem drainase skala kawasan dan skala kota , sedangkan luas cakupan infrastruktur drainase yang dikelola adalah 344.960 m, sedangkan luasan infrastruktur yang harus dibangun adalah 497.000 m.</p>	
--	--	--	--	--

3	<p>Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan</p> <p>Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p>	<p>Kondisi Jalan</p> <p>Penanganan kerusakan jalan akibat pembangunan infrastruktur lain dan genangan akibat curah hujan yang tinggi mengakibatkan jalan berlubang</p> <p>Bangunan Pelengkap Jalan</p> <p>- Trotoar</p> <p>Mengembalikan Fungsi trotoar agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan</p>	<p>Kerusakan yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur lain yang dikerjakan oleh pusat (satker) sehingga tidak dapat segera ditindaklanjuti dan membutuhkan waktu yang lama</p>	<p>- Adanya dukungan dana dari pusat</p> <p>- Berfungsinya mesin AMP yang dapat dipergunakan untuk pemeliharaan jalan</p> <p>Dukungan berbagai pihak terkait untuk penataan trotoar</p>
---	---	--	--	---

		<p>mendukung disabilitas</p> <p>Penerangan Jalan Umum</p> <p>Mengoptimalkan fungsi nyala LPJU Kota Yogyakarta sebagai kota yang nyaman huni sesuai dengan visi kepala daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya kerusakan trotoar akibat dipergunakan tidak sebagaimana mestinya seperti PKL dan hal lain yang merusak trotoar - Belum terpenuhinya semua trotoar di kota yogyakarta yang telah terpasang guiding blok untuk memudahkan akses bagi kaum difabel 	<p>Penggantian lampu Penerangan Jalan Umum dengan lampu hemat energi (LED) pada semua jenis PJU Protokol , PJU Kampung dan PJU Lingkungan</p> <p>Menekan beban rekening</p>
--	--	---	--	---

			Biaya rekening yang besar dan terdapat kenaikan setiap tahunnya	penerangan jalan umum.
4	Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak	- Mengembangkan infrastruktur dasar permukiman Penyediaan	Keterbatas	- Dukungan

		<p>sarana prasarana dasar permukiman</p> <p>- Penataan kawasan kumuh</p>	<p>an sumber daya baik terkait dengan pendataan serta sarana prasarana pendukung di lapangan serta peran serta dari masyarakat untuk mendukung keberhasilan pencapaian Penyediaan sarana prasarana dasar permukiman</p> <p>- Penanganan permukiman kumuh di kota Yogyakarta meliputi luasan</p>	<p>stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah</p> <p>- Dana tersedia untuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah</p> <p>- koordinasi dengan pusat supaya dana -dana pusat banyak terkucur di wilayah kota Yogyakarta .</p> <p>- Penanganan kumuh secara</p>
--	--	---	---	--

			<p>264,89 ha (SK Walikota tentang Penetapan Kawasan Kumuh), sedangkan sampai saat ini baru tertangani 60 ha, sehingga masih 204 ha yang akan kita tangani sampai tahun 2019.</p> <p>- Kekumuhan yang ada di kota Yogyakarta didominasi oleh permukiman yang illegal di</p>	<p>kawasan bukan sektoral melalui APBD Kota Yogyakarta</p>
--	--	--	---	--

			<p>bantaran sungai, sehingga batas garis sempadan sungai terlampaui , kadang daerah wedi kengser menjadi daerah hunian illegal. Hal ini memerlukan pengaturan yang tegas, salah satunya Perda untuk Penanganan, Pencegahan dan Peningkatan Permukiman</p>	
--	--	--	---	--

			an Kumuh mutlak dibutuhka n.	
--	--	--	---------------------------------------	--

3.4 TELAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 yang disusun untuk kurun waktu 20 tahun mendatang mengacu pada hirarki fungsional sesuai dengan RTRWN dan selaras dengan RTRW Propinsi dan tidak terlepas dari penataan ruang di wilayah sekitarnya .

Rencana struktur ruang kota Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 sebagai berikut: Visi pengembangan tata ruang di Kota Yogyakarta didasarkan pada struktur dan tata guna lahan dalam konteks ruang perkotaan di sekitarnya .

Tabel 3.4.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas PUPKP Terhadap Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Visi pengembangan tata ruang di Kota Yogyakarta didasarkan pada struktur dan tata guna lahan dalam konteks ruang perkotaan di sekitarnya				
No	Telaah RTRW dan KLHS	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambatan	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Prasarana perkotaan, yang meliputi perumahan dan peremajaan	Dalam Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perkotaan selain	- Keterbatasan anggaran - Keterbatasan	- Adanya dana tersedia yang dapat diajukan untuk penyelesaian

	<p>permukiman, jalan drainase, air bersih, air limbah dan sanitasi. Pengembangan dan pelayanan prasarana umum mendukung fungsi-fungsi perkotaan, sesuai dengan alokasi ruang yang mengakomodasikan fungsi tersebut; juga menciptakan sistem yang saling menguntungkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana perkotaan.</p> <p>Pengelolaan perkotaan, yang mengakomodasi pengembangan fungsi-fungsi perkotaan, organisasi ruang</p>	<p>terkendala oleh sumber daya, sarana prasarana juga oleh dana yang tersedia, terkadang dalam mengefisienkan dana yang tersedia menyebabkan pembangunan tidak dapat dilakukan secara merata melainkan bertahap sedangkan tuntutan masyarakat juga besar sehingga tidak dapat terfokuskan pada satu wilayah melainkan dapat ke berbagai wilayah sesuai kebutuhan yang merupakan skala prioritas karena kebutuhan mendesak dan harus segera ditangani</p>	<p>asan kewenangan - Keterbatasan sumber daya</p>	<p>pembangunan sarana prasarana perkotaan selain bersumber dari dana APBD Kota Yogyakarta</p>
--	---	--	---	---

	<p>untuk mengakomodasikan fungsi perkotaan, dan penyediaan prasarana untuk mendukung fungsi tersebut. Terciptanya iklim dan kondisi yang transparan, akuntabilitas dan demokrasi dalam pengelolaan pengembangan kota akan melibatkan peran dari partisipasi stakeholder, peran serta masyarakat dan sektor swasta.</p> <p>Strategi dasar pengembangan Kota Yogyakarta didasarkan pada kerangka pengembangan struktur kawasan juga fungsi dan perannya, yakni: Ke arah utara dan timur,</p>			
--	--	--	--	--

	<p>berupa optimasi dan pengendalian penggunaan pemanfaatan ruang melalui penataan lingkungan dan bangunan.</p> <p>Ke arah selatan, pengembangan dan pembangunan daerah-daerah baru yang mewadahi peningkatan jumlah penduduk, serta pengembangan kegiatan transportasi regional, perdagangan dan jasa, serta perencanaan penataan lingkungan permukiman untuk mengantisipasi ketidakteraturan.</p> <p>Ke arah barat</p>			
--	---	--	--	--

	penataan lingkungan permukiman, untuk memperkuat karakter perkotaan			
--	---	--	--	--

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan kondisi pembangunan yang telah dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi maka ada beberapa isu strategis ditinjau dari :

a. Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Peningkatan jalan yang tidak signifikan mempengaruhi permasalahan lalu lintas seperti kesemrawutan dan kemacetan
- Sarana prasarana permukiman untuk menekan prosentase permukiman kumuh di Kota Yogyakarta dengan memperhatikan kondisi sanitasi , drainase , jalan kampung, pengolahan limbah untuk mewujudkan rumah layak huni dan lingkungannya .
- Peningkatan kebutuhan air bersih non perpipaan karena masyarakat Kota Yogyakarta lebih banyak berakses air bersih non perpipaan
- Penanganan air limbah dan penyediaan sanitasi lingkungan
- Sarana saluran drainase yang belum tertata akibat peralihan lahan pertanian menjadi lahan permukiman
- Pengembangan MCK Komunal
- Saluran limbah rumah tangga / assenering sebagai pendukung kebersihan lingkungan
- Penggantian lampu Penerangan Jalan Umum dengan lampu hemat energi (LED) pada semua jenis PJU Protokol , PJU Kampung dan PJU Lingkungan untuk mengefisiensi beban rekening penerangan jalan umum.

- Pemenuhan kebutuhan standar pelayanan dan kebutuhan sarana prasarana yang sesuai dengan peraturan yang berlaku diantaranya penyediaan sarpras untuk penyandang disabilitas
 - b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :
 - Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan
 - Pengelolaan Sumber Daya Air, Konservasi sumber daya air yang ditujukan agar terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air alami dan buatan serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air buatan, yang akan dicapai melalui strategi: Untuk mewujudkan hal tersebut, bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk mewujudkan Ketahanan Air, Kedaulatan Pangan, dan Ketahanan Energi, yang akan diwujudkan melalui sasaran strategis
 - Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan dari 0% menjadi 100%, yang akan dicapai melalui strategis
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
 - Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak.
Dengan sasaran program yaitu:
 - Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, dan meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

- Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat. Sedangkan strateginya dilakukan melalui:
 - Pencapaian target 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia pada akhir periode perencanaan, akan dicapai melalui strategi Utama.
 - Pengentasan permukiman kumuh perkotaan
 - Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik, yaitu dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat
 - Pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan
 - Pembangunan rumah layak huni
 - Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
- c. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (DPU-PESDM)
 - Meningkatnya kualitas pengaturan dan Pembangunan Infrastruktur Dasar & Implementasi Program Pembangunan Daerah pada kawasan Strategis DIY
 - Meningkatnya ketersediaan infrastruktur (air minum, yang memadai baik kuantitas dan kualitas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta :

“ Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat “

4.1.2 Sasaran

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota adalah sebagai berikut :

- Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan
- Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tercantum dalam tabel 4.1

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi	Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan		
Misi 6	Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase Penambahan pembangunan gedung pemerintah Peningkatan perumahan permukiman dan tata bangunan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan perlengkapan jalan Meningkatkan kualitas penerangan jalan umum Meningkatkan pembangunan saluran pengairan/penyediaan bangunan talud Meningkatkan kualitas saluran pengairan/penyediaan bangunan talud Mengoptimalkan penataan kawasan sungai Meningkatkan pemenuhan bangunan-bangunan gedung sesuai standar kebutuhan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman Meningkatkan penanganan kawasan kumuh Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Meningkatkan pengelolaan Rusunawa Mengoptimalkan cakupan saluran air limbah Mengoptimalkan pengelolaan air minum Mengoptimalkan pengelolaan pemakaman

2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tantangan :

- 1) Mengefektifkan dan mengefisiensikan dana yang terbatas
- 2) Tuntutan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas
- 3) Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana yang memadai

Peluang :

- 1) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
- 2) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPUPKP

Permasalahan-permasalahan Pembangunan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta secara garis besar meliputi :

Bidang Sumber Daya Air :

1. Sebagian besar saluran drainase maupun saluran irigasi , baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran rumah tangga dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang.
2. Pembangunan saluran drainase dan saluran irigasi khususnya di lingkungan permukiman tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan saluran, sehingga banyak saluran yang tidak/kurang terpelihara dengan baik.
3. Adanya genangan air yang sering terjadi karena kurang selarasnya sistem jaringan drainase dengan laju perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kota.
4. Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah, dan pada saluran yang lain juga berfungsi sebagai saluran irigasi.
5. Banyaknya bangunan baik permanen dan semi permanen di bantaran sungai ,Drainase dan Irigasi yang mengganggu aliran air dan konstruksi bangunan air.
6. Banyaknya karamba yang dipasang oleh masyarakat menyebabkan terganggunya aliran sungai bahkan bisa membelokkan arah aliran yang menyebabkan rusaknya tanggul sungai.

7. Begitu cepatnya laju perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan diperlukannya infrastruktur permukiman.
8. Usia talud yang rata-rata sudah berumur diatas 20 tahun sehingga perlu direhabilitasi.
9. Konstruksi talud yang rata-rata terlalu curam kemiringannya dikarenakan terdesaknya permukiman .
10. Akibat kewenangan sungai yang masih dipusat sehingga tidak dapat maksimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi .

Bidang Bina Marga :

1. Segi Prasarana Jalan dilihat dari kondisi jalan
Total panjang jalan di kota 235 km, memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar, apabila kondisi cuaca menyebabkan curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi menyebabkan terjadinya genangan yang berdampak pada kerusakan jalan.
3. Penerangan Jalan Umum
Memenuhi kebutuhan infrastruktur kota Yogyakarta salah satunya dengan pengelolaan penerangan jalan umum, saat ini program pengelolaan penerangan jalan umum terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu : PJU Protokol, PJU Kampung, dan PJU Lingkungan, untuk dapat tersedianya fungsi PJU Kota membutuhkan pembiayaan yang besar , salah satunya untuk rekening PJU, sehingga diperlukan strategi untuk mengurangi /mengefisienkan rekening PJU.

Bidang Perumahan dan Permukiman :

1. Tempat tinggal warga miskin yang umumnya kurang tertata baik dan kurang memiliki prasarana dasar permukiman sehingga menimbulkan adanya kawasan kurang layak huni yang tersentra di daerah bantaran

sungai Di Kota Yogyakarta prosentase rumah layak huni dibandingkan seluruh rumah adalah sebesar 4,36 % pada tahun 2010.

2. Berkaitan dengan Penyediaan Prasarana Air Bersih Non Perpipaan berupa pemasangan water treatment dan rehabilitasi MCK umum,dari 716 unit MCK yang telah terpasang sebanyak 216 unit ,jumlah ini tentulah sangat sedikit karena jumlah MCK yang telah terpasang water treatment hanya 30,17 %.
3. Dari 43 sarana Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Komunal domestic , 37 diantaranya di tiga bantaran tiga sungai (code,winongo,gajahwong) sebagian besar belum berfungsi optimal .Sistem pembuangan air limbah terpusat di Sewon tersebut telah tersambung dengan saluran pembuangan 10.119 rumah tangga .

Bidang Bangunan Gedung :

3. Belum semua bangunan gedung pemerintah memiliki sarana prasarana yang mendukung bagi penyandang disabilitas .
4. Belum terpenuhinya semua bangunan gedung yang sesuai standar pelayanan .

3.3 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

1. Telaah Terhadap Visi Pembangunan

Visi Kota Yogyakarta sebagai mana tertuang dalam RPJMD adalah sebagai berikut ***“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”***

Dalam Mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut terdapat misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , yaitu misi ke 6 :
Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman

Adapun faktor–faktor pendorong dalam pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi pembangunan kota Yogyakarta adalah permasalahan infrastruktur perkotaan yang masih harus terus menerus dibenahi antara lain :

1. Sistem Drainase Perkotaan

Pembangunan sistem drainase terutama saluran air hujan di kota Yogyakarta sampai saat ini cukup mendapat perhatian, namun sampai saat ini masih terdapat lokasi rawan genangan terutama saat curah hujan tinggi, wilayah kota Yogyakarta banyak terdapat cekungan lahan yang menyebabkan limpasan air drainase,tersumbatnya saluran drainase yang ada oleh sampah lingkungan maupun tingginya sampah oleh endapan tanah di saluran yang ada.Perbaikan dan peningkatan kuantitas dan kualitas drainase di Kota Yogyakarta harus terus diupayakan agar seluruh bagian system ini dapat berfungsi dengan baik.

2. Kondisi Jalan

Peningkatan kondisi jalan dalam keadaan baik harus terus ditingkatkan selama lima tahun kedepan berkaitan dengan visi misi pembangunan kota untuk menunjang kota pariwisata .

3. Sistem Pengelolaan Sarana Prasarana Lingkungan

Berkaitan dengan Penyediaan Prasarana Air Bersih Non Perpipaan berupa pemasangan water treatment dan rehabilitasi MCK umum,dari 716 unit MCK yang telah terpasang sebanyak 216 unit ,jumlah ini tentulah sangat sedikit karena jumlah MCK yang telah terpasang water treatment hanya 30,17 %.

4. Bangunan Rumah Layak Huni

Di Kota Yogyakarta prosentase rumah layak huni dibandingkan seluruh rumah adalah sebesar 4,36 %

5. Pembangunan IPAL Komunal dan Sambungan Rumah (SR)

6. Peningkatan kualitas penerangan jalan umum sampai jalan lingkungan dan lampu hias yang merupakan indikator kinerja dari arah kebijakan pengembangan kawasan citra kota dalam misi program pembangunan kota Yogyakarta.

3.4 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan – Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta

3.4.1 Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019 adalah :

“Tersedianya Infrastruktur dan Permukiman yang andal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025 “

Adapun makna dari Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman yang penjabarannya meliputi :

- Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.
- Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup sapek aksesibilitas (kemudahan pencapaian) ,mobilitas , kondisi jalan , keselamatan , dan kecepatan tempuh rata-rata.
- Pelayanan parasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis

- Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan Permukiman yang andal berbasis penataan ruang

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

Untuk mencapai visi **“Tersedianya Infrastruktur dan Permukiman yang andal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025”** ditetapkan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019 yaitu :

- Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
- Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan berkelanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air .
- Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal , terpadu dan berkelanjutan.

3.4.2 Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Perumahan Rakyat (PUPR)

“ Kemantapan Infrastruktur Dasar dan Efisiensi Pendayagunaan Energi Sumber Daya Mineral “

Misi dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Perumahan Rakyat (PUPR) :

1. Mengintegrasikan Penataan Ruang Wilayah

2. Mengembangkan infrastruktur dasar
3. Memfasilitasi Kelayakan Pemukiman
4. Memfasilitasi Ketersediaan Energi Baru dan Terbarukan
5. Menjaga Keseimbangan Pemanfaatan Sumber Daya

Mineral

6. Memonitor Ketersediaan dan Distribusi Bahan Bakar

Minyak dan Gas

7. Menjaga Keseimbangan antara Pendayagunaan dan Konservasi Sumber Daya Air
8. Mengendalikan Daya Rusak Air
9. Membina Konstruksi Daerah
10. Mengembangkan Sistem dan Mendayagunakan Pelayanan Informasi dan Pengujian Bahan Konstruksi
11. Mendukung Pengembangan Sektor lain

Permasalahan OPD apa?

Gambaran ke depan seperti apa?

3.5 TELAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 yang disusun untuk kurun waktu 20 tahun mendatang mengacu pada hirarki fungsional sesuai dengan RTRWN dan selaras dengan RTRW Propinsi dan tidak terlepas dari penataan ruang di wilayah sekitarnya .

Rencana struktur ruang kota Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 sebagai berikut :

Visi pengembangan tata ruang di Kota Yogyakarta didasarkan pada struktur dan tata guna lahan dalam konteks ruang perkotaan di sekitarnya berkaitan

dengan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Prasarana perkotaan, yang meliputi perumahan dan peremajaan permukiman, jalan drainase, air bersih, air limbah dan sanitasi. Pengembangan dan pelayanan prasarana umum mendukung fungsi-fungsi perkotaan, sesuai dengan alokasi ruang yang mengakomodasikan fungsi tersebut; juga menciptakan sistem yang saling menguntungkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana perkotaan.
2. Pengelolaan perkotaan, yang mengakomodasi pengembangan fungsi-fungsi perkotaan, organisasi ruang untuk mengakomodasikan fungsi perkotaan, dan penyediaan prasarana untuk mendukung fungsi tersebut. Terciptanya iklim dan kondisi yang transparan, akuntabilitas dan demokrasi dalam pengelolaan pengembangan kota akan melibatkan peran dari partisipasi stakeholder, peran serta masyarakat dan sektor swasta.

Strategi dasar pengembangan Kota Yogyakarta didasarkan pada kerangka pengembangan struktur kawasan juga fungsi dan perannya, yakni:

1. Ke arah utara dan timur, berupa optimasi dan pengendalian penggunaan pemanfaatan ruang melalui penataan lingkungan dan bangunan.
2. Ke arah selatan, pengembangan dan pembangunan daerah-daerah baru yang mewadahi peningkatan jumlah penduduk, serta pengembangan kegiatan transportasi regional, perdagangan dan jasa, serta perencanaan penataan lingkungan permukiman untuk mengantisipasi ketidakaturan.
3. Ke arah barat penataan lingkungan permukiman, untuk memperkuat karakter perkotaan.

Perwujudan Struktur Ruang

1. Perwujudan Sistem Perkotaan
 - 1.1 Percepatan pengembangan pusat kota, meliputi: (1) Peningkatan fungsi pusat kota, yang berlokasi di Kecamatan Danurejan, Gedongtengen, dan Gondomanan, (2) Pengembangan kawasan perkotaan, yang berlokasi di Kecamatan Umbulharjo.
 - 1.2 Percepatan pengembangan sub pusat kota, meliputi: Pengembangan/ peningkatan fungsi sub pusat kota, yang berlokasi di Seluruh kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta.
2. Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - 4.1 Jaringan arteri primer: Pemantapan jaringan jalan arteri primer internal kota, yakni jaringan lintas lingkaran luar Kota Yogyakarta, yang berlokasi di jalan ring road lintas selatan
 - 4.2 Jaringan jalan arteri sekunder
 - 4.2.1 Pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota, yang terdiri atas: (i) Jaringan lintas selatan, yang berlokasi di Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan Menteri Supeno, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Ngeksigondo, (ii) Jaringan lintas tengah, yang berlokasi di sepanjang koridor Jalan RE Martadinata.
 - 4.2.2 Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan wilayah lain di luar kota, yakni jaringan lintas Yogyakarta ke arah Kabupaten Bantul, yang berlokasi di Jalan Patangpuluhan.
 - 4.2.3 Jembatan
Pembangunan jembatan *fly over* pada persimpangan dengan jalur KA, yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Aipda Tut Harsono.

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi: (1) Rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota

- Yogyakarta, dan (2) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
2. Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air (SDA), melalui konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
 3. Air limbah, meliputi: (1) Pembangunan dan pemeliharaan saluran air limbah, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, (2) Optimalisasi jaringan air limbah domestik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, dan (3) Pengadaan toilet *mobile*, yang berlokasi di Kota Yogyakarta.
 4. Air Minum, melalui: (1) Pengembangan instalasi air minum, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, (2) Pengembangan jaringan distribusi, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, dan (3) Pembelian truk tangki air minum.

1.2.1 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan kondisi pembangunan yang telah dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi maka ada beberapa isu strategis ditinjau dari :

b. Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Peningkatan jalan yang tidak signifikan mempengaruhi permasalahan lalu lintas seperti kesemrawutan dan kemacetan
- Sarana prasarana permukiman untuk menekan prosentase permukiman kumuh di Kota Yogyakarta dengan memperhatikan kondisi sanitasi , drainase , jalan kampung, pengolahan limbah untuk mewujudkan rumah layak huni dan lingkungannya .
- Peningkatan kebutuhan air bersih non perpipaan karena masyarakat Kota Yogyakarta lebih banyak berakses air bersih non perpipaan
- Penanganan air limbah dan penyediaan sanitasi lingkungan
- Sarana saluran drainase yang belum tertata akibat peralihan lahan pertanian

menjadi lahan permukiman

- Pengembangan MCK Komunal
- Saluran limbah rumah tangga / assenering sebagai pendukung kebersihan lingkungan
- Penggantian lampu Penerangan Jalan Umum dengan lampu hemat energi (LED) pada semua jenis PJU Protokol , PJU Kampung dan PJU Lingkungan untuk mengefisiensi beban rekening penerangan jalan umum.
- Pemenuhan kebutuhan standar pelayanan dan kebutuhan sarana prasarana yang sesuai dengan peraturan yang berlaku diantaranya penyediaan sarpras untuk penyandang disabilitas

b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

- Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan
- Pengelolaan Sumber Daya Air, Konservasi sumber daya air yang ditujukan agar terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air alami dan buatan serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air buatan, yang akan dicapai melalui strategi: Untuk mewujudkan hal tersebut, bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk mewujudkan Ketahanan Air, Kedaulatan Pangan, dan Ketahanan Energi, yang akan diwujudkan melalui sasaran strategis
- Meningkatnya fasilitas terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan dari 0% menjadi 100%, yang akan dicapai melalui strategis
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
- Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak.
Dengan sasaran program yaitu:
 - Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat , dan meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

- Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat. Sedangkan strateginya dilakukan melalui:
 - Pencapaian target 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia pada akhir periode perencanaan, akan dicapai melalui strategi Utama.
 - Pengentasan permukiman kumuh perkotaan
 - Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik, yaitu dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat
 - Pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan
 - Pembangunan rumah layak huni
 - Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
 - c. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (DPU-PESDM)
- Meningkatnya kualitas pengaturan dan Pembangunan Infrastruktur Dasar & Implementasi Program Pembangunan Daerah pada kawasan Strategis DIY
- Meningkatnya ketersediaan infrastruktur (air minum, yang memadai baik kuantitas dan kualitas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta :

“ Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat “

Sasaran

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota adalah sebagai berikut :

- Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat
- Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tercantum dalam tabel 5.1

Tabel 5.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DPUPKP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	73,20%	75,56%	78,07%	80,58%	83,10%	85,61%
			Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	89,23%	90,17%	91,16%	92,38%	93,55%	94,89%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi	Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan		
Misi 6	Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman		
Tujuan Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat	Sasaran Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan	Strategi Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase Penambahan pembangunan gedung pemerintah Peningkatan perumahan permukiman dan tata bangunan	Kebijakan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan perlengkapan jalan Meningkatkan kualitas penerangan jalan umum Meningkatkan pembangunan saluran pengairan/penyediaan bangunan talud Meningkatkan kualitas saluran pengairan/penyediaan bangunan talud Mengoptimalkan penataan kawasan sungai Meningkatkan pemenuhan bangunan-bangunan gedung sesuai standar kebutuhan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman Meningkatkan penanganan kawasan kumuh Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Meningkatkan pengelolaan Rusunawa Mengoptimalkan cakupan saluran air limbah Mengoptimalkan pengelolaan air minum Mengoptimalkan pengelolaan pemakaman

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mencapai sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yaitu : “ Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perkotaan Yang Berkualitas dan memadahi “ sebagaimana telah disusun dalam bab sebelumnya , sesuai dengan bidang tugas Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.

Program –program yang disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang berhubungan dengan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022

Masing-masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya , sehingga hasil pembangunan dapat terukur perkembangannya sampai akhir periode RENSTRA .

Pencapaian target indicator kinerja program disusun secara rinci untuk setiap tahunnya disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk masing-masing program

Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai mana tercantum dalam tabel 6.1

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PUPKP
KOTA YOGYAKARTA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	4	5	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	82%	65.795.425.135	84%	44.572.489.000	86%	45.909.663.670	88%	47.286.953.580	90%	48.705.562.188	92%	50.166.729.053		
						21%		30%		40%		50%		60%		70%			
						73%	37.022.404.586	73,50%	39.215.056.000	74%	40.391.507.680	74,50%	41.603.252.910	75%	42.851.350.498	75,50%	44.136.891.013		
				Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan	90,73%		91,29%		91,85%		92,42%		92,98%		93,54%				
					86%	37.624.331.247	87%	20.500.000.000	88%	21.115.000.000	89%	21.748.450.000	90%	22.400.903.500		23.072.930.605			
					91,8%	13.219.790.300	93,0%	14.207.392.038	94,2%	14.633.613.799	95,5%	15.072.622.213	96,7%	15.524.800.880	98,0%	15.990.544.906			
Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	4	5	Penataan Perumahan dan Tata Bangunan	83,22%		84%		84,06%		85,09%		86,21%		87,62%				
					83,22%		84%		84,06%		85,09%		86,21%		87,62%				
					83,22%		84%		84,06%		85,09%		86,21%		87,62%				

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017 – 2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagaimana mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 mempunyai tujuan memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi misi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Yogyakarta pada akhir periode RENSTRA.

Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA yang diinginkan dilihat dari pencapaian indikator outcome prioritas pembangunan setiap tahunnya .

Uraian Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Yogyakarta tercantum dalam tabel 7.1

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			Tahun	1	2	3	4	5	
1	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan		82%	84%	86%	88%	90%	92%	
2	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan		21%	30%	40%	50%	60%	70%	
3	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud		73%	73,50%	74%	74,50%	75%	75,50%	
4	Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.		90,73%	91,29%	91,85%	92,42%	92,98%	93,54%	
5	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan		86%	87%	88%	89%	90%	91%	
6	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman		91,8%	93,0%	94,2%	95,5%	96,7%	98,0%	
7	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai		83,22%	84%	84,06%	85,09%	86,21%	87,62%	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini telah disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai dengan format Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang selanjutnya akan digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 – 2022 . Rumusan program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renstra 2012-2016 yang lalu, identifikasi isu-isu penting bidang pekerjaan umum, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, review atas rencana awal RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun daerah.

Beberapa usulan program dan kegiatan untuk tahun 2017 - 2022 terlihat membutuhkan beban pendanaan yang cukup besar karena Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta perlu meningkatkan pengelolaan infrastruktur kota diberbagai sektor , karena masih banyak sarana dan prasarana kota yang masih harus ditingkatkan maupun diperbaiki . Besar harapan bahwa rencana kerja akan memperoleh pendanaan yang sesuai kebutuhan demi kelancaran penyelenggaraan ketugasan.

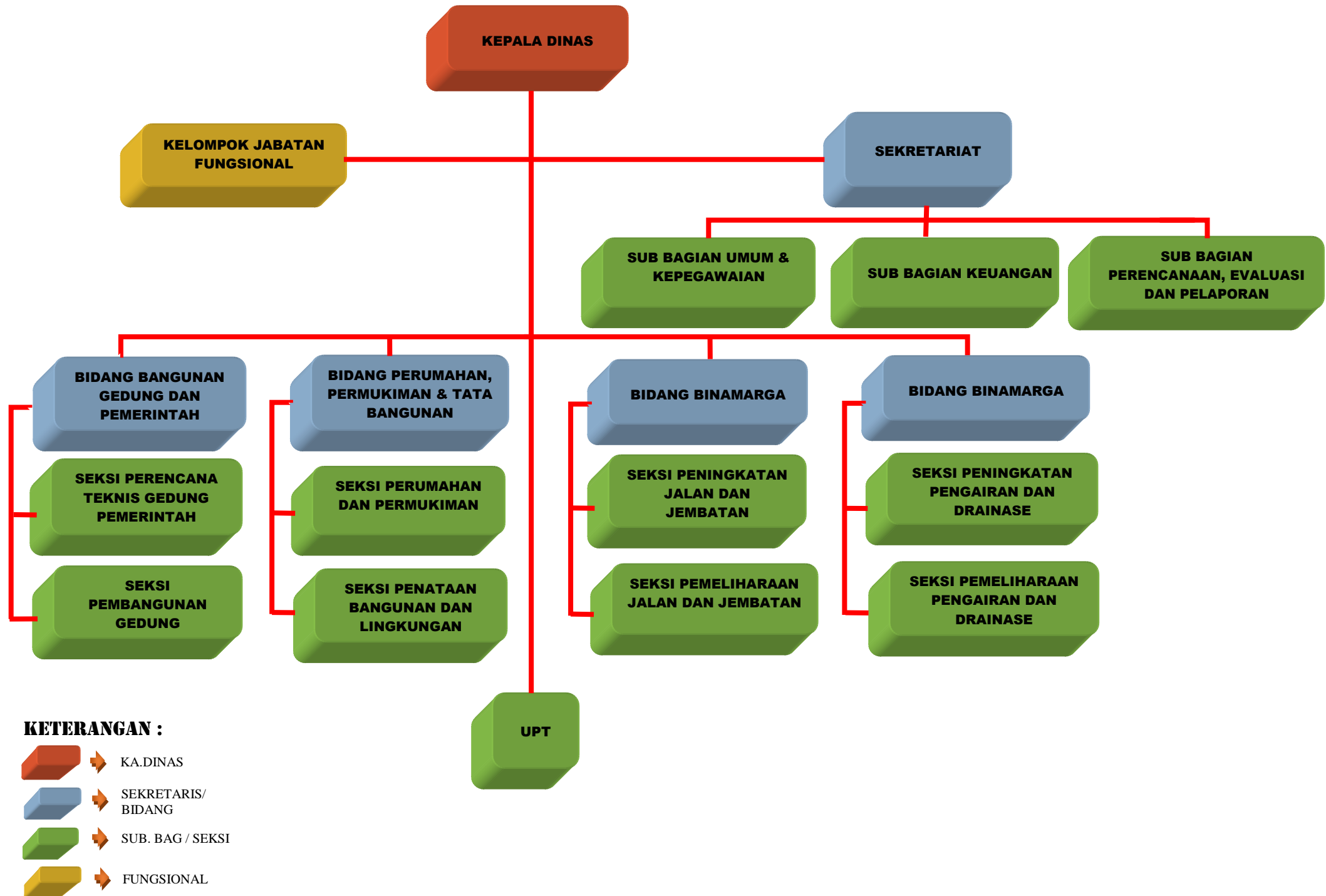
Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Yogyakarta,

Kepala Dinas

Agus Tri Haryono
NIP.19720306 1996 03 1 004



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang urusan pekerjaan umum, perumahan, yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengairan, drainase, bina marga, perkotaan, penerangan jalan umum, air limbah, permukiman dan perumahan. Lebih lanjut fungsi, rincian tugas dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

Fungsi Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki fungsi sebagai :

1. Pelaksana urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan pelaporan.
2. Pengelolaan kebinamargaan dan penerangan jalan umum.
3. Pengelolaan prasarana pengairan dan drainase.
4. Pengelolaan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, perumahan, pemakaman dan saluran air limbah.
5. Pengelolaan perencanaan teknis gedung pemerintah.

1. Susunan Organisasi

1. Sekretariat, terdiri dari :

- 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 1.2 Sub Bagian Keuangan;
- 1.3 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2. Bidang Bina Marga, terdiri dari :

- 2.1 Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan

2.2 Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

3. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

3.1 Seksi Peningkatan Pengairan dan Drainase;

3.2 Seksi Pemeliharaan Pengairan dan Drainase.

4. Bidang Bangunan Gedung Pemerintah, terdiri dari :

4.1 Seksi Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah;

4.2 Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah.

5. Bidang Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan, terdiri dari :

5.1 Bidang Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan;

5.2 Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.

2. Ketugasan Organisasi

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas;
2. Penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. Pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol; dan
5. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang dan administrasi kepegawaian.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Sub Bagian Keuangan

- Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Bidang Bangunan Gedung Pemerintah

1. Bidang Bangunan Gedung Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang bangunan gedung pemerintah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bangunan Gedung Pemerintah mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang bangunan gedung pemerintah;
 - Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang bangunan gedung pemerintah;

- Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang bangunan gedung pemerintah;
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang bangunan gedung pemerintah; dan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang bangunan gedung pemerintah.

Seksi Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah

- Seksi Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang perencanaan teknis gedung pemerintah.

Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah

- Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pembangunan gedung pemerintah.

Bidang Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan

1. Bidang Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang perumahan, permukiman dan tata bangunan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan mempunyai fungsi:
 - Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang perumahan, permukiman dan tata bangunan;

- Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perumahan, permukiman dan tata bangunan;
- Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang perumahan, permukiman dan tata bangunan;
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang perumahan, permukiman dan tata bangunan; dan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang perumahan, permukiman dan tata bangunan;

Seksi Perumahan dan Permukiman

- Seksi Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman.

Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

- Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang penataan bangunan dan lingkungan.
- Melaksanakan perencanaan, penataan, pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengelolaan air limbah;

Bidang Bina Marga

1. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang bina marga.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang bina marga;
- perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang bina marga;
- pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang bina marga;
- pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang bina marga; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang bina marga.
- melaksanakan perencanaan, penataan, pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penerangan jalan umum, lampu taman, lampu hias dan lampu antik, panel kontrol, panel meter dan instalasi penerangan jalan umum jaringan kabel dalam tanah dan udara;

Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan

- Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di *bidang peningkatan jalan dan jembatan*

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan penerangan jalan umum;

Bidang Sumber Daya Air

1. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan

kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang sumber daya air.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang sumber daya air;
 - perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang sumber daya air;
 - pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang sumber daya air;
 - pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang sumber daya air; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang sumber daya air.

Seksi Peningkatan Pengairan dan Drainase

- Seksi Peningkatan Pengairan dan Drainase dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang peningkatan pengairan dan drainase.

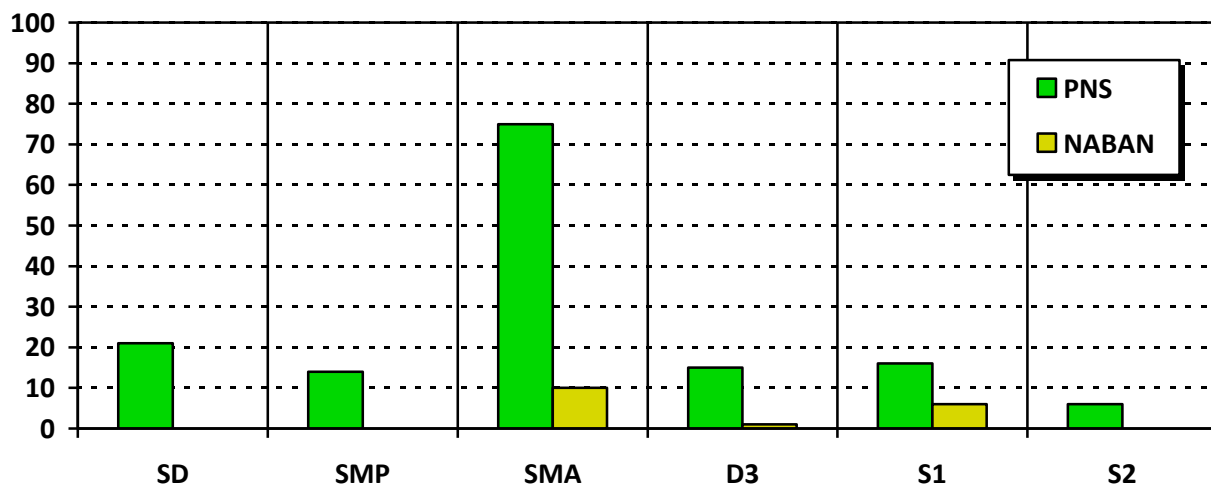
Seksi Pemeliharaan Pengairan dan Drainase

- Seksi Pemeliharaan Pengairan dan Drainase dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pemeliharaan pengairan dan drainase.

2.2 SUMBER DAYA

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 164 orang, yang terdiri dari



1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 119 orang

Berdasar jenis kelamin

- Laki-laki : 102 orang
- Perempuan : 17 orang

Berdasar Kepangkatan / Golongan

- Pegawai Golongan IV : 6 orang
- Pegawai Golongan III : 61 orang
- Pegawai Golongan II : 39 orang
- Pegawai Golongan I : 13 orang

Berdasar Tingkat Pendidikan :

- Magister / S2 : 14 orang
- Sarjana / S1 : 23 orang
- Sarjana Muda / D3 : 2 orang
- SMA / sederajat : 53 orang
- SMP / sederajat : 11 orang
- SD / sederajat : 9 orang

2. Pegawai tidak Tetap / NABAN	: 17 orang
1) NABAN Keahlian Khusus S1	: 5 orang
2) NABAN Keahlian Khusus D3	: 1 orang
3) NABAN SMA / SMK	: 9 orang

Adapun dari sebanyak 119 Pegawai yang ada, terdiri dari :

1) Staf Sekretariat	: 29 orang
2) Staf Bidang Bina Marga	: 22 orang
3) Staf Bidang Perumahan dan Permukiman	: 40 orang
4) Staf Bidang Sumber Daya Air	: 17 orang
5) Staf Bidang Bangunan Gedung	: 49 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang meliputi :

1. Kendaraan dinas roda 2	: 11 unit
2. Kendaraan dinas roda 3	: 13 unit
3. Kendaraan dinas roda 4	: 7 unit
4. Sepeda	: 1 unit
5. Mesin ketik manual	: 17 unit
6. Almari Besi	: 14 unit
7. Rak besi	: 11 unit
8. Rak kayu	: 7 unit
9. Filling cabinet	: 45 unit
10. Almari lereg kaca	: 15 unit
11. Almari Kayu	: 25 unit
12. Meja Rapat	: 16 unit
13. Kursi rapat	: - unit
14. Kursi lipat	: 175 unit
15. Meja kerja	: 76 unit
16. Kursi kerja	: 76 unit
17. LCD Projector	: 2 unit
18. Handycam	: 1 unit
19. Kamera digital	: 1 unit
20. Wireless	: 1 unit
21. Komputer / PC	: 30 unit

- | | | | |
|-----|-------------------|---|---------|
| 22. | Notebook / Laptop | : | 5 unit |
| 23. | Printer | : | 30 unit |

2.2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berdasarkan target Renstra periode sebelumnya. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berdasar Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Tabel 2.2.3

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PUPKP
KOTA YOGYAKARTA

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU)		95%		91%	92%	93%	94%	95%	91%	92%	93%	94%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan		82%		78%	79%	80%	81%	82%	78%	79%	80%	81%	83.45%	100%	100%	100%	100%	101.77%
3	Persentase kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan	72.50%			70.50%	71%	71.5%	72%	72.50%	70.50%	71%	71.50%	72%	72.50%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase cakupan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	69.41%	100%	100%	100%	60%	69.41%
6	Persentase cakupan sistem air limbah setempat yg memadai	60%			20%	30%	40%	50%	60%	20%	30%	40%	50%	60%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman		78%		64%	67%	71%	75%	78%	64%	67%	71%	75%	78%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan		84%		80%	81%	82%	83%	84%	80%	81%	82%	83%	84%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3.1
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
 Kota Yogyakarta**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan			
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi		
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	8.292.319.050	-	-	-	-	5.983.521.075	-	-	-	-	72,16	-	-	-	-	8.292.319.050	5.983.521.075		
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	26.783.835.100	21.175.870.000	27.368.186.134	26.783.835.100	-	21.821.907.100	11.323.731.471	26.552.250.917	21.821.907.100	-	81,47	53,47	97,02	81,47	80.664.658.254	64.082.280.108		
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	6.921.060.000	4.971.994.300	5.710.650.000	7.635.861.024	4.971.994.300	4.635.210.050	4.739.634.100	3.934.820.871	7.183.414.417	4.739.634.100	66,97	95,33	68,90	94,07	95,33	26.233.964.184	21.441.006.258		
Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan	1.371.259.050	1.937.570.800	1.448.830.000	2.051.412.210	1.937.570.800	1.348.311.025	1.581.330.000	1.096.778.600	1.996.734.600	1.581.330.000.00	98,33	81,61	75,70	97,33	81,61	7.196.586.220	6.339.420.425		
Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	11.214.340.540	-	-	-	-	1.348.311.025	-	-	-	-	12,02	-	-	-	-	11.214.340.540	1.348.311.025		
Peningkatan Jalan dan Jembatan	9.906.048.040	18.050.000.000	12.850.000.000	16.618.333.900	18.050.000.000	9.519.209.000	14.326.898.000	5.404.871.000	16.341.384.900.00	14.326.898.000	96,09	79,37	42,06	98,33	-	61.034.381.940	48.457.742.500		
Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan	1.308.292.500	1.824.270.000	1.166.390.000	1.062.579.000	1.824.270.000	1.046.078.000	1.174.045.000	887.261.000	1.030.726.000	1.174.045.000	79,96	64,36	76,07	97,00	64,36	5.726.385.500	4.372.919.000		
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan	8.313.948.500	12.273.774.300	14.634.000.000	16.618.253.724	12.273.774.300	8.170.521.970	12.031.389.070	12.482.185.520	15.418.928.113.20	12.031.389.070	98,27	98,03	85,30	92,78	98,03	54.294.731.384	50.509.302.467		
Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan	4.227.751.500	2.639.896.000	4.401.000.000	3.048.000.000	2.639.896.000	4.204.191.000	2.594.563.000	4.352.728.000	3.010.284.000.00	2.594.563.000	99,44	98,28	98,90	98,76	98,28	14.844.626.700	14.680.678.600		
Pemeliharaan Saluran Pengairan	993.816.000	1.828.988.500	3.661.341.000	3.145.539.112	3.093.931.189	977.307.760	1.727.276.560	2.026.407.950	2.940.163.965.60	2.973.501.394	98,34	94,44	56,39	93,47	96,11	10.248.470.850	8.265.856.514		
Peningkatan dan Pembangunan Talud	1.764.830.000	5.118.318.300	4.364.000.000	8.122.386.500	5.619.575.000	1.734.764.000	5.093.194.780	4.256.510.670	7.363.274.000	6.432.914.000	98,30	99,51	97,54	90,65	96,68	20.493.449.800	19.534.326.220		
Pemeliharaan Bangunan Talud	1.327.551.000	2.686.571.500	2.207.659.000	2.302.328.112	2.146.506.000	1.254.259.210	2.616.354.760	1.846.538.900	2.105.206.147.60	2.075.353.000	94,48	97,39	83,64	91,44	96,60	8.953.810.812	6.237.429.618		
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase	4.684.045.080	4.972.796.325	13.699.175.000	11.567.285.146	9.441.337.045	4.577.472.915	4.892.046.800	12.046.489.595	10.773.342.466	8.969.580.200	97,72	98,38	87,94	93,14	95,00	36.811.568.960	34.083.267.816		
Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase	2.366.845.000	2.207.131.325	10.500.000.000	8.431.983.000	3.921.827.000	2.334.913.000	2.190.576.500	9.183.308.500	7.936.000.500	3.686.507.000	98,65	99,25	87,46	94,12	94,00	24.290.324.725	22.382.099.900		
Pemeliharaan Saluran Drainase	2.317.200.080	2.765.665.000	3.199.175.000	3.135.302.146	5.519.510.045	2.242.559.915	2.701.470.300	2.863.181.095	2.837.341.986.00	5.283.073.200	96,78	97,68	89,50	90,50	95,72	12.521.244.235	11.701.167.916		
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	4.179.633.500	8.426.295.500	7.886.197.500	26.424.901.343	24.520.929.323	4.087.131.262	8.362.341.550	7.733.395.600	25.771.991.214	23.109.384.165	97,79	99,24	96,31	97,53	94,24	51.801.213.708	50.576.730.459		
Peningkatan PJU Kompang	501.143.500	1.131.143.500	906.400.000	1.549.939.000	921.905.000	499.636.000	1.118.549.000	886.713.000	1.464.854.000	906.218.000	99,70	98,89	97,83	94,51	96,30	4.273.007.000	4.150.995.600		
Peningkatan PJU Lingkungan	831.350.000	831.350.000	1.315.000.000	2.015.940.000	2.244.550.000	814.842.000	820.339.500	1.270.289.500	1.955.685.000	2.190.545.000	98,01	98,68	96,60	97,01	97,61	5.442.550.000	5.299.345.000		
Pemeliharaan PJU Panel Jaringan dan Lampu Hias	2.347.945.000	4.703.722.000	4.994.797.500	21.629.467.343	19.676.464.323	2.291.518.262	4.665.850.350	4.944.133.100	21.140.183.214	18.350.131.165	97,66	99,19	98,99	97,78	93,26	37.611.224.708	36.720.711.159		
Peningkatan PJU Panel Jaringan dan Lampu Hias	499.195.000	1.760.080.000	650.000.000	1.229.555.000	1.678.010.000	481.135.000	1.757.802.700	632.260.000	1.202.269.000	1.662.080.000	96,38	99,86	97,27	97,78	99,05	4.474.432.000	4.405.678.700		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	7.697.443.745	5.354.300.886	12.788.784.000	13.686.477.221	15.265.481.120	6.743.653.865	4.654.257.350	11.231.191.620	9.118.063.000	13.483.627.910	87,61	86,93	87,82	66,62	88,33	42.580.102.076	34.443.891.417		
Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL	4.094.795.000	2.126.358.888	9.632.563.000	9.455.728.000	10.494.560.730	3.576.889.700	1.926.139.575	8.916.485.545	6.080.506.020	8.991.069.356	87,35	90,58	92,57	64,31	85,67	27.408.357.032	22.298.234.711		
Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL	1.684.271.000	1.156.707.000	1.487.040.000	2.450.399.721	3.027.785.390	1.442.444.110	848.326.500	1.263.248.000	1.759.056.980	2.787.126.954	85,64	73,34	84,95	71,79	92,05	7.383.974.799	5.870.500.980		
Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi	-	-	1.400.000.000	1.780.349.500	1.743.135.000	-	-	1.051.458.075	1.278.500.000	1.705.431.600	-	-	-	75,10	71,81	-	3.528.976.500	2.671.044.395	
Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK)	1.918.377.745	2.071.235.000	-	-	-	1.724.320.065	1.879.791.275	-	-	-	89,88	90,76	-	-	-	3.989.612.745	3.604.111.330		
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman	5.849.754.400	5.622.829.250	5.549.644.000	7.910.367.817	6.803.750.010	4.631.562.945	4.227.144.210	3.128.328.363	6.725.012.539	5.759.401.853	79,18	75,18	56,37	85,02	84,65	26.293.345.469	19.863.928.428		
Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Dasar Permukiman	-	1.645.606.250	2.000.000.000	1.513.950.500	1.402.987.400	-	1.226.673.000	1.719.874.479	1.440.982.566	1.171.672.073	#DIV/0!	74,54	85,99	95,16	83,51	5.440.154.230	4.621.864.460		
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	2.063.045.000	1.599.425.000	1.629.185.000	1.281.642.630	1.274.342.677	1.911.117.320	1.133.998.100	1.041.658.320	1.086.357.643	1.005.344.375	92,64	71,08	63,94	84,76	78,89	6.824.166.165	5.374.200.258		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (DAK)	2.837.500.000	2.381.798.000	1.627.896.000	2.049.529.000	1.378.698.000	1.810.264.000	1.866.473.110	121.275.534	1.709.647.179	1.032.960.496	63,80	78,36	7,45	87,81	74,92	9.172.462.600	5.804.251.922		
Pendampingan PNPM	-	-	327.563.000	462.515.000	-	-	-	245.520.030	336.112.475	-	-	-	-	74,95	72,67	-	790.078.000	581.632.505	
Pengelolaan Rusunawa	-	-	-	667.777.187	-	-	-	-	586.987.360	-	-	-	-	87,90	-	-	667.777.187	586.987.360	
Peningkatan Kualitas RTL	-	-	-	1.934.953.500	-	-	-	-	1.474.945.318	-	-	-	-	76,23	-	1.934.953.500	1.474.945.318		
Pendampingan Pemukiman Kumuh	-	-	-	-	318.612.300	-	-	-	-	185.308.708	-	-	-	-	58,16	-	63.722.460	37.061.742	
Peningkatan Kualitas RTL	-	-	-	-	2.000.193.892	-	-	-	-	1.987.622.365	-	-	-	-	99,37	-	400.038.778	397.524.473	
Program Pengembangan Detail tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan	823.650.000	1.290.104.500	-	-	-	436.617.450	1.222.607.000	-	-	-	53,01	94,77	-	-	-	2.113.754.500	1.659.224.450		
Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan	-	-	-	1.197.594.766	1.526.202.332	-	-	-	1.118.966.865	1.370.639.302	-	-	-	93,43	89,81	1.502.835.232	1.393.094.725		
Pemeliharaan Bangun Monumen dan Asesoris Keindahan Kota	474.700.000	466.329.500	297.475.000	330.694.766	362.684.332	405.539.450	456.714.000	256.474.348	308.817.865	259.877.802	85,43	97,94	86,22	93,38	71,66	1.641.732.132	1.479.521.223		
Peningkatan Bangun Monumen dan Asesoris Keindahan Kota	348.950.000	678.500.000	525.000.000	575.000.000	858.125.000	31.078.000	560.011.000	479.833.000	526.620.000	810.700.000	8,91	96,80	91,40	91,59	94,47	2.199.075.000	1.759.682.000		
Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL)	-	245.275.000	946.670.000	291.900.000	-	-	-	205.882.000	697.578.100	283.529.000	-	-	-	83,94	73,69	97,13	-	1.483.845.000	1.186.989.100
Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) Kawasan Ngampilan	-	-	-	-	305.413.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	61.082.600	-	

2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra

Renstra K/L	Tantangan	Peluang
Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung	Untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang handal didukung sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel dibutuhkan dana yang besar , sarana dan prasarana pendukung serta kebutuhan sumber daya yang kompeten .	Infrastruktur yang handal dan berkualitas dapat terwujud dengan kemajuan teknologi , adanya peluang kerja sama dengan berbagai pihak , mengefektifkan dan mengefisienkan dana yang terbatas

dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel		
---	--	--

Berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral DIY (DPUPESDM)

Renstra Dinas PUP-ESDM DIY	Tantangan	Peluang
<p>Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang andal dan memadai, merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman yang penjabarannya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan; - Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan kondisi dan fungsi sarana prasarana sumber daya air dan drainase dengan ketersediaan sumber daya , sarana prasarana dan dana yang tersedia serta mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat . - Mengoptimalkan kondisi dan fungsi sarana prasarana jalan dan jembatan . - Memberikan pelayanan air minum memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi 	<p>Infrastruktur yang handal dan berkualitas dapat terwujud dengan kemajuan teknologi , adanya peluang kerja sama dengan berbagai pihak , mengefektifkan dan mengefisienkan dana yang terbatas</p>

<p>dan kecepatan tempuh rata-rata;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai . - Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis; - Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan,kenyamanan dan kemudahan; - Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal . 	<p>standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelayanan sarana prasarana sanitasi yang terpadu yang ramah lingkungan. - Memberikan pelayanan pembangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan,kenyamanan dan kemudahan; - Menata program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal . 	
--	---	--

Berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Setempat (KLHS)

RTRW dan KLHS	Tantangan	Peluang
<ul style="list-style-type: none"> - Prasarana perkotaan, yang meliputi perumahan dan permukiman, jalan drainase, air bersih, air limbah dan sanitasi. Pengembangan dan pelayanan prasarana umum mendukung fungsi-fungsi perkotaan, sesuai dengan alokasi ruang yang mengakomodasikan fungsi tersebut; juga menciptakan sistem yang saling menguntungkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana perkotaan. - Pengelolaan perkotaan, yang mengakomodasi pengembangan fungsi-fungsi perkotaan, organisasi ruang untuk mengakomodasikan fungsi perkotaan, dan penyediaan prasarana untuk mendukung fungsi tersebut. Terciptanya iklim dan kondisi yang transparan, 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang handal didukung sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel dibutuhkan dana yang besar , sarana dan prasarana pendukung serta kebutuhan sumber daya yang kompeten . 	<p>Infrastruktur yang handal dan berkualitas dapat terwujud dengan kemajuan teknologi , adanya peluang kerja sama dengan berbagai pihak , mengefektifkan dan mengefisienkan dana yang terbatas</p>

<p>akuntabilitas dan demokrasi dalam pengelolaan pengembangan kota akan melibatkan peran dari partisipasi stakeholder, peran serta masyarakat dan sektor swasta.</p> <p>- Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan akan mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut salah satunya adalah : Program Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p>		
---	--	--

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPUPKP

Permasalahan-permasalahan Pembangunan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta secara garis besar meliputi :

Bidang Sumber Daya Air :

1. Sebagian besar saluran drainase maupun saluran irigasi , baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran rumah tangga dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang.
2. Pembangunan saluran drainase dan saluran irigasi khususnya di lingkungan permukiman tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan saluran, sehingga banyak saluran yang tidak/kurang terpelihara dengan baik.
3. Adanya genangan air yang sering terjadi karena kurang selarasnya sistem jaringan drainase dengan laju perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kota.
4. Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah, dan pada saluran yang lain juga berfungsi sebagai saluran irigasi.
5. Banyaknya bangunan baik permanen dan semi permanen di bantaran sungai ,Drainase dan Irigasi yang mengganggu aliran air dan konstruksi bangunan air.
6. Banyaknya karamba yang dipasang oleh masyarakat menyebabkan terganggunya aliran sungai bahkan bisa membelokkan arah aliran yang menyebabkan rusaknya tanggul sungai.
7. Begitu cepatnya laju perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan diperlukannya infrastruktur permukiman.

8. Usia talud yang rata-rata sudah berumur diatas 20 tahun sehingga perlu direhabilitasi.
9. Konstruksi talud yang rata-rata terlalu curam kemiringannya dikarenakan terdesaknya permukiman .
10. Akibat kewenangan sungai yang masih dipusat sehingga tidak dapat maksimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi .

Bidang Bina Marga :

1. Segi Prasarana Jalan dilihat dari kondisi jalan
Total panjang jalan di kota 235 km, memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar, apabila kondisi cuaca menyebabkan curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi menyebabkan terjadinya genangan yang berdampak pada kerusakan jalan.
2. Penerangan Jalan Umum
Memenuhi kebutuhan infrastruktur kota Yogyakarta salah satunya dengan pengelolaan penerangan jalan umum, saat ini program pengelolaan penerangan jalan umum terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu : PJU Protokol, PJU Kampung, dan PJU Lingkungan, untuk dapat tersedianya fungsi PJU Kota membutuhkan pembiayaan yang besar , salah satunya untuk rekening PJU, sehingga diperlukan strategi untuk mengurangi /mengefisienkan rekening PJU.

Bidang Perumahan dan Permukiman :

1. Tempat tinggal warga miskin yang umumnya kurang tertata baik dan kurang memiliki prasarana dasar permukiman sehingga menimbulkan adanya kawasan kurang layak huni yang tersentra di daerah bantaran sungai Di Kota Yogyakarta prosentase rumah layak huni dibandingkan seluruh rumah adalah sebesar 4,36 % pada tahun 2010.
2. Berkaitan dengan Penyediaan Prasarana Air Bersih Non Perpipaan berupa pemasangan water treatment dan rehabilitasi MCK umum,dari 716 unit MCK yang telah terpasang sebanyak 216 unit ,jumlah ini tentulah

sangat sedikit karena jumlah MCK yang telah terpasang water treatment hanya 30,17 %.

3. Dari 43 sarana Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Komunal domestic , 37 diantaranya di tiga bantaran tiga sungai (code,winongo,gajahwong) sebagian besar belum berfungsi optimal .Sistem pembuangan air limbah terpusat di Sewon tersebut telah tersambung dengan saluran pembuangan 10.119 rumah tangga .

Bidang Bangunan Gedung :

1. Belum semua bangunan gedung pemerintah memiliki sarana prasarana yang mendukung bagi penyandang disabilitas .
2. Belum terpenuhinya semua bangunan gedung yang sesuai standar pelayanan .

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Telaah Terhadap Visi Pembangunan

Visi Kota Yogyakarta sebagai mana tertuang dalam RPJMD adalah sebagai berikut ***“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”***

Dalam Mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut terdapat misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , yaitu misi ke 6 :

Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas PUPKP Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : “ Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan “

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 6 : Membangun Sarana Prasarana Publik dan Permukiman			
	Program-Program pada Dinas PUP-KP Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Sistem Drainase Perkotaan Pembangunan sistem drainase terutama saluran air hujan di kota Yogyakarta sampai saat ini cukup mendapat perhatian,	Sebagian besar saluran drainase maupun saluran irigasi, baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran rumah tangga dan tanah yang	Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk

		<p>namun sampai saat ini masih terdapat lokasi rawan genangan terutama saat curah hujan tinggi, wilayah kota Yogyakarta banyak terdapat cekungan lahan yang menyebabkan limpasan air drainase, tersumbatnya saluran drainase yang ada oleh sampah lingkungan maupun tingginya sampah oleh endapan tanah di saluran yang ada. Perbaikan dan peningkatan kuantitas dan kualitas drainase di Kota Yogyakarta harus terus diupayakan agar seluruh bagian system ini dapat berfungsi dengan baik.</p>	<p>mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang.</p>	<p>memberikan sosialisasi kepada masyarakat perlunya menjaga kebersihan saluran untuk mengurangi sedimentasi berupa sampah, kotoran rumah tangga dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang serta Mengefektifkan dan mengefisienkan dana yang terbatas untuk</p>
--	--	--	--	---

				pembangunan saluran drainase baik melalui APBD maupun DAK
	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kondisi Jalan Peningkatan kondisi jalan dalam keadaan baik harus terus ditingkatkan selama lima tahun kedepan berkaitan dengan visi misi pembangunan kota untuk menunjang kota pariwisata.	Belum terpenuhinya sarana prasarana yang cukup memadai, sumber daya serta dana yang tersedia	Adanya dukungan anggaran dari pusat dalam bentuk dana DAK
	Program Penataan Perumahan dan Permukiman	Sistem Pengelolaan Sarana Prasarana Lingkungan - Berkaitan dengan Penyediaan Prasarana Air Bersih Non Perpipaan berupa pemasangan water treatment dan rehabilitasi MCK umum, dari 716 unit MCK	kebutuhan air bersih non perpipaan berada pada MCK Komunal ,di wilayah kota yogyakarta masih kurang lahan untuk membangun	Adanya dukungan anggaran dari pusat dalam bentuk dana DAK

		yang telah terpasang sebanyak 216 unit ,jumlah ini tentulah sangat sedikit karena jumlah MCK yang telah terpasang water treatment hanya 30,17 %.	MCK komunal , kemudian kesulitan untuk mendapatkan pengelola untuk,pemeliharaannya	
		Bangunan Rumah Layak Huni Di Kota Yogyakarta prosentase rumah layak huni dibandingkan seluruh rumah adalah sebesar 4,36 %	Permasalahan pada kepemilikan sertifikat hak milik pada penanganan rumah tidak layak huni yang merupakan persyaratan pemberian bantuan kepada masyarakat .	Dukungan dana dari pusat baik dalam bentuk DAK, Hibah maupun APBD karena berkaitan dengan pengentasan kemiskinan

3.3 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3.3.1 Telaah Terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong ”

Dalam Mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut terdapat misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , yaitu misi ke 6 :

Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman

Tabel 3.3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas PUPKP
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong ”				
No	Misi dan Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya			

2	<p>air</p> <p>Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.</p> <p>Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase</p>	<p>fungsi lindung kawasan sempadan sungai rendah / bahkan tidak ada sama sekali.</p>	<p>Kebanyakan permukiman pinggir sungai sudah berada/berposisi mepet dengan kali /sungai (baik code,gajahwong,winongo, buntung,</p>	<p>Melakukan penataan kawasan dibantaran sungai dengan program M3K (Mundur, Mungguh, Madep Kali).</p>
---	---	--	---	--

			<p>belik/manunggal, widuri, kali tekik) sehingga bila terjadi hujan deras/banjir maka akan menyebabkan talud ambrol/rusak sehingga membahayakan permukiman dan Untuk wilayah kota Yogyakarta tidak bisa diterapkan sesuai dengan aturan yang ada, dan kewenangan sungai sesuai peraturan pemerintah no 38 tahun 2011 berada di pusat dalam hal Balai Besar Wilayah</p>	
--	--	--	--	--

			Sungai Serayu Opak (BBWS-SO)	
--	--	--	------------------------------------	--

		<p>Sistem Drainase Perkotaan</p> <p>Kualitas fasilitas drainase cenderung masih rendah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran-saluran yang ada dimensinya sudah tidak mencukupi untuk kondisi sekarang - Banyaknya utilitas bawah tanah yang melintang maupun memanjang di dalam SAH (kabel, pipa dll) - Kualitas fasilitas drainase berkaitan dengan cakupan infrastruktur 	<p>Dukungan pihak-pihak terkait serta anggaran dari pusat baik dari dana keistimewaan maupun DAK untuk penyelesaian masalah sistem drainase perkotaan</p>
--	--	---	---	---

			<p>sistem drainase skala kawasan dan skala kota , sedangkan luas cakupan infrastruktur drainase yang dikelola adalah 344.960 m, sedangkan luasan infrastruktur yang harus dibangun adalah 497.000 m.</p>	
--	--	--	--	--

3	<p>Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan</p> <p>Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p>	<p>Kondisi Jalan</p> <p>Penanganan kerusakan jalan akibat pembangunan infrastruktur lain dan genangan akibat curah hujan yang tinggi mengakibatkan jalan berlubang</p> <p>Bangunan Pelengkap Jalan</p> <p>- Trotoar</p> <p>Mengembalikan Fungsi trotoar agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan</p>	<p>Kerusakan yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur lain yang dikerjakan oleh pusat (satker) sehingga tidak dapat segera ditindaklanjuti dan membutuhkan waktu yang lama</p>	<p>- Adanya dukungan dana dari pusat</p> <p>- Berfungsinya mesin AMP yang dapat dipergunakan untuk pemeliharaan jalan</p> <p>Dukungan berbagai pihak terkait untuk penataan trotoar</p>
---	---	--	--	---

		<p>mendukung disabilitas</p> <p>Penerangan Jalan Umum</p> <p>Mengoptimalkan fungsi nyala LPJU Kota Yogyakarta sebagai kota yang nyaman huni sesuai dengan visi kepala daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya kerusakan trotoar akibat dipergunakan tidak sebagaimana mestinya seperti PKL dan hal lain yang merusak trotoar - Belum terpenuhinya semua trotoar di kota yogyakarta yang telah terpasang guiding blok untuk memudahkan akses bagi kaum difabel 	<p>Penggantian lampu Penerangan Jalan Umum dengan lampu hemat energi (LED) pada semua jenis PJU Protokol , PJU Kampung dan PJU Lingkungan</p> <p>Menekan beban rekening</p>
--	--	---	--	---

			Biaya rekening yang besar dan terdapat kenaikan setiap tahunnya	penerangan jalan umum.
4	Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak	- Mengembangkan infrastruktur dasar permukiman Penyediaan	Keterbatas	- Dukungan

		<p>sarana prasarana dasar permukiman</p> <p>- Penataan kawasan kumuh</p>	<p>an sumber daya baik terkait dengan pendataan serta sarana prasarana pendukung di lapangan serta peran serta dari masyarakat untuk mendukung keberhasilan pencapaian Penyediaan sarana prasarana dasar permukiman</p> <p>- Penanganan permukiman kumuh di kota Yogyakarta meliputi luasan</p>	<p>stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah</p> <p>- Dana tersedia untuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah</p> <p>- koordinasi dengan pusat supaya dana -dana pusat banyak terkucur di wilayah kota Yogyakarta .</p> <p>- Penanganan kumuh secara</p>
--	--	---	---	--

			<p>264,89 ha (SK Walikota tentang Penetapan Kawasan Kumuh), sedangkan sampai saat ini baru tertangani 60 ha, sehingga masih 204 ha yang akan kita tangani sampai tahun 2019.</p> <p>- Kekumuhan yang ada di kota Yogyakarta didominasi oleh permukiman yang illegal di</p>	<p>kawasan bukan sektoral melalui APBD Kota Yogyakarta</p>
--	--	--	---	--

			<p>bantaran sungai, sehingga batas garis sempadan sungai terlampaui , kadang daerah wedi kengser menjadi daerah hunian illegal.Hal ini memerlukan pengaturan yang tegas, salah satunya Perda untuk Penanganan, Pencegahan dan Peningkatan Permukiman</p>	
--	--	--	--	--

			an Kumuh mutlak dibutuhka n.	
--	--	--	---------------------------------------	--

3.4 TELAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 yang disusun untuk kurun waktu 20 tahun mendatang mengacu pada hirarki fungsional sesuai dengan RTRWN dan selaras dengan RTRW Propinsi dan tidak terlepas dari penataan ruang di wilayah sekitarnya .

Rencana struktur ruang kota Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 sebagai berikut:
Visi pengembangan tata ruang di Kota Yogyakarta didasarkan pada struktur dan tata guna lahan dalam konteks ruang perkotaan di sekitarnya .

Tabel 3.4.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas PUPKP Terhadap Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Visi pengembangan tata ruang di Kota Yogyakarta didasarkan pada struktur dan tata guna lahan dalam konteks ruang perkotaan di sekitarnya				
No	Telaah RTRW dan KLHS	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambatan	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Prasarana perkotaan, yang meliputi perumahan dan peremajaan	Dalam Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perkotaan selain	- Keterbatasan anggaran - Keterbatasan	- Adanya dana tersedia yang dapat diajukan untuk penyelesaian

	<p>permukiman, jalan drainase, air bersih, air limbah dan sanitasi. Pengembangan dan pelayanan prasarana umum mendukung fungsi-fungsi perkotaan, sesuai dengan alokasi ruang yang mengakomodasikan fungsi tersebut; juga menciptakan sistem yang saling menguntungkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana perkotaan.</p> <p>Pengelolaan perkotaan, yang mengakomodasi pengembangan fungsi-fungsi perkotaan, organisasi ruang</p>	<p>terkendala oleh sumber daya , sarana prasarana juga oleh dana yang tersedia, terkadang dalam mengefisienkan dana yang tersedia menyebabkan pembangunan tidak dapat dilakukan secara merata melainkan bertahap sedangkan tuntutan masyarakat juga besar sehingga tidak dapat terfokuskan pada satu wilayah melainkan dapat ke berbagai wilayah sesuai kebutuhan yang merupakan skala prioritas karena kebutuhan mendesak dan harus segera ditangani</p>	<p>asan kewenangan - Keterbatasan sumber daya</p>	<p>pembangunan sarana prasarana perkotaan selain bersumber dari dana APBD Kota Yogyakarta</p>
--	---	---	---	---

	<p>untuk mengakomodasikan fungsi perkotaan, dan penyediaan prasarana untuk mendukung fungsi tersebut. Terciptanya iklim dan kondisi yang transparan, akuntabilitas dan demokrasi dalam pengelolaan pengembangan kota akan melibatkan peran dari partisipasi stakeholder, peran serta masyarakat dan sektor swasta.</p> <p>Strategi dasar pengembangan Kota Yogyakarta didasarkan pada kerangka pengembangan struktur kawasan juga fungsi dan perannya, yakni: Ke arah utara dan timur,</p>			
--	--	--	--	--

	<p>berupa optimasi dan pengendalian pengendalian pemanfaatan ruang melalui penataan lingkungan dan bangunan.</p> <p>Ke arah selatan, pengembangan dan pembangunan daerah-daerah baru yang mewadahi peningkatan jumlah penduduk, serta pengembangan kegiatan transportasi regional, perdagangan dan jasa, serta perencanaan penataan lingkungan permukiman untuk mengantisipasi ketidakteraturan.</p> <p>Ke arah barat</p>			
--	---	--	--	--

	penataan lingkungan permukiman, untuk memperkuat karakter perkotaan			
--	---	--	--	--

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan kondisi pembangunan yang telah dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi maka ada beberapa isu strategis ditinjau dari :

a. Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Peningkatan jalan yang tidak signifikan mempengaruhi permasalahan lalu lintas seperti kesemrawutan dan kemacetan
- Sarana prasarana permukiman untuk menekan prosentase permukiman kumuh di Kota Yogyakarta dengan memperhatikan kondisi sanitasi , drainase , jalan kampung, pengolahan limbah untuk mewujudkan rumah layak huni dan lingkungannya .
- Peningkatan kebutuhan air bersih non perpipaan karena masyarakat Kota Yogyakarta lebih banyak berakses air bersih non perpipaan
- Penanganan air limbah dan penyediaan sanitasi lingkungan
- Sarana saluran drainase yang belum tertata akibat peralihan lahan pertanian menjadi lahan permukiman
- Pengembangan MCK Komunal
- Saluran limbah rumah tangga / assenering sebagai pendukung kebersihan lingkungan
- Penggantian lampu Penerangan Jalan Umum dengan lampu hemat energi (LED) pada semua jenis PJU Protokol , PJU Kampung dan PJU Lingkungan untuk mengefisiensi beban rekening penerangan jalan umum.

- Pemenuhan kebutuhan standar pelayanan dan kebutuhan sarana prasarana yang sesuai dengan peraturan yang berlaku diantaranya penyediaan sarpras untuk penyandang disabilitas
 - b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :
 - Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan
 - Pengelolaan Sumber Daya Air, Konservasi sumber daya air yang ditujukan agar terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air alami dan buatan serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air buatan, yang akan dicapai melalui strategi: Untuk mewujudkan hal tersebut, bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk mewujudkan Ketahanan Air, Kedaulatan Pangan, dan Ketahanan Energi, yang akan diwujudkan melalui sasaran strategis
 - Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan dari 0% menjadi 100%, yang akan dicapai melalui strategis
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
 - Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak.
Dengan sasaran program yaitu:
 - Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, dan meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

- Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat. Sedangkan strateginya dilakukan melalui:
 - Pencapaian target 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia pada akhir periode perencanaan, akan dicapai melalui strategi Utama.
 - Pengentasan permukiman kumuh perkotaan
 - Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik, yaitu dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat
 - Pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan
 - Pembangunan rumah layak huni
 - Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
- c. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (DPU-PESDM)
 - Meningkatnya kualitas pengaturan dan Pembangunan Infrastruktur Dasar & Implementasi Program Pembangunan Daerah pada kawasan Strategis DIY
 - Meningkatnya ketersediaan infrastruktur (air minum, yang memadai baik kuantitas dan kualitas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta :

“ Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat “

4.1.2 Sasaran

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota adalah sebagai berikut :

- Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan
- Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tercantum dalam tabel 4.1

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi	Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan		
Misi 6	Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman		
Tujuan Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat	Sasaran Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Strategi Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase Penambahan pembangunan gedung pemerintah Peningkatan perumahan permukiman dan tata bangunan	Kebijakan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan perlengkapan jalan Meningkatkan kualitas penerangan jalan umum Meningkatkan pembangunan saluran pengairan/penyediaan bangunan talud Meningkatkan kualitas saluran pengairan/penyediaan bangunan talud Mengoptimalkan penataan kawasan sungai Meningkatkan pemenuhan bangunan-bangunan gedung sesuai standar kebutuhan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman Meningkatkan penanganan kawasan kumuh Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Meningkatkan pengelolaan Rusunawa Mengoptimalkan cakupan saluran air limbah Mengoptimalkan pengelolaan air minum Mengoptimalkan pengelolaan pemakaman

2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tantangan :

- 1) Mengefektifkan dan mengefisiensikan dana yang terbatas
- 2) Tuntutan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas
- 3) Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana yang memadai

Peluang :

- 1) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
- 2) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPUPKP

Permasalahan-permasalahan Pembangunan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta secara garis besar meliputi :

Bidang Sumber Daya Air :

1. Sebagian besar saluran drainase maupun saluran irigasi , baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran rumah tangga dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang.
2. Pembangunan saluran drainase dan saluran irigasi khususnya di lingkungan permukiman tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan saluran, sehingga banyak saluran yang tidak/kurang terpelihara dengan baik.
3. Adanya genangan air yang sering terjadi karena kurang selarasnya sistem jaringan drainase dengan laju perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kota.
4. Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah, dan pada saluran yang lain juga berfungsi sebagai saluran irigasi.
5. Banyaknya bangunan baik permanen dan semi permanen di bantaran sungai ,Drainase dan Irigasi yang mengganggu aliran air dan konstruksi bangunan air.
6. Banyaknya karamba yang dipasang oleh masyarakat menyebabkan terganggunya aliran sungai bahkan bisa membelokkan arah aliran yang menyebabkan rusaknya tanggul sungai.

7. Begitu cepatnya laju perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan diperlukannya infrastruktur permukiman.
8. Usia talud yang rata-rata sudah berumur diatas 20 tahun sehingga perlu direhabilitasi.
9. Konstruksi talud yang rata-rata terlalu curam kemiringannya dikarenakan terdesaknya permukiman .
10. Akibat kewenangan sungai yang masih dipusat sehingga tidak dapat maksimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi .

Bidang Bina Marga :

1. Segi Prasarana Jalan dilihat dari kondisi jalan
Total panjang jalan di kota 235 km, memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar, apabila kondisi cuaca menyebabkan curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi menyebabkan terjadinya genangan yang berdampak pada kerusakan jalan.
3. Penerangan Jalan Umum
Memenuhi kebutuhan infrastruktur kota Yogyakarta salah satunya dengan pengelolaan penerangan jalan umum, saat ini program pengelolaan penerangan jalan umum terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu : PJU Protokol, PJU Kampung, dan PJU Lingkungan, untuk dapat tersedianya fungsi PJU Kota membutuhkan pembiayaan yang besar , salah satunya untuk rekening PJU, sehingga diperlukan strategi untuk mengurangi /mengefisienkan rekening PJU.

Bidang Perumahan dan Permukiman :

1. Tempat tinggal warga miskin yang umumnya kurang tertata baik dan kurang memiliki prasarana dasar permukiman sehingga menimbulkan adanya kawasan kurang layak huni yang tersentra di daerah bantaran

sungai Di Kota Yogyakarta prosentase rumah layak huni dibandingkan seluruh rumah adalah sebesar 4,36 % pada tahun 2010.

2. Berkaitan dengan Penyediaan Prasarana Air Bersih Non Perpipaan berupa pemasangan water treatment dan rehabilitasi MCK umum, dari 716 unit MCK yang telah terpasang sebanyak 216 unit ,jumlah ini tentulah sangat sedikit karena jumlah MCK yang telah terpasang water treatment hanya 30,17 %.
3. Dari 43 sarana Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Komunal domestic , 37 diantaranya di tiga bantaran tiga sungai (code, winongo, gajahwong) sebagian besar belum berfungsi optimal .Sistem pembuangan air limbah terpusat di Sewon tersebut telah tersambung dengan saluran pembuangan 10.119 rumah tangga .

Bidang Bangunan Gedung :

3. Belum semua bangunan gedung pemerintah memiliki sarana prasarana yang mendukung bagi penyandang disabilitas .
4. Belum terpenuhinya semua bangunan gedung yang sesuai standar pelayanan .

3.3 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

1. Telaah Terhadap Visi Pembangunan

Visi Kota Yogyakarta sebagai mana tertuang dalam RPJMD adalah sebagai berikut ***“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”***

Dalam Mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut terdapat misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , yaitu misi ke 6 :
Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman

Adapun faktor–faktor pendorong dalam pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi pembangunan kota Yogyakarta adalah permasalahan infrastruktur perkotaan yang masih harus terus menerus dibenahi antara lain :

1. Sistem Drainase Perkotaan

Pembangunan sistem drainase terutama saluran air hujan di kota Yogyakarta sampai saat ini cukup mendapat perhatian, namun sampai saat ini masih terdapat lokasi rawan genangan terutama saat curah hujan tinggi, wilayah kota Yogyakarta banyak terdapat cekungan lahan yang menyebabkan limpasan air drainase,tersumbatnya saluran drainase yang ada oleh sampah lingkungan maupun tingginya sampah oleh endapan tanah di saluran yang ada.Perbaikan dan peningkatan kuantitas dan kualitas drainase di Kota Yogyakarta harus terus diupayakan agar seluruh bagian system ini dapat berfungsi dengan baik.

2. Kondisi Jalan

Peningkatan kondisi jalan dalam keadaan baik harus terus ditingkatkan selama lima tahun kedepan berkaitan dengan visi misi pembangunan kota untuk menunjang kota pariwisata .

3. Sistem Pengelolaan Sarana Prasarana Lingkungan

Berkaitan dengan Penyediaan Prasarana Air Bersih Non Perpipaan berupa pemasangan water treatment dan rehabilitasi MCK umum,dari 716 unit MCK yang telah terpasang sebanyak 216 unit ,jumlah ini tentulah sangat sedikit karena jumlah MCK yang telah terpasang water treatment hanya 30,17 %.

4. Bangunan Rumah Layak Huni

Di Kota Yogyakarta prosentase rumah layak huni dibandingkan seluruh rumah adalah sebesar 4,36 %

5. Pembangunan IPAL Komunal dan Sambungan Rumah (SR)

6. Peningkatan kualitas penerangan jalan umum sampai jalan lingkungan dan lampu hias yang merupakan indikator kinerja dari arah kebijakan pengembangan kawasan citra kota dalam misi program pembangunan kota Yogyakarta.

3.4 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan – Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta

3.4.1 Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019 adalah :

“Tersedianya Infrastruktur dan Permukiman yang andal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025 “

Adapun makna dari Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman yang penjabarannya meliputi :

- Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.
- Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup sapek aksesibilitas (kemudahan pencapaian) ,mobilitas , kondisi jalan , keselamatan , dan kecepatan tempuh rata-rata.
- Pelayanan parasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis

- Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan Permukiman yang andal berbasis penataan ruang

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

Untuk mencapai visi **“Tersedianya Infrastruktur dan Permukiman yang andal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025”** ditetapkan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019 yaitu :

- Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
- Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan berkelanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air .
- Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal , terpadu dan berkelanjutan.

3.4.2 Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Perumahan Rakyat (PUPR)

“ Kemantapan Infrastruktur Dasar dan Efisiensi Pendayagunaan Energi Sumber Daya Mineral “

Misi dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Perumahan Rakyat (PUPR) :

1. Mengintegrasikan Penataan Ruang Wilayah

2. Mengembangkan infrastruktur dasar
3. Memfasilitasi Kelayakan Pemukiman
4. Memfasilitasi Ketersediaan Energi Baru dan Terbarukan
5. Menjaga Keseimbangan Pemanfaatan Sumber Daya

Mineral

6. Memonitor Ketersediaan dan Distribusi Bahan Bakar

Minyak dan Gas

7. Menjaga Keseimbangan antara Pendayagunaan dan Konservasi Sumber Daya Air
8. Mengendalikan Daya Rusak Air
9. Membina Konstruksi Daerah
10. Mengembangkan Sistem dan Mendayagunakan Pelayanan Informasi dan Pengujian Bahan Konstruksi
11. Mendukung Pengembangan Sektor lain

Permasalahan OPD apa?

Gambaran ke depan seperti apa?

3.5 TELAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 yang disusun untuk kurun waktu 20 tahun mendatang mengacu pada hirarki fungsional sesuai dengan RTRWN dan selaras dengan RTRW Propinsi dan tidak terlepas dari penataan ruang di wilayah sekitarnya .

Rencana struktur ruang kota Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 sebagai berikut :

Visi pengembangan tata ruang di Kota Yogyakarta didasarkan pada struktur dan tata guna lahan dalam konteks ruang perkotaan di sekitarnya berkaitan

dengan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Prasarana perkotaan, yang meliputi perumahan dan peremajaan permukiman, jalan drainase, air bersih, air limbah dan sanitasi. Pengembangan dan pelayanan prasarana umum mendukung fungsi-fungsi perkotaan, sesuai dengan alokasi ruang yang mengakomodasikan fungsi tersebut; juga menciptakan sistem yang saling menguntungkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana perkotaan.
2. Pengelolaan perkotaan, yang mengakomodasi pengembangan fungsi-fungsi perkotaan, organisasi ruang untuk mengakomodasikan fungsi perkotaan, dan penyediaan prasarana untuk mendukung fungsi tersebut. Terciptanya iklim dan kondisi yang transparan, akuntabilitas dan demokrasi dalam pengelolaan pengembangan kota akan melibatkan peran dari partisipasi stakeholder, peran serta masyarakat dan sektor swasta.

Strategi dasar pengembangan Kota Yogyakarta didasarkan pada kerangka pengembangan struktur kawasan juga fungsi dan perannya, yakni:

1. Ke arah utara dan timur, berupa optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penataan lingkungan dan bangunan.
2. Ke arah selatan, pengembangan dan pembangunan daerah-daerah baru yang mewadahi peningkatan jumlah penduduk, serta pengembangan kegiatan transportasi regional, perdagangan dan jasa, serta perencanaan penataan lingkungan permukiman untuk mengantisipasi ketidakteraturan.
3. Ke arah barat penataan lingkungan permukiman, untuk memperkuat karakter perkotaan.

Perwujudan Struktur Ruang

1. Perwujudan Sistem Perkotaan
 - 1.1 Percepatan pengembangan pusat kota, meliputi: (1) Peningkatan fungsi pusat kota, yang berlokasi di Kecamatan Danurejan, Gedongtengen, dan Gondomanan, (2) Pengembangan kawasan perkotaan, yang berlokasi di Kecamatan Umbulharjo.
 - 1.2 Percepatan pengembangan sub pusat kota, meliputi: Pengembangan/ peningkatan fungsi sub pusat kota, yang berlokasi di Seluruh kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta.
2. Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - 4.1 Jaringan arteri primer: Pemantapan jaringan jalan arteri primer internal kota, yakni jaringan lintas lingkaran luar Kota Yogyakarta, yang berlokasi di jalan ring road lintas selatan
 - 4.2 Jaringan jalan arteri sekunder
 - 4.2.1 Pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota, yang terdiri atas: (i) Jaringan lintas selatan, yang berlokasi di Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan Menteri Supeno, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Ngeksigondo, (ii) Jaringan lintas tengah, yang berlokasi di sepanjang koridor Jalan RE Martadinata.
 - 4.2.2 Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan wilayah lain di luar kota, yakni jaringan lintas Yogyakarta ke arah Kabupaten Bantul, yang berlokasi di Jalan Patangpuluhan.
 - 4.2.3 Jembatan
Pembangunan jembatan *fly over* pada persimpangan dengan jalur KA, yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Aipda Tut Harsono.

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi: (1) Rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota

- Yogyakarta, dan (2) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
2. Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air (SDA), melalui konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
 3. Air limbah, meliputi: (1) Pembangunan dan pemeliharaan saluran air limbah, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, (2) Optimalisasi jaringan air limbah domestik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, dan (3) Pengadaan toilet *mobile*, yang berlokasi di Kota Yogyakarta.
 4. Air Minum, melalui: (1) Pengembangan instalasi air minum, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, (2) Pengembangan jaringan distribusi, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, dan (3) Pembelian truk tangki air minum.

1.2.1 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan kondisi pembangunan yang telah dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi maka ada beberapa isu strategis ditinjau dari :

b. Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Peningkatan jalan yang tidak signifikan mempengaruhi permasalahan lalu lintas seperti kesemrawutan dan kemacetan
- Sarana prasarana permukiman untuk menekan prosentase permukiman kumuh di Kota Yogyakarta dengan memperhatikan kondisi sanitasi , drainase , jalan kampung, pengolahan limbah untuk mewujudkan rumah layak huni dan lingkungannya .
- Peningkatan kebutuhan air bersih non perpipaan karena masyarakat Kota Yogyakarta lebih banyak mengakses air bersih non perpipaan
- Penanganan air limbah dan penyediaan sanitasi lingkungan
- Sarana saluran drainase yang belum tertata akibat peralihan lahan pertanian

menjadi lahan permukiman

- Pengembangan MCK Komunal
 - Saluran limbah rumah tangga / assenering sebagai pendukung kebersihan lingkungan
 - Penggantian lampu Penerangan Jalan Umum dengan lampu hemat energi (LED) pada semua jenis PJU Protokol , PJU Kampung dan PJU Lingkungan untuk mengefisiensi beban rekening penerangan jalan umum.
 - Pemenuhan kebutuhan standar pelayanan dan kebutuhan sarana prasarana yang sesuai dengan peraturan yang berlaku diantaranya penyediaan sarpras untuk penyandang disabilitas
- b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :
- Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal,kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan
 - Pengelolaan Sumber Daya Air, Konservasi sumber daya air yang ditujukan agar terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air alami dan buatan serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air buatan, yang akan dicapai melalui strategi:Untuk mewujudkan hal tersebut, bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk mewujudkan Ketahanan Air, Kedaulatan Pangan,dan Ketahanan Energi, yang akan diwujudkan melalui sasaran strategis
 - Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan dari 0% menjadi 100%, yang akan dicapai melalui strategis
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
 - Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak.
Dengan sasaran program yaitu:
 - Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat , dan meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

- Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat. Sedangkan strateginya dilakukan melalui:
 - Pencapaian target 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia pada akhir periode perencanaan, akan dicapai melalui strategi Utama.
 - Pengentasan permukiman kumuh perkotaan
 - Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik, yaitu dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat
 - Pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan
 - Pembangunan rumah layak huni
 - Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
- c. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (DPU-PESDM)
 - Meningkatnya kualitas pengaturan dan Pembangunan Infrastruktur Dasar & Implementasi Program Pembangunan Daerah pada kawasan Strategis DIY
 - Meningkatnya ketersediaan infrastruktur (air minum, yang memadai baik kuantitas dan kualitas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta :

“ Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat “

Sasaran

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota adalah sebagai berikut :

- Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat
- Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tercantum dalam tabel 5.1

Tabel 5.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DPUPKP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	73,20%	75,56%	78,07%	80,58%	83,10%	85,61%
			Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	89,23%	90,17%	91,16%	92,38%	93,55%	94,89%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi	Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan		
Misi 6	Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman		
Tujuan Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat	Sasaran Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Strategi Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase Penambahan pembangunan gedung pemerintah Peningkatan perumahan permukiman dan tata bangunan	Kebijakan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan perlengkapan jalan Meningkatkan kualitas penerangan jalan umum Meningkatkan pembangunan saluran pengairan/penyediaan bangunan talang Meningkatkan kualitas saluran pengairan/penyediaan bangunan talang Mengoptimalkan penataan kawasan sungai Meningkatkan pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman Meningkatkan penanganan kawasan kumuh Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Meningkatkan pengelolaan Rusunawa Mengoptimalkan cakupan saluran air limbah Mengoptimalkan pengelolaan air minum Mengoptimalkan pengelolaan pemakaman

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mencapai sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yaitu : “ Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perkotaan Yang Berkualitas dan memadahi “ sebagaimana telah disusun dalam bab sebelumnya , sesuai dengan bidang tugas Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.

Program –program yang disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang berhubungan dengan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022

Masing-masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya , sehingga hasil pembangunan dapat terukur perkembangannya sampai akhir periode RENSTRA .

Pencapaian target indicator kinerja program disusun secara rinci untuk setiap tahunnya disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk masing-masing program

Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai mana tercantum dalam tabel 6.1

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PUPKP
KOTA YOGYAKARTA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												U Ke
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	82%	65.795.425.135	84%	44.572.489.000	86%	45.909.663.670	88%	47.286.953.580	90%	48.705.562.188	92%	50.166.729.053	
					Persentase kualitas penerangan jalan umum	21%		30%		40%		50%		60%		70%		
					Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan	73%	37.022.404.586	73,50%	39.215.056.000	74%	40.391.507.680	74,50%	41.603.252.910	75%	42.851.350.498	75,50%	44.136.891.013	
					Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak sesuai	90,73%		91,29%		91,85%		92,42%		92,98%		93,54%		
				Pembangunan Gedung Pemerintah	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	86%	37.624.331.247	87%	20.500.000.000	88%	21.115.000.000	89%	21.748.450.000	90%	22.400.903.500		23.072.930.605	
Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman			Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan	Persentase kualitas sarana prasarana dasar	91,8%	13.219.790.300	93,0%	14.207.392.038	94,2%	14.633.613.799	95,5%	15.072.622.213	96,7%	15.524.800.880	98,0%	15.990.544.906	
					Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	83,22%		84%		84,06%		85,09%		86,21%		87,62%		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017 – 2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagaimana mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 mempunyai tujuan memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi misi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Yogyakarta pada akhir periode RENSTRA.

Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA yang diinginkan dilihat dari pencapaian indikator outcome prioritas pembangunan setiap tahunnya .

Uraian Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Yogyakarta tercantum dalam tabel 7.1

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			Tahun	1	2	3	4	5	
1	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan		82%	84%	86%	88%	90%	92%	
2	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan		21%	30%	40%	50%	60%	70%	
3	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud		73%	73,50%	74%	74,50%	75%	75,50%	
4	Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.		90,73%	91,29%	91,85%	92,42%	92,98%	93,54%	
5	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan		86%	87%	88%	89%	90%	91%	
6	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman		91,8%	93,0%	94,2%	95,5%	96,7%	98,0%	
7	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai		83,22%	84%	84,06%	85,09%	86,21%	87,62%	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini telah disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai dengan format Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang selanjutnya akan digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 – 2022 . Rumusan program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renstra 2012-2016 yang lalu, identifikasi isu-isu penting bidang pekerjaan umum, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, review atas rencana awal RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun daerah.

Beberapa usulan program dan kegiatan untuk tahun 2017 - 2022 terlihat membutuhkan beban pendanaan yang cukup besar karena Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta perlu meningkatkan pengelolaan infrastruktur kota diberbagai sektor , karena masih banyak sarana dan prasarana kota yang masih harus ditingkatkan maupun diperbaiki . Besar harapan bahwa rencana kerja akan memperoleh pendanaan yang sesuai kebutuhan demi kelancaran penyelenggaraan ketugasan.

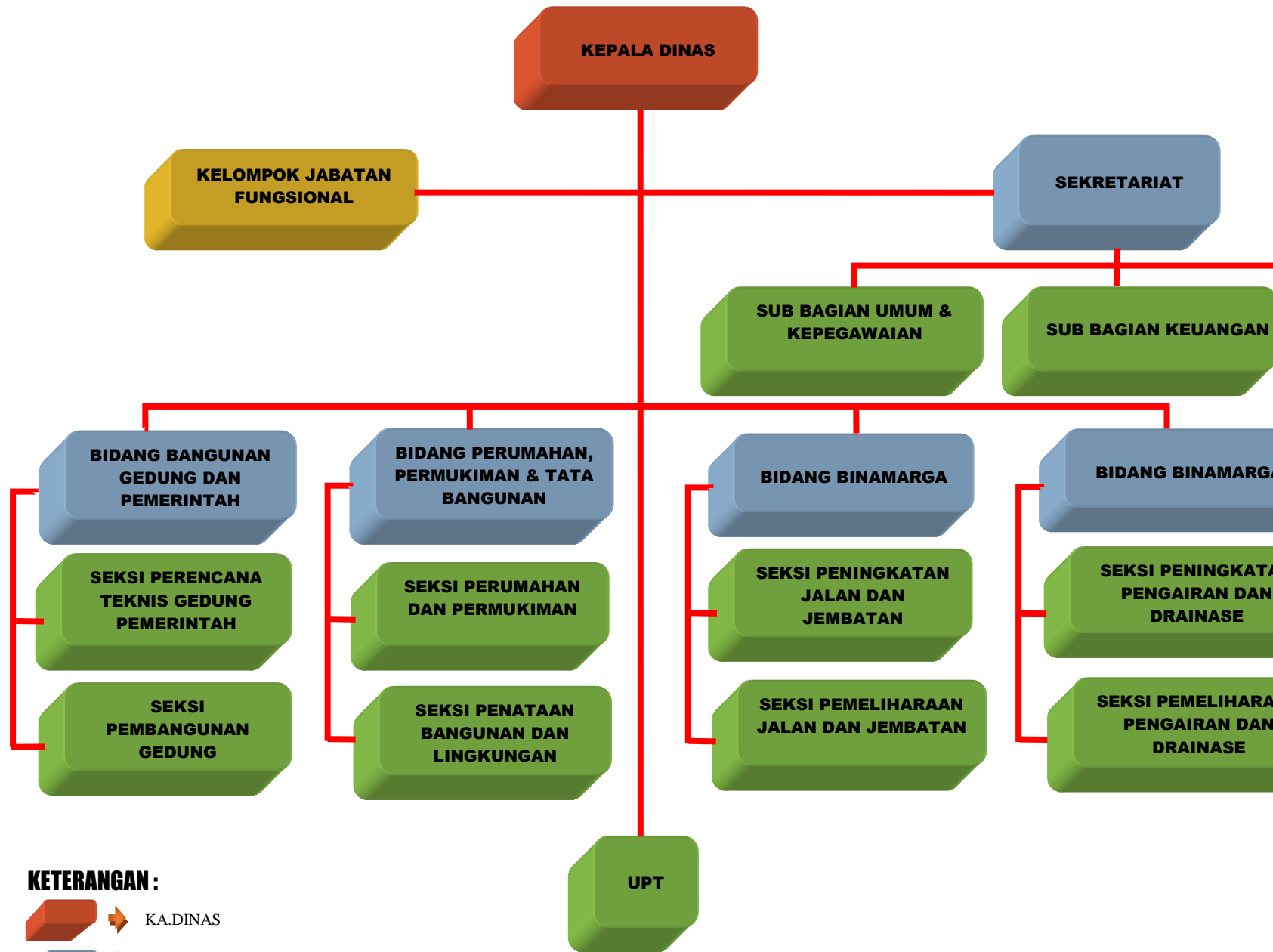
Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Yogyakarta,

Kepala Dinas

Agus Tri Haryono
NIP.19720306 1996 03 1 004



- KETERANGAN :**
-  → K.A.DINAS
 -  → SEKRETARIS/ BIDANG
 -  → SUB. BAG / SEKSI
 -  → FUNGSIONAL

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPUPKP

Permasalahan-permasalahan Pembangunan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta secara garis besar meliputi :

Bidang Sumber Daya Air :

1. Sebagian besar saluran drainase maupun saluran irigasi , baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran rumah tangga dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang.
2. Pembangunan saluran drainase dan saluran irigasi khususnya di lingkungan permukiman tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan saluran, sehingga banyak saluran yang tidak/kurang terpelihara dengan baik.
3. Adanya genangan air yang sering terjadi karena kurang selarasnya sistem jaringan drainase dengan laju perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kota.
4. Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah, dan pada saluran yang lain juga berfungsi sebagai saluran irigasi.
5. Banyaknya bangunan baik permanen dan semi permanen di bantaran sungai ,Drainase dan Irigasi yang mengganggu aliran air dan konstruksi bangunan air.
6. Banyaknya karamba yang dipasang oleh masyarakat menyebabkan terganggunya aliran sungai bahkan bisa membelokkan arah aliran yang menyebabkan rusaknya tanggul sungai.
7. Begitu cepatnya laju perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan diperlukannya infrastruktur permukiman.

8. Usia talud yang rata-rata sudah berumur diatas 20 tahun sehingga perlu direhabilitasi.
9. Konstruksi talud yang rata-rata terlalu curam kemiringannya dikarenakan terdesaknya permukiman .
10. Akibat kewenangan sungai yang masih dipusat sehingga tidak dapat maksimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi .

Bidang Bina Marga :

1. Segi Prasarana Jalan dilihat dari kondisi jalan
Total panjang jalan di kota 235 km, memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar, apabila kondisi cuaca menyebabkan curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi menyebabkan terjadinya genangan yang berdampak pada kerusakan jalan.
2. Penerangan Jalan Umum
Memenuhi kebutuhan infrastruktur kota Yogyakarta salah satunya dengan pengelolaan penerangan jalan umum, saat ini program pengelolaan penerangan jalan umum terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu : PJU Protokol, PJU Kampung, dan PJU Lingkungan, untuk dapat tersedianya fungsi PJU Kota membutuhkan pembiayaan yang besar , salah satunya untuk rekening PJU, sehingga diperlukan strategi untuk mengurangi /mengefisienkan rekening PJU.

Bidang Perumahan dan Permukiman :

1. Tempat tinggal warga miskin yang umumnya kurang tertata baik dan kurang memiliki prasarana dasar permukiman sehingga menimbulkan adanya kawasan kurang layak huni yang tersentra di daerah bantaran sungai Di Kota Yogyakarta prosentase rumah layak huni dibandingkan seluruh rumah adalah sebesar 4,36 % pada tahun 2010.
2. Berkaitan dengan Penyediaan Prasarana Air Bersih Non Perpipaan berupa pemasangan water treatment dan rehabilitasi MCK umum,dari 716 unit MCK yang telah terpasang sebanyak 216 unit ,jumlah ini tentulah sangat sedikit karena jumlah MCK yang telah terpasang water treatment hanya 30,17 %.

3. Dari 43 sarana Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Komunal domestic , 37 diantaranya di tiga bantaran tiga sungai (code,winongo,gajahwong) sebagian besar belum berfungsi optimal .Sistem pembuangan air limbah terpusat di Sewon tersebut telah tersambung dengan saluran pembuangan 10.119 rumah tangga .

Bidang Bangunan Gedung :

1. Belum semua bangunan gedung pemerintah memiliki sarana prasarana yang mendukung bagi penyandang disabilitas .
2. Belum terpenuhinya semua bangunan gedung yang sesuai standar pelayanan .

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Telaah Terhadap Visi Pembangunan

Visi Kota Yogyakarta sebagai mana tertuang dalam RPJMD adalah sebagai berikut ***“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”***

Dalam Mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut terdapat misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , yaitu misi ke 6 :

Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas PUPKP Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

<p>Visi : “ <i>Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan</i> “</p>

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 6 : Membangun Sarana Prasarana Publik dan Permukiman			
	Program- Program pada Dinas PUP-KP Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Sistem Drainase Perkotaan Pembangunan sistem drainase terutama saluran air hujan di kota Yogyakarta sampai saat ini cukup mendapat perhatian, namun sampai saat ini masih terdapat lokasi rawan genangan terutama	Sebagian besar saluran drainase maupun saluran irigasi, baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran rumah tangga dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan	Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat

		<p>saat curah hujan tinggi, wilayah kota Yogyakarta banyak terdapat cekungan lahan yang menyebabkan limpasan air drainase, tersumbatnya saluran drainase yang ada oleh sampah lingkungan maupun tingginya sampah oleh endapan tanah di saluran yang ada. Perbaikan dan peningkatan kuantitas dan kualitas drainase di Kota Yogyakarta harus terus diupayakan agar seluruh bagian system ini dapat berfungsi dengan baik.</p>	<p>menggenang.</p>	<p>perlunya menjaga kebersihan saluran untuk mengurangi sedimentasi berupa sampah, kotoran rumah tangga dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang serta Mengefektifkan dan mengefisienkan dana yang terbatas untuk pembangunan saluran drainase baik melalui APBD maupun DAK</p>
	<p>Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p>	<p>Kondisi Jalan Peningkatan kondisi jalan dalam keadaan baik harus terus ditingkatkan selama lima tahun kedepan berkaitan dengan</p>	<p>Belum terpenuhinya sarana prasarana yang cukup memadai, sumber daya</p>	<p>Adanya dukungan anggaran dari pusat dalam bentuk dana DAK</p>

		visi misi pembangunan kota untuk menunjang kota pariwisata.	serta dana yang tersedia	
	Program Penataan Perumahan dan Permukiman	Sistem Pengelolaan Sarana Prasarana Lingkungan - Berkaitan dengan Penyediaan Prasarana Air Bersih Non Perpipaan berupa pemasangan water treatment dan rehabilitasi MCK umum, dari 716 unit MCK yang telah terpasang sebanyak 216 unit ,jumlah ini tentulah sangat sedikit karena jumlah MCK yang telah terpasang water treatment hanya 30,17 %.	kebutuhan air bersih non perpipaan berada pada MCK Komunal ,di wilayah kota yogyakarta masih kurang lahan untuk membangun MCK komunal , kemudian kesulitan untuk mendapatkan pengelola untuk, pemelihar aannya	Adanya dukungan anggaran dari pusat dalam bentuk dana DAK

		<p>Bangunan Rumah Layak Huni Di Kota Yogyakarta prosentase rumah layak huni dibandingkan seluruh rumah adalah sebesar 4,36 %</p>	<p>Permasalahan pada kepemilikan sertifikat hak milik pada penanganan rumah tidak layak huni yang merupakan persyaratan pemberian bantuan kepada masyarakat .</p>	<p>Dukungan dana dari pusat baik dalam bentuk DAK, Hibah maupun APBD karena berkaitan dengan pengentasan kemiskinan</p>
--	--	---	---	---

3.3 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3.3.1 Telaah Terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong ”

Dalam Mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut terdapat misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , yaitu misi ke 6 :

Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman

Tabel 3.3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas PUPKP

**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Visi “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong ”				
No	Misi dan Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air			
2	Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya			

	<p>air yang berkelanjutan.</p> <p>Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase</p>	<p>fungsi lindung kawasan sempadan sungai rendah / bahkan tidak ada sama sekali.</p>	<p>Kebanyakan permukiman pinggir sungai sudah berada/berposisi mepet dengan kali /sungai (baik code,gajahwong, winongo,buntung, belik/manunggal, widuri, kali tekik) sehingga bila terjadi hujan deras/banjir maka akan menyebabkan talud ambrol/rusak sehingga membahayakan permukiman dan Untuk wilayah kota Yogyakarta tidak bisa diterapkan sesuai</p>	<p>Melakukan penataan kawasan dibantaran sungai dengan program M3K (Mundur, Mungghah, Madep Kali).</p>
--	---	--	--	---

			dengan aturan yang ada, dan kewenangan sungai sesuai peraturan pemerintah no 38 tahun 2011 berada di pusat dalam hal Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO)	
--	--	--	---	--

		<p>Sistem Drainase Perkotaan</p> <p>Kualitas fasilitas drainase cenderung masih rendah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran-saluran yang ada dimensinya sudah tidak mencukupi untuk kondisi sekarang - Banyaknya utilitas bawah tanah yang melintang maupun memanjang di dalam SAH (kabel.pipa dll) - Kualitas fasilitas drainase berkaitan dengan cakupan infrastruktur sistem drainase skala kawasan dan skala kota , sedangkan luas cakupan infrastruktur drainase yang dikelola adalah 	<p>Dukungan pihak pihak terkait serta anggaran dari pusat baik dari dana keistimewaan maupun DAK untuk penyelesaian masalah sistem drainase perkotaan</p>
--	--	---	--	---

			344.960m, sedangkan luasan infrastruktur yang harus dibangun adalah 497.000 m.	
--	--	--	---	--

3	<p>Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan</p> <p>Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p>	<p>Kondisi Jalan</p> <p>Penanganan kerusakan jalan akibat pembangunan infrastruktur lain dan genangan akibat curah hujan yang tinggi mengakibatkan jalan berlubang</p> <p>Bangunan Pelengkap Jalan</p> <p>- Trotoar</p> <p>Mengembalikan Fungsi trotoar agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan</p>	<p>Kerusakan yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur lain yang dikerjakan oleh pusat (satker) sehingga tidak dapat segera ditindaklanjuti dan membutuhkan waktu yang lama</p> <p>- Banyaknya kerusakan trotoar akibat dipergunakan tidak</p>	<p>- Adanya dukungan dana dari pusat</p> <p>- Berfungsinya mesin AMP yang dapat dipergunakan untuk pemeliharaan jalan</p> <p>Dukungan berbagai pihak terkait untuk penataan trotoar</p>
---	---	--	---	---

		<p>mendukung disabilitas</p> <p>Penerangan Jalan Umum</p> <p>Mengoptimalkan fungsi nyala LPJU Kota Yogyakarta sebagai kota yang nyaman huni sesuai dengan visi kepala daerah</p>	<p>sebagaimana mestinya seperti PKL dan hal lain yang merusak trotoar</p> <p>- Belum terpenuhinya semua trotoar di kota yogyakarta yang telah terpasang guiding blok untuk memudahkan akses bagi kaum difabel</p> <p>Biaya rekening yang besar dan terdapat kenaikan setiap tahunnya</p>	<p>Penggantian lampu Penerangan Jalan Umum dengan lampu hemat energi (LED) pada semua jenis PJU Protokol , PJU Kampung dan PJU Lingkungan Menekan beban rekening penerangan jalan umum.</p>
--	--	---	--	---

4	<p>Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak</p>	<p>- Mengembangkan infrastruktur dasar permukiman</p> <p>Penyediaan sarana prasarana dasar permukiman</p> <p>- Penataan kawasan kumuh</p>	<p>Keterbatasan sumber daya baik terkait dengan pendataan serta sarana prasarana pendukung di lapangan serta peran serta dari masyarakat untuk mendukung keberhasilan pencapaian Penyediaan sarana prasarana dasar</p>	<p>- Dukungan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah</p> <p>- Dana tersedia untuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah</p> <p>- koordinasi dengan pusat supaya</p>
---	--	---	--	---

			<p>permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan permukiman kumuh di kota Yogyakarta meliputi luasan 264,89 ha (SK Walikota tentang Penetapan Kawasan Kumuh), sedangkan sampai saat ini baru tertangani 60 ha, sehingga masih 204 ha yang akan kita tangani sampai tahun 2019. - Kekumuhan yang ada di kota Yogyakarta didominasi oleh permukiman yang illegal di bantaran 	<p>dana -dana pusat banyak terkucur di wilayah kota Yogyakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan kumuh secara kawasan bukan sektoral melalui APBD Kota Yogyakarta
--	--	--	--	---

			<p>sungai, sehingga batas garis sempadan sungai terlampaui, kadang daerah wedi kengser menjadi daerah hunian illegal. Hal ini memerlukan pengaturan yang tegas, salah satunya Perda untuk Penanganan, Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh mutlak dibutuhkan.</p>	
--	--	--	--	--

3.4 TELAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 yang disusun untuk kurun waktu 20 tahun mendatang mengacu pada hirarki fungsional sesuai dengan RTRWN dan selaras dengan RTRW Propinsi dan tidak terlepas dari penataan ruang di wilayah sekitarnya .

Rencana struktur ruang kota Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 sebagai berikut:
 Visi pengembangan tata ruang di Kota Yogyakarta didasarkan pada struktur dan tata guna lahan dalam konteks ruang perkotaan di sekitarnya .

Tabel 3.4.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas PUPKP
Terhadap Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

Visi pengembangan tata ruang di Kota Yogyakarta didasarkan pada struktur dan tata guna lahan dalam konteks ruang perkotaan di sekitarnya				
No	Telaah RTRW dan KLHS	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Prasarana perkotaan, yang meliputi perumahan dan permukiman, jalan drainase, air bersih, air limbah dan sanitasi. Pengembangan dan pelayanan prasarana umum mendukung fungsi-fungsi perkotaan, sesuai dengan alokasi ruang yang mengakomodasi	Dalam Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perkotaan selain terkendala oleh sumber daya , sarana prasarana juga oleh dana yang tersedia, terkadang dalam mengefisienkan dana yang tersedia menyebabkan pembangunan tidak dapat dilakukan secara merata melainkan	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran - Keterbatasan kewenangan - Keterbatasan sumber daya 	- Adanya dana tersedia yang dapat diajukan untuk penyelesaian pembangunan sarana prasarana perkotaan selain bersumber dari dana APBD Kota Yogyakarta

	<p>an fungsi tersebut; juga menciptakan sistem yang saling menguntungkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana perkotaan.</p> <p>Pengelolaan perkotaan, yang mengakomodasi pengembangan fungsi-fungsi perkotaan, organisasi ruang untuk mengakomodasi an fungsi perkotaan, dan penyediaan prasarana untuk mendukung fungsi tersebut.</p> <p>Terciptanya iklim dan kondisi yang transparan, akuntabilitas dan demokrasi dalam</p>	<p>bertahap sedangkan tuntutan masyarakat juga besar sehingga tidak dapat terfokuskan pada satu wilayah melainkan dapat ke berbagai wilayah sesuai kebutuhan yang merupakan skala prioritas karena kebutuhan mendesak dan harus segera ditangani</p>		
--	---	--	--	--

	<p>pengelolaan pengembangan kota akan melibatkan peran dari partisipasi stakeholder, peran serta masyarakat dan sektor swasta.</p> <p>Strategi dasar pengembangan Kota Yogyakarta didasarkan pada kerangka pengembangan struktur kawasan juga fungsi dan perannya, yakni:</p> <p>Ke arah utara dan timur, berupa optimasi dan pengendalian pengendalian pemanfaatan ruang melalui penataan lingkungan dan bangunan.</p> <p>Ke arah selatan, pengembangan dan pembangunan</p>			
--	--	--	--	--

	<p>daerah-daerah baru yang mewadahi peningkatan jumlah penduduk, serta pengembangan kegiatan transportasi regional, perdagangan dan jasa, serta perencanaan penataan lingkungan permukiman untuk mengantisipasi ketidakteraturan.</p> <p>Ke arah barat penataan lingkungan permukiman, untuk memperkuat karakter perkotaan</p>			
--	--	--	--	--

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan kondisi pembangunan yang telah dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi maka ada beberapa isu strategis ditinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Peningkatan jalan yang tidak signifikan mempengaruhi permasalahan lalu lintas seperti kesemrawutan dan kemacetan
- Sarana prasarana permukiman untuk menekan prosentase permukiman kumuh di Kota Yogyakarta dengan memperhatikan kondisi sanitasi , drainase , jalan kampung, pengolahan limbah untuk mewujudkan rumah layak huni dan lingkungannya .
- Peningkatan kebutuhan air bersih non perpipaan karena masyarakat Kota Yogyakarta lebih banyak berakses air bersih non perpipaan
- Penanganan air limbah dan penyediaan sanitasi lingkungan
- Sarana saluran drainase yang belum tertata akibat peralihan lahan pertanian menjadi lahan permukiman
- Pengembangan MCK Komunal
- Saluran limbah rumah tangga / assenering sebagai pendukung kebersihan lingkungan
- Penggantian lampu Penerangan Jalan Umum dengan lampu hemat energi (LED) pada semua jenis PJU Protokol , PJU Kampung dan PJU Lingkungan untuk mengefisiensi beban rekening penerangan jalan umum.
- Pemenuhan kebutuhan standar pelayanan dan kebutuhan sarana prasarana yang sesuai dengan peraturan yang berlaku diantaranya penyediaan sarpras untuk penyandang disabilitas

2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

- Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal,kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan
- Pengelolaan Sumber Daya Air, Konservasi sumber daya air yang ditujukan agar terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air alami dan buatan serta peningkatan kapasitas sumber-

sumber air buatan, yang akan dicapai melalui strategi: Untuk mewujudkan hal tersebut, bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk mewujudkan Ketahanan Air, Kedaulatan Pangan, dan Ketahanan Energi, yang akan diwujudkan melalui sasaran strategis

- Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan dari 0% menjadi 100%, yang akan dicapai melalui strategis

Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;

- Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak.

Dengan sasaran program yaitu:

- Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, dan meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

- Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat. Sedangkan strateginya dilakukan melalui:

Pencapaian target 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk

Indonesia pada akhir periode perencanaan, akan dicapai melalui strategi Utama.

- Pengentasan permukiman kumuh perkotaan
- Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik, yaitu dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat
- Pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan
- Pembangunan rumah layak huni
- Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.

3. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (DPU-PESDM)

- Meningkatnya kualitas pengaturan dan Pembangunan Infrastruktur Dasar & Implementasi Program Pembangunan Daerah pada kawasan Strategis DIY
- Meningkatnya ketersediaan infrastruktur (air minum, yang memadai baik kuantitas dan kualitas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta :

“ Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat “

4.1.2 Sasaran

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota adalah sebagai berikut :

- Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan
- Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tercantum dalam tabel 4.1

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun adalah sebagai berikut :

- 1) Mengefektifkan dan mengefisiensikan dana yang terbatas
- 2) Tuntutan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas
- 3) Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana yang memadai

Peluang :

- 1) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
- 2) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPUPKP

Permasalahan-permasalahan Pembangunan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta secara garis besar meliputi :

Bidang Sumber Daya Air :

2. Sebagian besar saluran drainase maupun saluran irigasi , baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran rumah tangga dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang.
3. Pembangunan saluran drainase dan saluran irigasi khususnya di lingkungan permukiman tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan saluran, sehingga banyak saluran yang tidak/kurang terpelihara dengan baik.
4. Adanya genangan air yang sering terjadi karena kurang selarasnya sistem jaringan drainase dengan laju perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kota.
5. Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah, dan pada saluran yang lain juga berfungsi sebagai saluran irigasi.
6. Banyaknya bangunan baik permanen dan semi permanen di bantaran sungai ,Drainase dan Irigasi yang mengganggu aliran air dan konstruksi bangunan air.
7. Banyaknya karamba yang dipasang oleh masyarakat menyebabkan terganggunya aliran sungai bahkan bisa membelokkan arah aliran yang menyebabkan rusaknya tanggul sungai.
8. Begitu cepatnya laju perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan diperlukannya infrastruktur permukiman.
9. Usia talud yang rata-rata sudah berumur diatas 20 tahun sehingga perlu direhabilitasi.
10. Konstruksi talud yang rata-rata terlalu curam kemiringannya dikarenakan terdesaknya permukiman .
11. Akibat kewenangan sungai yang masih dipusat sehingga tidak dapat maksimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi .

Bidang Bina Marga :

1. Segi Prasarana Jalan dilihat dari kondisi jalan

Total panjang jalan di kota 235 km, memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar, apabila kondisi cuaca menyebabkan curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi menyebabkan terjadinya genangan yang berdampak pada kerusakan jalan.

3. Penerangan Jalan Umum

Memenuhi kebutuhan infrastruktur kota Yogyakarta salah satunya dengan pengelolaan penerangan jalan umum, saat ini program pengelolaan penerangan jalan umum terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu : PJU Protokol, PJU Kampung, dan PJU Lingkungan, untuk dapat tersedianya fungsi PJU Kota membutuhkan pembiayaan yang besar , salah satunya untuk rekening PJU, sehingga diperlukan strategi untuk mengurangi /mengefisienkan rekening PJU.

Bidang Perumahan dan Permukiman :

1. Tempat tinggal warga miskin yang umumnya kurang tertata baik dan kurang memiliki prasarana dasar permukiman sehingga menimbulkan adanya kawasan kurang layak huni yang tersentra di daerah bantaran sungai Di Kota Yogyakarta prosentase rumah layak huni dibandingkan seluruh rumah adalah sebesar 4,36 % pada tahun 2010.

2. Berkaitan dengan Penyediaan Prasarana Air Bersih Non Perpipaan berupa pemasangan water treatment dan rehabilitasi MCK umum,dari 716 unit MCK yang telah terpasang sebanyak 216 unit ,jumlah ini tentulah sangat sedikit karena jumlah MCK yang telah terpasang water treatment hanya 30,17 %.

3. Dari 43 sarana Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Komunal domestic , 37 diantaranya di tiga bantaran tiga sungai (code,winongo,gajahwong)

sebagian besar belum berfungsi optimal .Sistem pembuangan air limbah terpusat di Sewon tersebut telah tersambung dengan saluran pembuangan 10.119 rumah tangga .

Bidang Bangunan Gedung :

3. Belum semua bangunan gedung pemerintah memiliki sarana prasarana yang mendukung bagi penyandang disabilitas .
4. Belum terpenuhinya semua bangunan gedung yang sesuai standar pelayanan .

3.3 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

1. Telaah Terhadap Visi Pembangunan

Visi Kota Yogyakarta sebagai mana tertuang dalam RPJMD adalah sebagai berikut ***“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”***

Dalam Mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut terdapat misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , yaitu misi ke 6 : ***Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman***

Adapun faktor–faktor pendorong dalam pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi pembangunan kota Yogyakarta adalah permasalahan infrastruktur perkotaan yang masih harus terus menerus dibenahi antara lain :

1. Sistem Drainase Perkotaan

Pembangunan sistem drainase terutama saluran air hujan di kota Yogyakarta sampai saat ini cukup mendapat perhatian, namun sampai saat ini masih terdapat lokasi rawan genangan terutama saat curah hujan tinggi, wilayah kota Yogyakarta banyak terdapat cekungan lahan yang menyebabkan limpasan air drainase, tersumbatnya saluran drainase yang ada oleh sampah lingkungan maupun tingginya sampah oleh endapan tanah di saluran yang ada. Perbaikan dan peningkatan kuantitas dan kualitas drainase di Kota Yogyakarta harus terus diupayakan agar seluruh bagian system ini dapat berfungsi dengan baik.

2. Kondisi Jalan

Peningkatan kondisi jalan dalam keadaan baik harus terus ditingkatkan selama lima tahun kedepan berkaitan dengan visi misi pembangunan kota untuk menunjang kota pariwisata .

3. Sistem Pengelolaan Sarana Prasarana Lingkungan

Berkaitan dengan Penyediaan Prasarana Air Bersih Non Perpipaan berupa pemasangan water treatment dan rehabilitasi MCK umum, dari 716 unit MCK yang telah terpasang sebanyak 216 unit , jumlah ini tentulah sangat sedikit karena jumlah MCK yang telah terpasang water treatment hanya 30,17 %.

4. Bangunan Rumah Layak Huni

Di Kota Yogyakarta prosentase rumah layak huni dibandingkan seluruh rumah adalah sebesar 4,36 %

5. Pembangunan IPAL Komunal dan Sambungan Rumah (SR)

6. Peningkatan kualitas penerangan jalan umum sampai jalan lingkungan dan lampu hias yang merupakan indikator kinerja dari arah kebijakan pengembangan kawasan citra kota dalam misi program pembangunan kota Yogyakarta.

3.4 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan – Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta

3.4.1 Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019 adalah :

“Tersedianya Infrastruktur dan Permukiman yang andal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025 “

Adapun makna dari Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman yang penjabarannya meliputi :

- Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.
- Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian) ,mobilitas , kondisi jalan , keselamatan , dan kecepatan tempuh rata-rata.
- Pelayanan parasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis
- Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan Permukiman yang andal berbasis penataan ruang

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

Untuk mencapai visi ***“Tersedianya Infrastruktur dan Permukiman yang andal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025”***

ditetapkan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019 yaitu :

- Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
- Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan berkelanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air .
- Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal , terpadu dan berkelanjutan.

3.4.2 Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Perumahan Rakyat (PUPR)

“ Kemantapan Infrastruktur Dasar dan Efisiensi Pendayagunaan Energi Sumber Daya Mineral “

Misi dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Perumahan Rakyat

(PUPR) :

1. Mengintegrasikan Penataan Ruang Wilayah
2. Mengembangkan infrastruktur dasar
3. Memfasilitasi Kelayakan Pemukiman
4. Memfasilitasi Ketersediaan Energi Baru dan Terbarukan
5. Menjaga Keseimbangan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral
6. Memonitor Ketersediaan dan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas

7. Menjaga Keseimbangan antara Pendayagunaan dan Konservasi Sumber Daya Air
8. Mengendalikan Daya Rusak Air
9. Membina Konstruksi Daerah
10. Mengembangkan Sistem dan Mendayagunakan Pelayanan Informasi dan Pengujian Bahan Konstruksi
11. Mendukung Pengembangan Sektor lain

Permasalahan OPD apa?

Gambaran ke depan seperti apa?

3.5 TELAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 yang disusun untuk kurun waktu 20 tahun mendatang mengacu pada hirarki fungsional sesuai dengan RTRWN dan selaras dengan RTRW Propinsi dan tidak terlepas dari penataan ruang di wilayah sekitarnya .

Rencana struktur ruang kota Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 sebagai berikut :

Visi pengembangan tata ruang di Kota Yogyakarta didasarkan pada struktur dan tata guna lahan dalam konteks ruang perkotaan di sekitarnya berkaitan dengan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Prasarana perkotaan, yang meliputi perumahan dan peremajaan permukiman, jalan drainase, air bersih, air limbah dan sanitasi. Pengembangan dan pelayanan prasarana umum mendukung fungsi-fungsi perkotaan, sesuai dengan alokasi ruang yang mengakomodasikan fungsi tersebut; juga menciptakan sistem yang saling menguntungkan

dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana perkotaan.

2. Pengelolaan perkotaan, yang mengakomodasi pengembangan fungsi-fungsi perkotaan, organisasi ruang untuk mengakomodasikan fungsi perkotaan, dan penyediaan prasarana untuk mendukung fungsi tersebut. Terciptanya iklim dan kondisi yang transparan, akuntabilitas dan demokrasi dalam pengelolaan pengembangan kota akan melibatkan peran dari partisipasi stakeholder, peran serta masyarakat dan sektor swasta.

Strategi dasar pengembangan Kota Yogyakarta didasarkan pada kerangka pengembangan struktur kawasan juga fungsi dan perannya, yakni:

1. Ke arah utara dan timur, berupa optimasi dan pengendalian penggunaan pemanfaatan ruang melalui penataan lingkungan dan bangunan.
2. Ke arah selatan, pengembangan dan pembangunan daerah-daerah baru yang mewadahi peningkatan jumlah penduduk, serta pengembangan kegiatan transportasi regional, perdagangan dan jasa, serta perencanaan penataan lingkungan permukiman untuk mengantisipasi ketidakteraturan.
3. Ke arah barat penataan lingkungan permukiman, untuk memperkuat karakter perkotaan.

Perwujudan Struktur Ruang

1. Perwujudan Sistem Perkotaan
 - 1.1 Percepatan pengembangan pusat kota, meliputi: (1) Peningkatan fungsi pusat kota, yang berlokasi di Kecamatan Danurejan, Gedongtengen, dan Gondomanan, (2) Pengembangan kawasan perkotaan, yang berlokasi di Kecamatan Umbulharjo.

- 1.2 Percepatan pengembangan sub pusat kota, meliputi: Pengembangan/ peningkatan fungsi sub pusat kota, yang berlokasi di Seluruh kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta.
2. Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - 4.1 Jaringan arteri primer: Pemantapan jaringan jalan arteri primer internal kota, yakni jaringan lintas lingkar luar Kota Yogyakarta, yang berlokasi di jalan ring road lintas selatan
 - 4.2 Jaringan jalan arteri sekunder
 - 4.2.1 Pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota, yang terdiri atas: (i) Jaringan lintas selatan, yang berlokasi di Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan Menteri Supeno, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Ngeksigondo, (ii) Jaringan lintas tengah, yang berlokasi di sepanjang koridor Jalan RE Martadinata.
 - 4.2.2 Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan wilayah lain di luar kota, yakni jaringan lintas Yogyakarta ke arah Kabupaten Bantul, yang berlokasi di Jalan Patangpuluhan.
 - 4.2.3 Jembatan
Pembangunan jembatan *fly over* pada persimpangan dengan jalur KA, yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Aipda Tut Harsono.

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi: (1) Rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, dan (2) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
2. Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air (SDA), melalui konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

3. Air limbah, meliputi: (1) Pembangunan dan pemeliharaan saluran air limbah, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, (2) Optimalisasi jaringan air limbah domestik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, dan (3) Pengadaan toilet *mobile*, yang berlokasi di Kota Yogyakarta.
4. Air Minum, melalui: (1) Pengembangan instalasi air minum, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, (2) Pengembangan jaringan distribusi, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, dan (3) Pembelian truk tangki air minum.

1.2.1 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan kondisi pembangunan yang telah dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi maka ada beberapa isu strategis ditinjau dari :

a. Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Peningkatan jalan yang tidak signifikan mempengaruhi permasalahan lalu lintas seperti kesemrawutan dan kemacetan
- Sarana prasarana permukiman untuk menekan prosentase permukiman kumuh di Kota Yogyakarta dengan memperhatikan kondisi sanitasi , drainase , jalan kampung, pengolahan limbah untuk mewujudkan rumah layak huni dan lingkungannya .
- Peningkatan kebutuhan air bersih non perpipaan karena masyarakat Kota Yogyakarta lebih banyak berakses air bersih non perpipaan
- Penanganan air limbah dan penyediaan sanitasi lingkungan
- Sarana saluran drainase yang belum tertata akibat peralihan lahan pertanian menjadi lahan permukiman
- Pengembangan MCK Komunal
- Saluran limbah rumah tangga / assenering sebagai pendukung kebersihan lingkungan
- Penggantian lampu Penerangan Jalan Umum dengan lampu hemat energi

(LED) pada semua jenis PJU Protokol , PJU Kampung dan PJU Lingkungan untuk mengefisiensi beban rekening penerangan jalan umum.

- Pemenuhan kebutuhan standar pelayanan dan kebutuhan sarana prasarana yang sesuai dengan peraturan yang berlaku diantaranya penyediaan sarpras untuk penyandang disabilitas

b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat :

- Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan
- Pengelolaan Sumber Daya Air, Konservasi sumber daya air yang ditujukan agar terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air alami dan buatan serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air buatan, yang akan dicapai melalui strategi: Untuk mewujudkan hal tersebut, bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk mewujudkan Ketahanan Air, Kedaulatan Pangan, dan Ketahanan Energi, yang akan diwujudkan melalui sasaran strategis
- Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan dari 0% menjadi 100%, yang akan dicapai melalui strategis
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
- Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak.
Dengan sasaran program yaitu:
 - Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat , dan meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
 - Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat. Sedangkan strateginya dilakukan melalui:
 - Pencapaian target 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia pada akhir periode perencanaan, akan dicapai melalui strategi Utama.

- Pengentasan permukiman kumuh perkotaan
 - Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik, yaitu dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat
 - Pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan
 - Pembangunan rumah layak huni
 - Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
- c. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (DPU-PESDM)
- Meningkatnya kualitas pengaturan dan Pembangunan Infrastruktur Dasar & Implementasi Program Pembangunan Daerah pada kawasan Strategis DIY
 - Meningkatnya ketersediaan infrastruktur (air minum, yang memadai baik kuantitas dan kualitas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta :

“ Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat “

Sasaran

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota adalah sebagai berikut :

- Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat

- Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tercantum dalam tabel 5.1

Tabel 5.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DPUPKP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	73,20%	75,56%	78,07%	80,58%	83,10%	85,61%
			Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	89,23%	90,17%	91,16%	92,38%	93,55%	94,89%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi	Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan		
Misi 6	Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman		
Tujuan Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat	Sasaran Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan	Strategi Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase Penambahan pembangunan gedung pemerintah Peningkatan perumahan permukiman dan tata bangunan	Kebijakan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan perlengkapan jalan Meningkatkan kualitas penerangan jalan umum Meningkatkan pembangunan saluran pengairan/penyediaan bangunan talud Meningkatkan kualitas saluran pengairan/penyediaan bangunan talud Mengoptimalkan penataan kawasan sungai Meningkatkan pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman Meningkatkan penanganan kawasan kumuh Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Meningkatkan pengelolaan Rusunawa Mengoptimalkan cakupan saluran air limbah Mengoptimalkan pengelolaan air minum Mengoptimalkan pengelolaan pemakaman

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka mencapai sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yaitu : “ Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perkotaan Yang Berkualitas dan memadai “ sebagaimana telah disusun dalam bab sebelumnya , sesuai dengan bidang tugas Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.

Program –program yang disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang berhubungan dengan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022

Masing-masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya , sehingga hasil pembangunan dapat terukur perkembangannya sampai akhir periode RENSTRA .

Pencapaian target indicator kinerja program disusun secara rinci untuk setiap tahunnya disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk masing-masing program

Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai mana tercantum dalam tabel 6.1

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PUPKP
KOTA YOGYAKARTA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	82%	65.795.425.135	84%	44.572.489.000	86%	45.909.663.670	88%	47.286.953.580	90%	48.705.562.188	92%	50.166.729.053
					Persentase kualitas penerangan jalan umum	21%		30%		40%		50%		60%		70%	
					Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan	73%	37.022.404.586	73,50%	39.215.056.000	74%	40.391.507.680	74,50%	41.603.252.910	75%	42.851.350.498	75,50%	44.136.891.013
					Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak sesumbuha	90,73%		91,29%		91,85%		92,42%		92,98%		93,54%	
				Pembangunan Gedung Pemerintah	86%	37.624.331.247	87%	20.500.000.000	88%	21.115.000.000	89%	21.748.450.000	90%	22.400.903.500		23.072.930.605	
				Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan	91,8%	13.219.790.300	93,0%	14.207.392.038	94,2%	14.633.613.799	95,5%	15.072.622.213	96,7%	15.524.800.880	98,0%	15.990.544.906	
					Persentase kualitas sarana prasarana dasar	83,22%		84%		84,06%		85,09%		86,21%		87,62%	
					Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai												

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017 – 2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagaimana mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 mempunyai tujuan memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi misi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Yogyakarta pada akhir periode RENSTRA.

Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA yang diinginkan dilihat dari pencapaian indikator outcome prioritas pembangunan setiap tahunnya .

Uraian Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Yogyakarta tercantum dalam tabel 7.1

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			Tahun	1	2	3	4	5	
1	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan		82%	84%	86%	88%	90%	92%	
2	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan		21%	30%	40%	50%	60%	70%	
3	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud		73%	73,50%	74%	74,50%	75%	75,50%	
4	Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.		90,73%	91,29%	91,85%	92,42%	92,98%	93,54%	
5	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan		86%	87%	88%	89%	90%	91%	
6	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman		91,8%	93,0%	94,2%	95,5%	96,7%	98,0%	
7	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai		83,22%	84%	84,06%	85,09%	86,21%	87,62%	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini telah disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai dengan format Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang selanjutnya akan digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 – 2022 . Rumusan program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renstra 2012-2016 yang lalu, identifikasi isu-isu penting bidang pekerjaan umum, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, review atas rencana awal RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun daerah.

Beberapa usulan program dan kegiatan untuk tahun 2017 - 2022 terlihat membutuhkan beban pendanaan yang cukup besar karena Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta perlu meningkatkan pengelolaan infrastruktur kota diberbagai sektor , karena masih banyak sarana dan prasarana kota yang masih harus ditingkatkan maupun diperbaiki . Besar harapan bahwa rencana kerja akan memperoleh pendanaan yang sesuai kebutuhan demi kelancaran penyelenggaraan ketugasan.

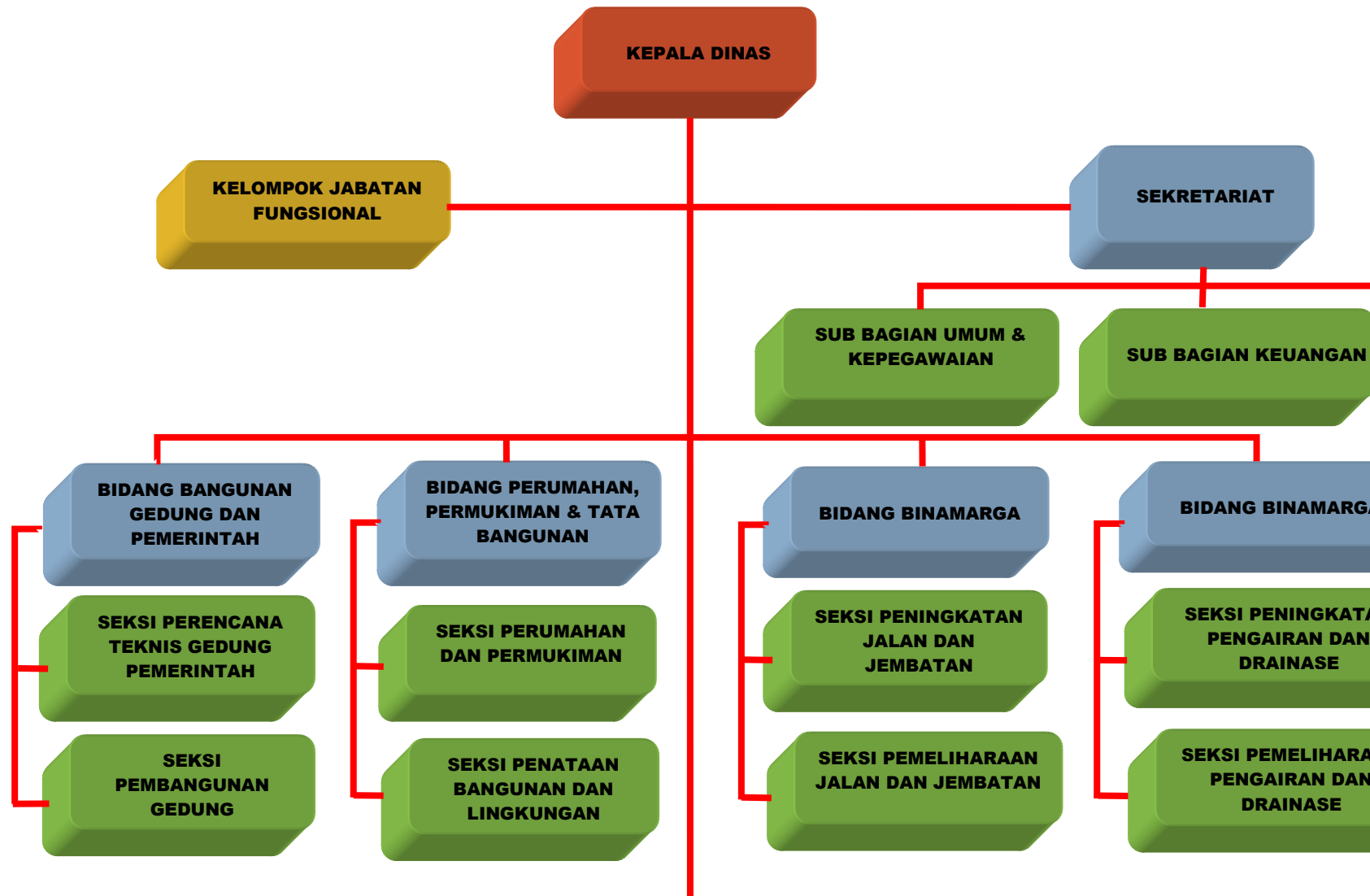
Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Yogyakarta,

Kepala Dinas

Agus Tri Haryono
NIP.19720306 1996 03 1 004



KETERANGAN :

-  → KA.DINAS
-  → SEKRETARIS/ BIDANG
-  → SUB. BAG / SEKSI
-  → FUNGSIONAL

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta :

“ Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat “

4.1.2 Sasaran

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota adalah sebagai berikut :

- Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat
- Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tercantum dalam tabel 4.1

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DPUPKP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE				
				I	II	III	IV	V
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	75,56%	78,07%	80,58%	83,10%	85,61%
			Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	90,17%	91,16%	92,38%	93,55%	94,89%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun adalah sebagai berikut :

- 1) Mengefektifkan dan mengefisiensikan dana yang terbatas
- 2) Tuntutan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas
- 3) Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana yang memadai

Peluang :

- 1) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
- 2) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPUPKP

Permasalahan-permasalahan Pembangunan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta secara garis besar meliputi :

Bidang Sumber Daya Air :

1. Sebagian besar saluran drainase maupun saluran irigasi , baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran rumah tangga dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang.
2. Pembangunan saluran drainase dan saluran irigasi khususnya di lingkungan permukiman tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan saluran, sehingga banyak saluran yang tidak/kurang terpelihara dengan baik.
3. Adanya genangan air yang sering terjadi karena kurang selarasnya sistem jaringan drainase dengan laju perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kota.
4. Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah, dan pada saluran yang lain juga berfungsi sebagai saluran irigasi.
5. Banyaknya bangunan baik permanen dan semi permanen di bantaran sungai ,Drainase dan Irigasi yang mengganggu aliran air dan konstruksi bangunan air.
6. Banyaknya karamba yang dipasang oleh masyarakat menyebabkan terganggunya aliran sungai bahkan bisa membelokkan arah aliran yang menyebabkan rusaknya tanggul sungai.
7. Begitu cepatnya laju perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan diperlukannya infrastruktur permukiman.
8. Usia talud yang rata-rata sudah berumur diatas 20 tahun sehingga perlu direhabilitasi.
9. Konstruksi talud yang rata-rata terlalu curam kemiringannya dikarenakan terdesaknya permukiman .
10. Akibat kewenangan sungai yang masih dipusat sehingga tidak dapat maksimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi .

Bidang Bina Marga :

1. Segi Prasarana Jalan dilihat dari kondisi jalan

Total panjang jalan di kota 235 km, memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar, apabila kondisi cuaca menyebabkan curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi menyebabkan terjadinya genangan yang berdampak pada kerusakan jalan.

2. Penerangan Jalan Umum

Memenuhi kebutuhan infrastruktur kota Yogyakarta salah satunya dengan pengelolaan penerangan jalan umum, saat ini program pengelolaan penerangan jalan umum terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu : PJU Protokol, PJU Kampung, dan PJU Lingkungan, untuk dapat tersedianya fungsi PJU Kota membutuhkan pembiayaan yang besar , salah satunya untuk rekening PJU, sehingga diperlukan strategi untuk mengurangi /mengefisienkan rekening PJU.

Bidang Perumahan dan Permukiman :

1. Tempat tinggal warga miskin yang umumnya kurang tertata baik dan kurang memiliki prasarana dasar permukiman sehingga menimbulkan adanya kawasan kurang layak huni yang tersentra di daerah bantaran sungai Di Kota Yogyakarta prosentase rumah layak huni dibandingkan seluruh rumah adalah sebesar 4,36 % pada tahun 2010.

2. Berkaitan dengan Penyediaan Prasarana Air Bersih Non Perpipaan berupa pemasangan water treatment dan rehabilitasi MCK umum,dari 716 unit MCK yang telah terpasang sebanyak 216 unit ,jumlah ini tentulah sangat sedikit karena jumlah MCK yang telah terpasang water treatment hanya 30,17 %.

3. Dari 43 sarana Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Komunal domestic , 37 diantaranya di tiga bantaran tiga sungai (code,winongo,gajahwong)

sebagian besar belum berfungsi optimal .Sistem pembuangan air limbah terpusat di Sewon tersebut telah tersambung dengan saluran pembuangan 10.119 rumah tangga .

Bidang Bangunan Gedung :

1. Belum semua bangunan gedung pemerintah memiliki sarana prasarana yang mendukung bagi penyandang disabilitas .
2. Belum terpenuhinya semua bangunan gedung yang sesuai standar pelayanan .

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

1. Telaah Terhadap Visi Pembangunan

Visi Kota Yogyakarta sebagai mana tertuang dalam RPJMD adalah sebagai berikut ***“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”***

Dalam Mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut terdapat misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , yaitu misi ke 6 : ***Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman***

Adapun faktor–faktor pendorong dalam pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi pembangunan kota Yogyakarta adalah permasalahan infrastruktur perkotaan yang masih harus terus menerus dibenahi antara lain :

1. Sistem Drainase Perkotaan

Pembangunan sistem drainase terutama saluran air hujan di kota Yogyakarta sampai saat ini cukup mendapat perhatian, namun sampai saat ini masih terdapat lokasi rawan genangan terutama saat curah hujan tinggi, wilayah kota Yogyakarta banyak terdapat cekungan lahan yang menyebabkan limpasan air drainase, tersumbatnya saluran drainase yang ada oleh sampah lingkungan maupun tingginya sampah oleh endapan tanah di saluran yang ada. Perbaikan dan peningkatan kuantitas dan kualitas drainase di Kota Yogyakarta harus terus diupayakan agar seluruh bagian system ini dapat berfungsi dengan baik.

2. Kondisi Jalan

Peningkatan kondisi jalan dalam keadaan baik harus terus ditingkatkan selama lima tahun kedepan berkaitan dengan visi misi pembangunan kota untuk menunjang kota pariwisata .

3. Sistem Pengelolaan Sarana Prasarana Lingkungan

Berkaitan dengan Penyediaan Prasarana Air Bersih Non Perpipaan berupa pemasangan water treatment dan rehabilitasi MCK umum, dari 716 unit MCK yang telah terpasang sebanyak 216 unit , jumlah ini tentulah sangat sedikit karena jumlah MCK yang telah terpasang water treatment hanya 30,17 %.

4. Bangunan Rumah Layak Huni

Di Kota Yogyakarta prosentase rumah layak huni dibandingkan seluruh rumah adalah sebesar 4,36 %

5. Pembangunan IPAL Komunal dan Sambungan Rumah (SR)

6. Peningkatan kualitas penerangan jalan umum sampai jalan lingkungan dan lampu hias yang merupakan indikator kinerja dari arah kebijakan pengembangan kawasan citra kota dalam misi program pembangunan kota Yogyakarta.

3.3 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan – Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta

3.3.1 Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019 adalah :

“Tersedianya Infrastruktur dan Permukiman yang andal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025 “

Adapun makna dari Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman yang penjabarannya meliputi :

- Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.
- Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian) ,mobilitas , kondisi jalan , keselamatan , dan kecepatan tempuh rata-rata.
- Pelayanan parasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis
- Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan Permukiman yang andal berbasis penataan ruang

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

Untuk mencapai visi ***“Tersedianya Infrastruktur dan Permukiman yang andal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025”***

ditetapkan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019 yaitu :

- Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
- Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan berkelanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air .
- Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal , terpadu dan berkelanjutan.

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Perumahan Rakyat (PUPR)

“ Kemantapan Infrastruktur Dasar dan Efisiensi Pendayagunaan Energi Sumber Daya Mineral “

Misi dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Perumahan Rakyat

(PUPR) :

1. Mengintegrasikan Penataan Ruang Wilayah
2. Mengembangkan infrastruktur dasar
3. Memfasilitasi Kelayakan Pemukiman
4. Memfasilitasi Ketersediaan Energi Baru dan Terbarukan
5. Menjaga Keseimbangan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral
6. Memonitor Ketersediaan dan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas

7. Menjaga Keseimbangan antara Pendayagunaan dan Konservasi Sumber Daya Air
8. Mengendalikan Daya Rusak Air
9. Membina Konstruksi Daerah
10. Mengembangkan Sistem dan Mendayagunakan Pelayanan Informasi dan Pengujian Bahan Konstruksi
11. Mendukung Pengembangan Sektor lain

Permasalahan OPD apa?

Gambaran ke depan seperti apa?

3.4 TELAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 yang disusun untuk kurun waktu 20 tahun mendatang mengacu pada hirarki fungsional sesuai dengan RTRWN dan selaras dengan RTRW Propinsi dan tidak terlepas dari penataan ruang di wilayah sekitarnya .

Rencana struktur ruang kota Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 sebagai berikut :

Visi pengembangan tata ruang di Kota Yogyakarta didasarkan pada struktur dan tata guna lahan dalam konteks ruang perkotaan di sekitarnya berkaitan dengan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Prasarana perkotaan, yang meliputi perumahan dan peremajaan permukiman, jalan drainase, air bersih, air limbah dan sanitasi. Pengembangan dan pelayanan prasarana umum mendukung fungsi-fungsi perkotaan, sesuai dengan alokasi ruang yang mengakomodasikan fungsi tersebut; juga menciptakan sistem yang saling menguntungkan

dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana perkotaan.

2. Pengelolaan perkotaan, yang mengakomodasi pengembangan fungsi-fungsi perkotaan, organisasi ruang untuk mengakomodasikan fungsi perkotaan, dan penyediaan prasarana untuk mendukung fungsi tersebut. Terciptanya iklim dan kondisi yang transparan, akuntabilitas dan demokrasi dalam pengelolaan pengembangan kota akan melibatkan peran dari partisipasi stakeholder, peran serta masyarakat dan sektor swasta.

Strategi dasar pengembangan Kota Yogyakarta didasarkan pada kerangka pengembangan struktur kawasan juga fungsi dan perannya, yakni:

1. Ke arah utara dan timur, berupa optimasi dan pengendalian penggunaan pemanfaatan ruang melalui penataan lingkungan dan bangunan.
2. Ke arah selatan, pengembangan dan pembangunan daerah-daerah baru yang mewadahi peningkatan jumlah penduduk, serta pengembangan kegiatan transportasi regional, perdagangan dan jasa, serta perencanaan penataan lingkungan permukiman untuk mengantisipasi ketidakteraturan.
3. Ke arah barat penataan lingkungan permukiman, untuk memperkuat karakter perkotaan.

Perwujudan Struktur Ruang

1. Perwujudan Sistem Perkotaan
 - 1.1 Percepatan pengembangan pusat kota, meliputi: (1) Peningkatan fungsi pusat kota, yang berlokasi di Kecamatan Danurejan, Gedongtengen, dan Gondomanan, (2) Pengembangan kawasan perkotaan, yang berlokasi di Kecamatan Umbulharjo.

- 1.2 Percepatan pengembangan sub pusat kota, meliputi: Pengembangan/ peningkatan fungsi sub pusat kota, yang berlokasi di Seluruh kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta.
2. Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - 2.1 Jaringan arteri primer: Pemantapan jaringan jalan arteri primer internal kota, yakni jaringan lintas lingkaran luar Kota Yogyakarta, yang berlokasi di jalan ring road lintas selatan
 - 2.2 Jaringan jalan arteri sekunder
 - 2.2.1 Pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota, yang terdiri atas: (i) Jaringan lintas selatan, yang berlokasi di Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan Menteri Supeno, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Ngeksigondo, (ii) Jaringan lintas tengah, yang berlokasi di sepanjang koridor Jalan RE Martadinata.
 - 2.2.2 Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan wilayah lain di luar kota, yakni jaringan lintas Yogyakarta ke arah Kabupaten Bantul, yang berlokasi di Jalan Patangpuluhan.
 - 2.2.3 Jembatan
Pembangunan jembatan *fly over* pada persimpangan dengan jalur KA, yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Aipda Tut Harsono.

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi: (1) Rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, dan (2) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
2. Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air (SDA), melalui konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

3. Air limbah, meliputi: (1) Pembangunan dan pemeliharaan saluran air limbah, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, (2) Optimalisasi jaringan air limbah domestik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, dan (3) Pengadaan toilet *mobile*, yang berlokasi di Kota Yogyakarta.
4. Air Minum, melalui: (1) Pengembangan instalasi air minum, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, (2) Pengembangan jaringan distribusi, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, dan (3) Pembelian truk tangki air minum.

1.2.1 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan kondisi pembangunan yang telah dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi maka ada beberapa isu strategis ditinjau dari :

a. Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Peningkatan jalan yang tidak signifikan mempengaruhi permasalahan lalu lintas seperti kesemrawutan dan kemacetan
- Sarana prasarana permukiman untuk menekan prosentase permukiman kumuh di Kota Yogyakarta dengan memperhatikan kondisi sanitasi , drainase , jalan kampung, pengolahan limbah untuk mewujudkan rumah layak huni dan lingkungannya .
- Peningkatan kebutuhan air bersih non perpipaan karena masyarakat Kota Yogyakarta lebih banyak berakses air bersih non perpipaan
- Penanganan air limbah dan penyediaan sanitasi lingkungan
- Sarana saluran drainase yang belum tertata akibat peralihan lahan pertanian menjadi lahan permukiman
- Pengembangan MCK Komunal
- Saluran limbah rumah tangga / assenering sebagai pendukung kebersihan lingkungan
- Penggantian lampu Penerangan Jalan Umum dengan lampu hemat energi

(LED) pada semua jenis PJU Protokol , PJU Kampung dan PJU Lingkungan untuk mengefisiensi beban rekening penerangan jalan umum.

- Pemenuhan kebutuhan standar pelayanan dan kebutuhan sarana prasarana yang sesuai dengan peraturan yang berlaku diantaranya penyediaan sarpras untuk penyandang disabilitas

b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat :

- Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan
- Pengelolaan Sumber Daya Air, Konservasi sumber daya air yang ditujukan agar terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air alami dan buatan serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air buatan, yang akan dicapai melalui strategi: Untuk mewujudkan hal tersebut, bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk mewujudkan Ketahanan Air, Kedaulatan Pangan, dan Ketahanan Energi, yang akan diwujudkan melalui sasaran strategis
- Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan dari 0% menjadi 100%, yang akan dicapai melalui strategis
- Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
- Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak. Dengan sasaran program yaitu:
 - Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat , dan meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
 - Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat. Sedangkan strateginya dilakukan melalui:
 - Pencapaian target 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia pada akhir periode perencanaan, akan dicapai melalui strategi Utama.

- Pengentasan permukiman kumuh perkotaan
 - Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik, yaitu dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat
 - Pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan
 - Pembangunan rumah layak huni
 - Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
- c. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (DPU-PESDM)
- Meningkatnya kualitas pengaturan dan Pembangunan Infrastruktur Dasar & Implementasi Program Pembangunan Daerah pada kawasan Strategis DIY
 - Meningkatnya ketersediaan infrastruktur (air minum, yang memadai baik kuantitas dan kualitas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta :

“ Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat “

Sasaran

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota adalah sebagai berikut :

- Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat

- Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tercantum dalam tabel 5.1

Tabel 5.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DPUPKP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	73,20%	75,56%	78,07%	80,58%	83,10%	85,61%
			Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	89,23%	90,17%	91,16%	92,38%	93,55%	94,89%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi	Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan		
Misi 6	Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman		
Tujuan Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat	Sasaran Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan	Strategi Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase Penambahan pembangunan gedung pemerintah Peningkatan perumahan permukiman dan tata bangunan	Kebijakan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan perlengkapan jalan Meningkatkan kualitas penerangan jalan umum Meningkatkan pembangunan saluran pengairan/penyediaan bangunan talud Meningkatkan kualitas saluran pengairan/penyediaan bangunan talud Mengoptimalkan penataan kawasan sungai Meningkatkan pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman Meningkatkan penanganan kawasan kumuh Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Meningkatkan pengelolaan Rusunawa Mengoptimalkan cakupan saluran air limbah Mengoptimalkan pengelolaan air minum Mengoptimalkan pengelolaan pemakaman

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka mencapai sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yaitu : “ Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perkotaan Yang Berkualitas dan memadahi “ sebagaimana telah disusun dalam bab sebelumnya , sesuai dengan bidang tugas Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.

Program –program yang disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang berhubungan dengan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022

Masing-masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya , sehingga hasil pembangunan dapat terukur perkembangannya sampai akhir periode RENSTRA .

Pencapaian target indicator kinerja program disusun secara rinci untuk setiap tahunnya disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk masing-masing program

Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai mana tercantum dalam tabel 6.1

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PUPKP
KOTA YOGYAKARTA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												U Ke
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak hunian	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	82%	65.795.425.135	84%	44.572.489.000	86%	45.909.663.670	88%	47.286.953.580	90%	48.705.562.188	92%	50.166.729.053	
					Persentase kualitas penerangan jalan umum	21%		30%		40%		50%		60%		70%		
					Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan	73%	37.022.404.586	73,50%	39.215.056.000	74%	40.391.507.680	74,50%	41.603.252.910	75%	42.851.350.498	75,50%	44.136.891.013	
					Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak sesubuh	90,73%		91,29%		91,85%		92,42%		92,98%		93,54%		
				Pembangunan Gedung Pemerintah	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	86%	37.624.331.247	87%	20.500.000.000	88%	21.115.000.000	89%	21.748.450.000	90%	22.400.903.500		23.072.930.605	
Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman			Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan	Persentase kualitas sarana prasarana dasar	91,8%	13.219.790.300	93,0%	14.207.392.038	94,2%	14.633.613.799	95,5%	15.072.622.213	96,7%	15.524.800.880	98,0%	15.990.544.906	
					Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	83,22%		84%		84,06%		85,09%		86,21%		87,62%		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017 – 2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagaimana mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 mempunyai tujuan memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi misi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Yogyakarta pada akhir periode RENSTRA.

Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA yang diinginkan dilihat dari pencapaian indikator outcome prioritas pembangunan setiap tahunnya .

Uraian Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Yogyakarta tercantum dalam tabel 7.1

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			Tahun	1	2	3	4	5	
1	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan		82%	84%	86%	88%	90%	92%	
2	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan		21%	30%	40%	50%	60%	70%	
3	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud		73%	73,50%	74%	74,50%	75%	75,50%	
4	Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.		90,73%	91,29%	91,85%	92,42%	92,98%	93,54%	
5	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan		86%	87%	88%	89%	90%	91%	
6	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman		91,8%	93,0%	94,2%	95,5%	96,7%	98,0%	
7	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai		83,22%	84%	84,06%	85,09%	86,21%	87,62%	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini telah disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai dengan format Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang selanjutnya akan digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 – 2022 . Rumusan program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renstra 2012-2016 yang lalu, identifikasi isu-isu penting bidang pekerjaan umum, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, review atas rencana awal RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun daerah.

Beberapa usulan program dan kegiatan untuk tahun 2017 - 2022 terlihat membutuhkan beban pendanaan yang cukup besar karena Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta perlu meningkatkan pengelolaan infrastruktur kota diberbagai sektor , karena masih banyak sarana dan prasarana kota yang masih harus ditingkatkan maupun diperbaiki . Besar harapan bahwa rencana kerja akan memperoleh pendanaan yang sesuai kebutuhan demi kelancaran penyelenggaraan ketugasan.

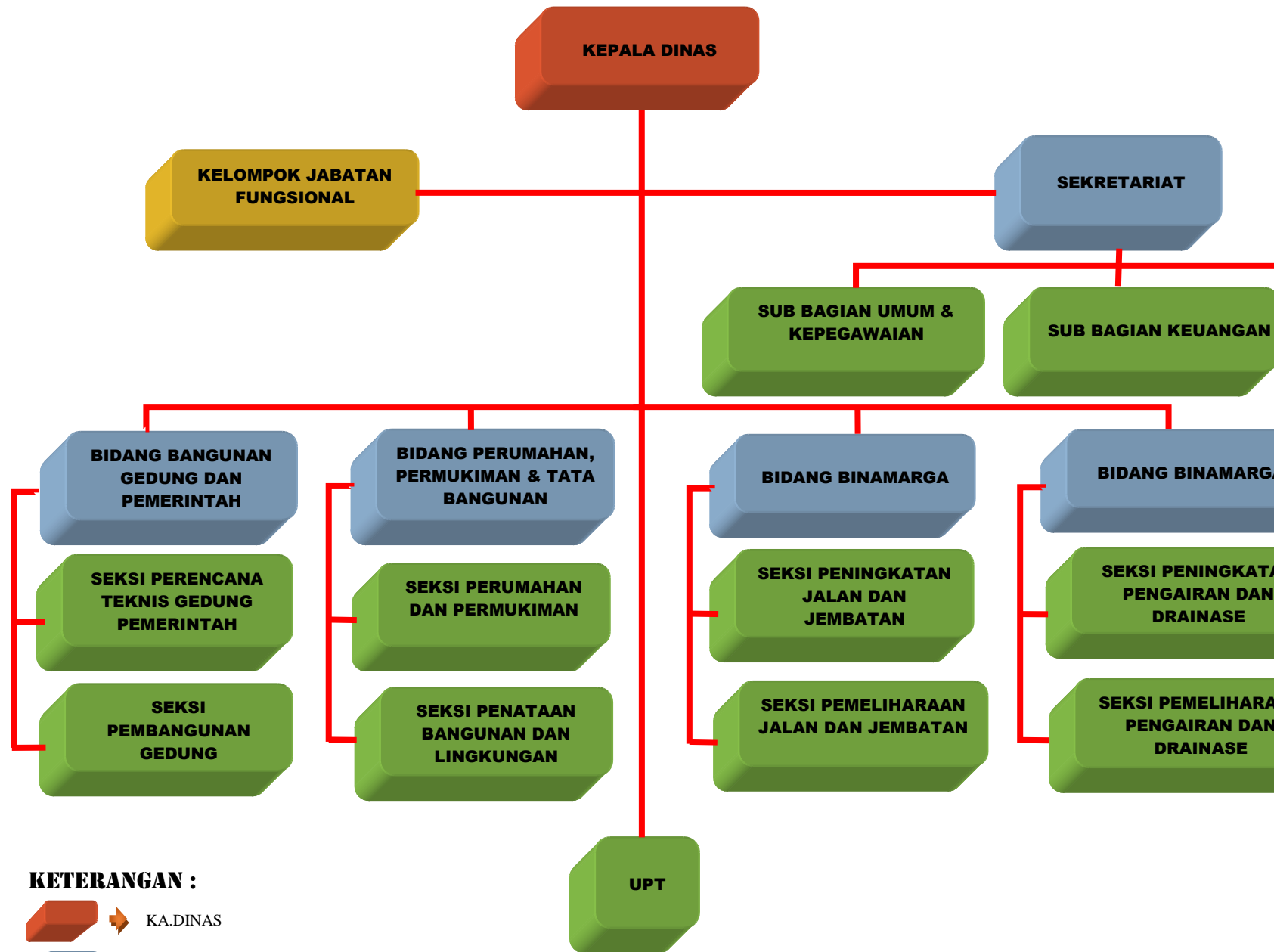
Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Yogyakarta,

Kepala Dinas

Agus Tri Haryono
NIP.19720306 1996 03 1 004



KETERANGAN :

-  → KA.DINAS
-  → SEKRETARIS/ BIDANG
-  → SUB. BAG / SEKSI
-  → FUNGSIONAL

2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tantangan :

- 1) Mengefektifkan dan mengefisiensikan dana yang terbatas
- 2) Tuntutan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas
- 3) Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana yang memadai

Peluang :

- 1) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
- 2) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPUPKP

Permasalahan-permasalahan Pembangunan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta secara garis besar meliputi :

Bidang Sumber Daya Air :

1. Sebagian besar saluran drainase maupun saluran irigasi , baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran rumah tangga dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang.
2. Pembangunan saluran drainase dan saluran irigasi khususnya di lingkungan permukiman tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan saluran, sehingga banyak saluran yang tidak/kurang terpelihara dengan baik.
3. Adanya genangan air yang sering terjadi karena kurang selarasnya sistem jaringan drainase dengan laju perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kota.
4. Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah, dan pada saluran yang lain juga berfungsi sebagai saluran irigasi.
5. Banyaknya bangunan baik permanen dan semi permanen di bantaran sungai ,Drainase dan Irigasi yang mengganggu aliran air dan konstruksi bangunan air.
6. Banyaknya karamba yang dipasang oleh masyarakat menyebabkan terganggunya aliran sungai bahkan bisa membelokkan arah aliran yang menyebabkan rusaknya tanggul sungai.
7. Begitu cepatnya laju perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan diperlukannya infrastruktur permukiman.

8. Usia talud yang rata-rata sudah berumur diatas 20 tahun sehingga perlu direhabilitasi.
9. Konstruksi talud yang rata-rata terlalu curam kemiringannya dikarenakan terdesaknya permukiman .
10. Akibat kewenangan sungai yang masih dipusat sehingga tidak dapat maksimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi .

Bidang Bina Marga :

1. Segi Prasarana Jalan dilihat dari kondisi jalan
Total panjang jalan di kota 235 km, memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar, apabila kondisi cuaca menyebabkan curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi menyebabkan terjadinya genangan yang berdampak pada kerusakan jalan.
2. Penerangan Jalan Umum
Memenuhi kebutuhan infrastruktur kota Yogyakarta salah satunya dengan pengelolaan penerangan jalan umum, saat ini program pengelolaan penerangan jalan umum terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu : PJU Protokol, PJU Kampung, dan PJU Lingkungan, untuk dapat tersedianya fungsi PJU Kota membutuhkan pembiayaan yang besar , salah satunya untuk rekening PJU, sehingga diperlukan strategi untuk mengurangi /mengefisienkan rekening PJU.

Bidang Perumahan dan Permukiman :

1. Tempat tinggal warga miskin yang umumnya kurang tertata baik dan kurang memiliki prasarana dasar permukiman sehingga menimbulkan adanya kawasan kurang layak huni yang tersentra di daerah bantaran sungai Di Kota Yogyakarta prosentase rumah layak huni dibandingkan seluruh rumah adalah sebesar 4,36 % pada tahun 2010.

2. Berkaitan dengan Penyediaan Prasarana Air Bersih Non Perpipaan berupa pemasangan water treatment dan rehabilitasi MCK umum, dari 716 unit MCK yang telah terpasang sebanyak 216 unit, jumlah ini tentulah sangat sedikit karena jumlah MCK yang telah terpasang water treatment hanya 30,17 %.
3. Dari 43 sarana Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Komunal domestic, 37 diantaranya di tiga bantaran tiga sungai (code, winongo, gajahwong) sebagian besar belum berfungsi optimal. Sistem pembuangan air limbah terpusat di Sewon tersebut telah tersambung dengan saluran pembuangan 10.119 rumah tangga.

Bidang Bangunan Gedung :

1. Belum semua bangunan gedung pemerintah memiliki sarana prasarana yang mendukung bagi penyandang disabilitas.
2. Belum terpenuhinya semua bangunan gedung yang sesuai standar pelayanan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

1. Telaah Terhadap Visi Pembangunan

Visi Kota Yogyakarta sebagai mana tertuang dalam RPJMD adalah sebagai berikut ***“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”***

Dalam Mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut terdapat misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, yaitu misi ke 6 :

Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman

Adapun faktor–faktor pendorong dalam pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi pembangunan kota Yogyakarta adalah permasalahan infrastruktur perkotaan yang masih harus terus menerus dibenahi antara lain :

1. Sistem Drainase Perkotaan

Pembangunan sistem drainase terutama saluran air hujan di kota Yogyakarta sampai saat ini cukup mendapat perhatian, namun sampai saat ini masih terdapat lokasi rawan genangan terutama saat curah hujan tinggi, wilayah kota Yogyakarta banyak terdapat cekungan lahan yang menyebabkan limpasan air drainase, tersumbatnya saluran drainase yang ada oleh sampah lingkungan maupun tingginya sampah oleh endapan tanah di saluran yang ada. Perbaikan dan peningkatan kuantitas dan kualitas drainase di Kota Yogyakarta harus terus diupayakan agar seluruh bagian system ini dapat berfungsi dengan baik.

2. Kondisi Jalan

Peningkatan kondisi jalan dalam keadaan baik harus terus ditingkatkan selama lima tahun kedepan berkaitan dengan visi misi pembangunan kota untuk menunjang kota pariwisata .

3. Sistem Pengelolaan Sarana Prasarana Lingkungan

Berkaitan dengan Penyediaan Prasarana Air Bersih Non Perpipaan berupa pemasangan water treatment dan rehabilitasi MCK umum, dari 716 unit MCK yang telah terpasang sebanyak 216 unit ,jumlah ini tentulah sangat sedikit karena jumlah MCK yang telah terpasang water treatment hanya 30,17 %.

4. Bangunan Rumah Layak Huni

Di Kota Yogyakarta prosentase rumah layak huni dibandingkan seluruh rumah adalah sebesar 4,36 %

5. Pembangunan IPAL Komunal dan Sambungan Rumah (SR)

6. Peningkatan kualitas penerangan jalan umum sampai jalan lingkungan dan lampu hias yang merupakan indikator kinerja dari arah kebijakan pengembangan kawasan citra kota dalam misi program pembangunan kota Yogyakarta.

3.3 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan – Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta

3.3.1 Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019 adalah :

“Tersedianya Infrastruktur dan Permukiman yang andal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025 “

Adapun makna dari Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman yang penjabarannya meliputi :

- Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.
- Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup sapek aksesibilitas (kemudahan pencapaian) ,mobilitas , kondisi jalan , keselamatan , dan kecepatan tempuh rata-rata.
- Pelayanan parasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis
- Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan Permukiman yang andal berbasis penataan ruang

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

Untuk mencapai visi **“Tersedianya Infrastruktur dan Permukiman yang andal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025”** ditetapkan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019 yaitu :

- Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
- Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan berkelanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air .
- Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal , terpadu dan berkelanjutan.

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Perumahan Rakyat (PUPR)

“ Kemantapan Infrastruktur Dasar dan Efisiensi Pendayagunaan Energi Sumber Daya Mineral “

Misi dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Perumahan Rakyat

(PUPR) :

1. Mengintegrasikan Penataan Ruang Wilayah
2. Mengembangkan infrastruktur dasar
3. Memfasilitasi Kelayakan Pemukiman
4. Memfasilitasi Ketersediaan Energi Baru dan Terbarukan

5. Menjaga Keseimbangan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral
6. Memonitor Ketersediaan dan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas
7. Menjaga Keseimbangan antara Pendayagunaan dan Konservasi Sumber Daya Air
8. Mengendalikan Daya Rusak Air
9. Membina Konstruksi Daerah
10. Mengembangkan Sistem dan Mendayagunakan Pelayanan Informasi dan Pengujian Bahan Konstruksi
11. Mendukung Pengembangan Sektor lain

Permasalahan OPD apa?

Gambaran ke depan seperti apa?

3.4 TELAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 yang disusun untuk kurun waktu 20 tahun mendatang mengacu pada hirarki fungsional sesuai dengan RTRWN dan selaras dengan RTRW Propinsi dan tidak terlepas dari penataan ruang di wilayah sekitarnya .

Rencana struktur ruang kota Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 sebagai berikut :

Visi pengembangan tata ruang di Kota Yogyakarta didasarkan pada struktur dan tata guna lahan dalam konteks ruang perkotaan di sekitarnya berkaitan dengan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Prasarana perkotaan, yang meliputi perumahan dan peremajaan permukiman, jalan drainase, air bersih, air limbah dan sanitasi.

Pengembangan dan pelayanan prasarana umum mendukung fungsi-fungsi perkotaan, sesuai dengan alokasi ruang yang mengakomodasikan fungsi tersebut; juga menciptakan sistem yang saling menguntungkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana perkotaan.

2. Pengelolaan perkotaan, yang mengakomodasi pengembangan fungsi-fungsi perkotaan, organisasi ruang untuk mengakomodasikan fungsi perkotaan, dan penyediaan prasarana untuk mendukung fungsi tersebut. Terciptanya iklim dan kondisi yang transparan, akuntabilitas dan demokrasi dalam pengelolaan pengembangan kota akan melibatkan peran dari partisipasi stakeholder, peran serta masyarakat dan sektor swasta.

Strategi dasar pengembangan Kota Yogyakarta didasarkan pada kerangka pengembangan struktur kawasan juga fungsi dan perannya, yakni:

1. Ke arah utara dan timur, berupa optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penataan lingkungan dan bangunan.
2. Ke arah selatan, pengembangan dan pembangunan daerah-daerah baru yang mewadahi peningkatan jumlah penduduk, serta pengembangan kegiatan transportasi regional, perdagangan dan jasa, serta perencanaan penataan lingkungan permukiman untuk mengantisipasi ketidakteraturan.
3. Ke arah barat penataan lingkungan permukiman, untuk memperkuat karakter perkotaan.

Perwujudan Struktur Ruang

1. Perwujudan Sistem Perkotaan
 - 1.1 Percepatan pengembangan pusat kota, meliputi: (1) Peningkatan fungsi pusat kota, yang berlokasi di Kecamatan Danurejan,

Gedongtengen, dan Gondomanan, (2) Pengembangan kawasan perkotaan, yang berlokasi di Kecamatan Umbulharjo.

1.2 Percepatan pengembangan sub pusat kota, meliputi: Pengembangan/ peningkatan fungsi sub pusat kota, yang berlokasi di Seluruh kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta.

2. Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:

2.1 Jaringan arteri primer: Pemantapan jaringan jalan arteri primer internal kota, yakni jaringan lintas lingkar luar Kota Yogyakarta, yang berlokasi di jalan ring road lintas selatan

2.2 Jaringan jalan arteri sekunder

2.2.1 Pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota, yang terdiri atas: (i) Jaringan lintas selatan, yang berlokasi di Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan Menteri Supeno, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Ngeksigondo, (ii) Jaringan lintas tengah, yang berlokasi di sepanjang koridor Jalan RE Martadinata.

2.2.2 Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan wilayah lain di luar kota, yakni jaringan lintas Yogyakarta ke arah Kabupaten Bantul, yang berlokasi di Jalan Patangpuluhan.

2.2.3 Jembatan

Pembangunan jembatan *fly over* pada persimpangan dengan jalur KA, yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Aipda Tut Harsono.

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi: (1) Rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, dan (2) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

2. Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air (SDA), melalui konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
3. Air limbah, meliputi: (1) Pembangunan dan pemeliharaan saluran air limbah, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, (2) Optimalisasi jaringan air limbah domestik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, dan (3) Pengadaan toilet *mobile*, yang berlokasi di Kota Yogyakarta.
4. Air Minum, melalui: (1) Pengembangan instalasi air minum, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, (2) Pengembangan jaringan distribusi, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, dan (3) Pembelian truk tangki air minum.

1.2.1 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan kondisi pembangunan yang telah dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi maka ada beberapa isu strategis ditinjau dari :

a. Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Peningkatan jalan yang tidak signifikan mempengaruhi permasalahan lalu lintas seperti kesemrawutan dan kemacetan
- Sarana prasarana permukiman untuk menekan prosentase permukiman kumuh di Kota Yogyakarta dengan memperhatikan kondisi sanitasi , drainase , jalan kampung, pengolahan limbah untuk mewujudkan rumah layak huni dan lingkungannya .
- Peningkatan kebutuhan air bersih non perpipaan karena masyarakat Kota Yogyakarta lebih banyak berakses air bersih non perpipaan
- Penanganan air limbah dan penyediaan sanitasi lingkungan
- Sarana saluran drainase yang belum tertata akibat peralihan lahan pertanian menjadi lahan permukiman
- Pengembangan MCK Komunal

- Saluran limbah rumah tangga / assenering sebagai pendukung kebersihan lingkungan
 - Penggantian lampu Penerangan Jalan Umum dengan lampu hemat energi (LED) pada semua jenis PJU Protokol , PJU Kampung dan PJU Lingkungan untuk mengefisiensi beban rekening penerangan jalan umum.
 - Pemenuhan kebutuhan standar pelayanan dan kebutuhan sarana prasarana yang sesuai dengan peraturan yang berlaku diantaranya penyediaan sarpras untuk penyandang disabilitas
- b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :
- Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal,kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan
 - Pengelolaan Sumber Daya Air, Konservasi sumber daya air yang ditujukan agar terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air alami dan buatan serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air buatan, yang akan dicapai melalui strategi:Untuk mewujudkan hal tersebut, bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk mewujudkan Ketahanan Air, Kedaulatan Pangan,dan Ketahanan Energi, yang akan diwujudkan melalui sasaran strategis
 - Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan dari 0% menjadi 100%, yang akan dicapai melalui strategis
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
 - Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak.
Dengan sasaran program yaitu:
 - Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat , dan meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
 - Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat. Sedangkan strateginya dilakukan melalui:

- Pencapaian target 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia pada akhir periode perencanaan, akan dicapai melalui strategi Utama.
 - Pengentasan permukiman kumuh perkotaan
 - Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik, yaitu dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat
 - Pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan
 - Pembangunan rumah layak huni
 - Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
- c. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (DPU-PESDM)
- Meningkatnya kualitas pengaturan dan Pembangunan Infrastruktur Dasar & Implementasi Program Pembangunan Daerah pada kawasan Strategis DIY
 - Meningkatnya ketersediaan infrastruktur (air minum, yang memadai baik kuantitas dan kualitas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta :

“ Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat “

Sasaran

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota adalah sebagai berikut :

- Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat
- Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tercantum dalam tabel 5.1

Tabel 5.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DPUPKP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	73,20%	75,56%	78,07%	80,58%	83,10%	85,61%
			Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	89,23%	90,17%	91,16%	92,38%	93,55%	94,89%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi	Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan		
Misi 6	Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman		
Tujuan Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat	Sasaran Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan	Strategi Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase Penambahan pembangunan gedung pemerintah Peningkatan perumahan permukiman dan tata bangunan	Kebijakan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan perlengkapan jalan Meningkatkan kualitas penerangan jalan umum Meningkatkan pembangunan saluran pengairan/penyediaan bangunan talud Meningkatkan kualitas saluran pengairan/penyediaan bangunan talud Mengoptimalkan penataan kawasan sungai Meningkatkan pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman Meningkatkan penanganan kawasan kumuh Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Meningkatkan pengelolaan Rusunawa Mengoptimalkan cakupan saluran air limbah Mengoptimalkan pengelolaan air minum Mengoptimalkan pengelolaan pemakaman

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mencapai sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yaitu : “ Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perkotaan Yang Berkualitas dan memadahi “ sebagaimana telah disusun dalam bab sebelumnya , sesuai dengan bidang tugas Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.

Program –program yang disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang berhubungan dengan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022

Masing-masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya , sehingga hasil pembangunan dapat terukur perkembangannya sampai akhir periode RENSTRA .

Pencapaian target indicator kinerja program disusun secara rinci untuk setiap tahunnya disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk masing-masing program

Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai mana tercantum dalam tabel 6.1

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PUPKP
KOTA YOGYAKARTA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												U Ke	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	82%	65.795.425.135	84%	44.572.489.000	86%	45.909.663.670	88%	47.286.953.580	90%	48.705.562.188	92%	50.166.729.053		
					Persentase kualitas penerangan jalan umum	21%		30%		40%		50%		60%		70%			
					Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengaliran dan	73%	37.022.404.586	73,50%	39.215.056.000	74%	40.391.507.680	74,50%	41.603.252.910	75%	42.851.350.498	75,50%	44.136.891.013		
					Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak sesubut	90,73%		91,29%		91,85%		92,42%		92,98%		93,54%			
				Pembangunan Gedung Pemerintah	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	86%	37.624.331.247	87%	20.500.000.000	88%	21.115.000.000	89%	21.748.450.000	90%	22.400.903.500		23.072.930.605		
	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman		Penataan Perumahan dan Tata Bangunan	Persentase kualitas sarana prasarana dasar	91,8%	13.219.790.300	93,0%	14.207.392.038	94,2%	14.633.613.799	95,5%	15.072.622.213	96,7%	15.524.800.880	98,0%	15.990.544.906		
					Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	83,22%		84%		84,06%		85,09%		86,21%		87,62%			

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017 – 2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagaimana mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 mempunyai tujuan memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi misi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Yogyakarta pada akhir periode RENSTRA.

Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA yang diinginkan dilihat dari pencapaian indikator outcome prioritas pembangunan setiap tahunnya .

Uraian Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Yogyakarta tercantum dalam tabel 7.1

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			Tahun	1	2	3	4	5	
1	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan		82%	84%	86%	88%	90%	92%	
2	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan		21%	30%	40%	50%	60%	70%	
3	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud		73%	73,50%	74%	74,50%	75%	75,50%	
4	Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.		90,73%	91,29%	91,85%	92,42%	92,98%	93,54%	
5	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan		86%	87%	88%	89%	90%	91%	
6	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman		91,8%	93,0%	94,2%	95,5%	96,7%	98,0%	
7	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai		83,22%	84%	84,06%	85,09%	86,21%	87,62%	

BAB VIII

PENUTUP

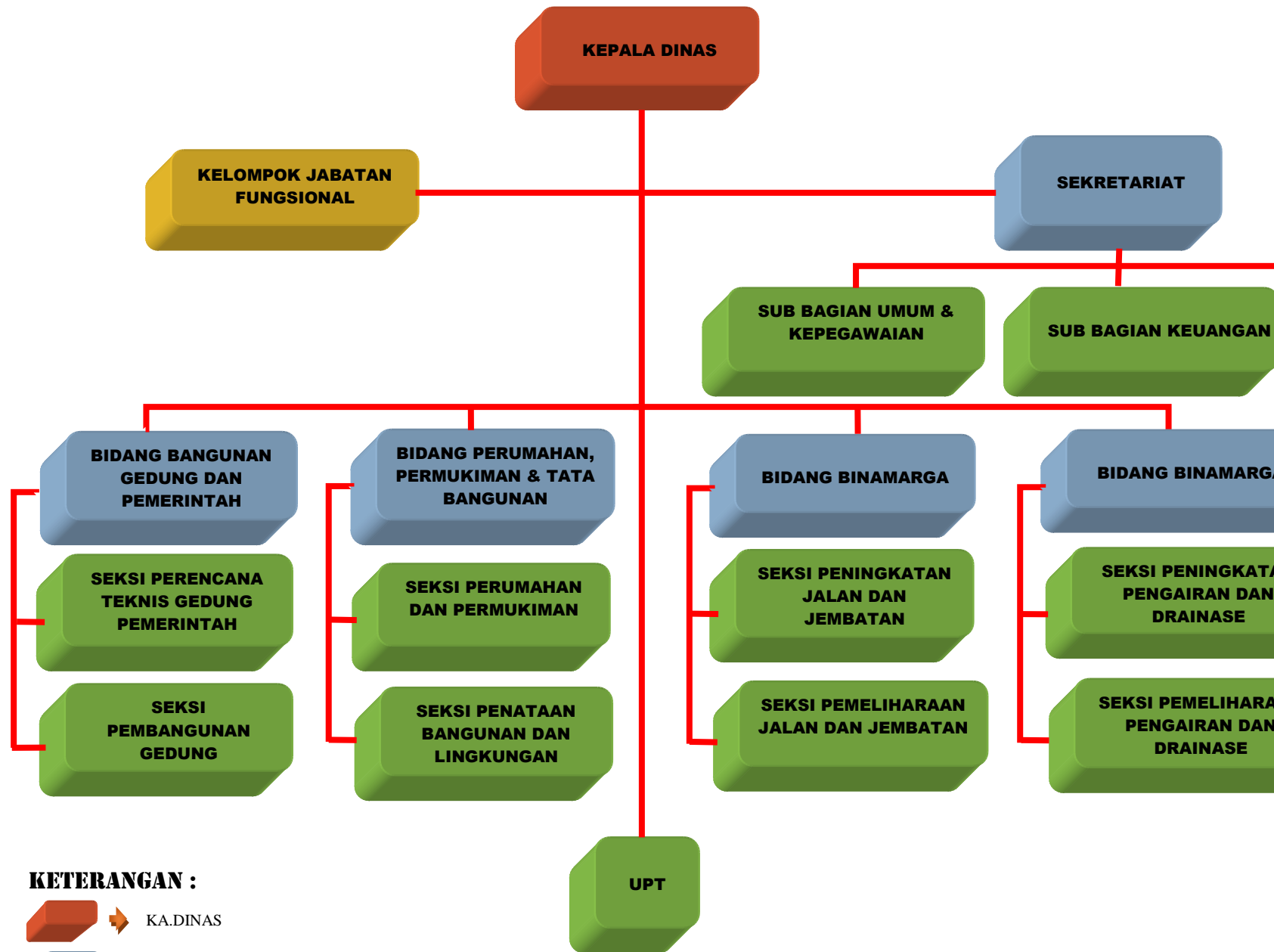
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini telah disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai dengan format Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang selanjutnya akan digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 – 2022 . Rumusan program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renstra 2012-2016 yang lalu, identifikasi isu-isu penting bidang pekerjaan umum, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, review atas rencana awal RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun daerah.

Beberapa usulan program dan kegiatan untuk tahun 2017 - 2022 terlihat membutuhkan beban pendanaan yang cukup besar karena Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta perlu meningkatkan pengelolaan infrastruktur kota diberbagai sektor , karena masih banyak sarana dan prasarana kota yang masih harus ditingkatkan maupun diperbaiki . Besar harapan bahwa rencana kerja akan memperoleh pendanaan yang sesuai kebutuhan demi kelancaran penyelenggaraan ketugasan.

Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

**Yogyakarta,
Kepala Dinas**

Agus Tri Haryono
NIP.19720306 1996 03 1 004



KETERANGAN :

-  ➔ KA.DINAS
-  ➔ SEKRETARIS/ BIDANG
-  ➔ SUB. BAG / SEKSI
-  ➔ FUNGSIONAL

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mencapai sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yaitu :
“ Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perkotaan Yang Berkualitas dan memadahi “ sebagaimana telah disusun dalam bab sebelumnya , sesuai dengan bidang tugas Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.

Program –program yang disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang berhubungan dengan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022

Masing-masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya , sehingga hasil pembangunan dapat terukur perkembangannya sampai akhir periode RENSTRA .

Pencapaian target indicator kinerja program disusun secara rinci untuk setiap tahunnya disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk masing-masing program

Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai mana tercantum dalam tabel 6.1

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PUPKP
KOTA YOGYAKARTA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	Indeks Infrastruktur + Pekerjaan Umum	4	5	6	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	82%	65.795.425.135	84%	44.572.489.000	86%	45.909.663.670	88%	47.286.953.580	90%	48.705.562.188	92%	50.166.729.053		
						Peningkatan dan Pemeliharaan Pelengkap Jalan	21%		30%		40%		50%		60%		70%			
						Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengaliran dan bangunan	73%	37.022.404.586	73,50%	39.215.056.000	74%	40.391.507.680	74,50%	41.603.252.910	75%	42.851.350.498	75,50%	44.136.891.013		
						Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengaliran dan bangunan	90,73%		91,29%		91,85%		92,42%		92,98%		93,54%			
						Pembangunan Gedung Pemerintah	86%	37.624.331.247	87%	20.500.000.000	88%	21.115.000.000	89%	21.748.450.000	90%	22.400.903.500		23.072.930.605		
						Pembangunan Gedung Pemerintah														
Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur + Perumahan dan Permukiman	4	5	6	Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan	91,8%	13.219.790.300	93,0%	14.207.392.038	94,2%	14.633.613.799	95,5%	15.072.622.213	96,7%	15.524.800.880	98,0%	15.990.544.906		
						Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan	83,22%		84%		84,06%		85,09%		86,21%		87,62%			
						Pembangunan Gedung Pemerintah														

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017 – 2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagaimana mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 mempunyai tujuan memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi misi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Yogyakarta pada akhir periode RENSTRA.

Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA yang diinginkan dilihat dari pencapaian indikator outcome prioritas pembangunan setiap tahunnya .

Uraian Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Yogyakarta tercantum dalam tabel 7.1

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			Tahun	1	2	3	4	5	
1	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan		82%	84%	86%	88%	90%	92%	
2	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan		21%	30%	40%	50%	60%	70%	
3	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud		73%	73,50%	74%	74,50%	75%	75,50%	
4	Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.		90,73%	91,29%	91,85%	92,42%	92,98%	93,54%	
5	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan		86%	87%	88%	89%	90%	91%	
6	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman		91,8%	93,0%	94,2%	95,5%	96,7%	98,0%	
7	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai		83,22%	84%	84,06%	85,09%	86,21%	87,62%	

BAB VIII

PENUTUP

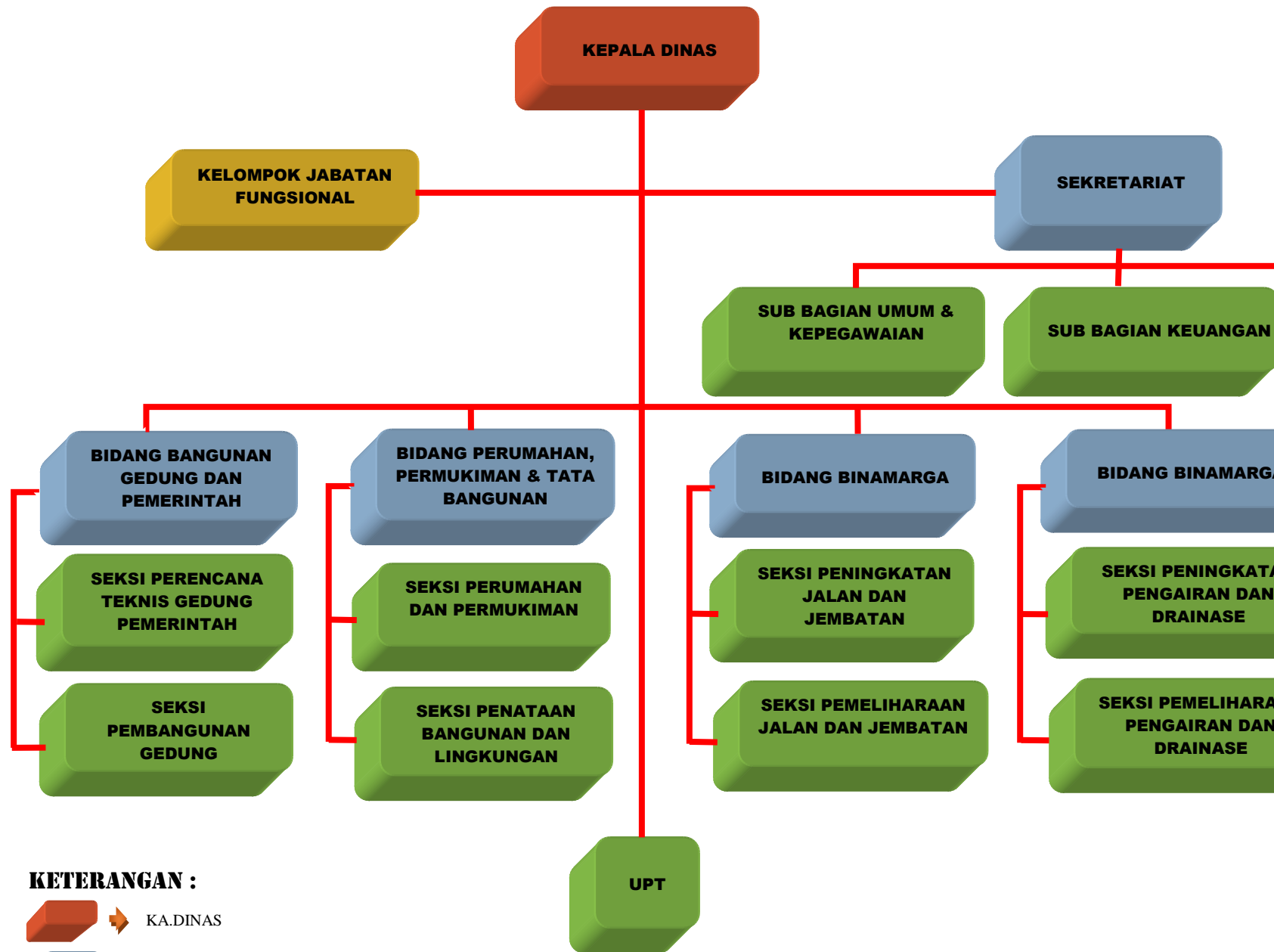
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini telah disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai dengan format Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang selanjutnya akan digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 – 2022 . Rumusan program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renstra 2012-2016 yang lalu, identifikasi isu-isu penting bidang pekerjaan umum, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, review atas rencana awal RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun daerah.

Beberapa usulan program dan kegiatan untuk tahun 2017 - 2022 terlihat membutuhkan beban pendanaan yang cukup besar karena Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta perlu meningkatkan pengelolaan infrastruktur kota diberbagai sektor , karena masih banyak sarana dan prasarana kota yang masih harus ditingkatkan maupun diperbaiki . Besar harapan bahwa rencana kerja akan memperoleh pendanaan yang sesuai kebutuhan demi kelancaran penyelenggaraan ketugasan.

Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

**Yogyakarta,
Kepala Dinas**

Agus Tri Haryono
NIP.19720306 1996 03 1 004



KETERANGAN :

-  ➔ KA.DINAS
-  ➔ SEKRETARIS/ BIDANG
-  ➔ SUB. BAG / SEKSI
-  ➔ FUNGSIONAL

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017 – 2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagaimana mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 mempunyai tujuan memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi misi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Yogyakarta pada akhir periode RENSTRA.

Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA yang diinginkan dilihat dari pencapaian indikator outcome prioritas pembangunan setiap tahunnya .

Uraian Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Yogyakarta tercantum dalam tabel 7.1

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			Tahun	1	2	3	4	5	
1	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan		82%	84%	86%	88%	90%	92%	
2	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan		21%	30%	40%	50%	60%	70%	
3	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud		73%	73,50%	74%	74,50%	75%	75,50%	
4	Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.		90,73%	91,29%	91,85%	92,42%	92,98%	93,54%	
5	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan		86%	87%	88%	89%	90%	91%	
6	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman		91,8%	93,0%	94,2%	95,5%	96,7%	98,0%	
7	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai		83,22%	84%	84,06%	85,09%	86,21%	87,62%	

BAB VIII

PENUTUP

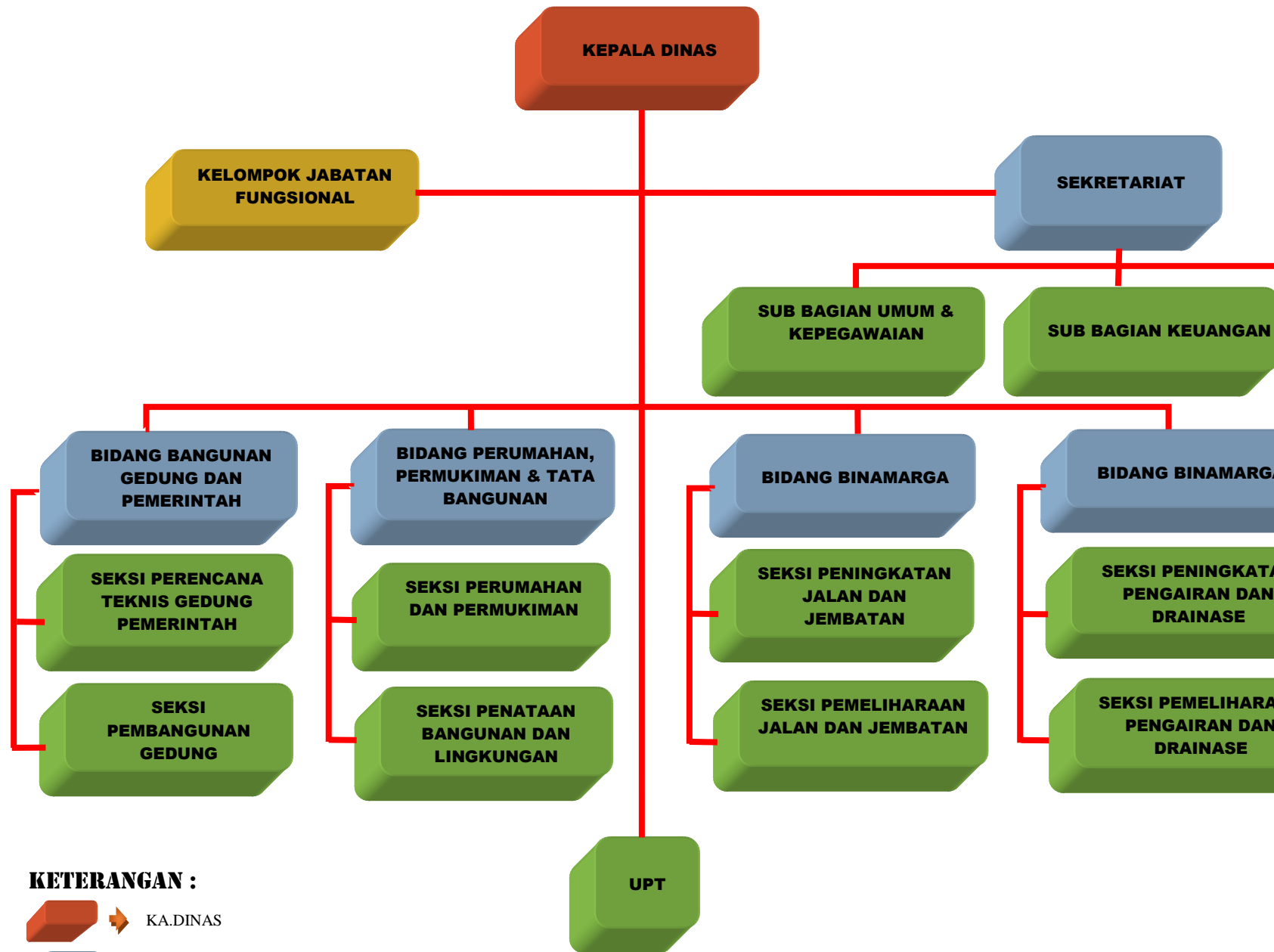
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini telah disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai dengan format Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang selanjutnya akan digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 – 2022 . Rumusan program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renstra 2012-2016 yang lalu, identifikasi isu-isu penting bidang pekerjaan umum, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, review atas rencana awal RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun daerah.

Beberapa usulan program dan kegiatan untuk tahun 2017 - 2022 terlihat membutuhkan beban pendanaan yang cukup besar karena Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta perlu meningkatkan pengelolaan infrastruktur kota diberbagai sektor , karena masih banyak sarana dan prasarana kota yang masih harus ditingkatkan maupun diperbaiki . Besar harapan bahwa rencana kerja akan memperoleh pendanaan yang sesuai kebutuhan demi kelancaran penyelenggaraan ketugasan.

Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

**Yogyakarta,
Kepala Dinas**

Agus Tri Haryono
NIP.19720306 1996 03 1 004



KETERANGAN :

-  ➔ KA.DINAS
-  ➔ SEKRETARIS/ BIDANG
-  ➔ SUB. BAG / SEKSI
-  ➔ FUNGSIONAL

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini telah disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai dengan format Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang selanjutnya akan digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 – 2022 . Rumusan program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renstra 2012-2016 yang lalu, identifikasi isu-isu penting bidang pekerjaan umum, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, review atas rencana awal RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun daerah.

Beberapa usulan program dan kegiatan untuk tahun 2017 - 2022 terlihat membutuhkan beban pendanaan yang cukup besar karena Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta perlu meningkatkan pengelolaan infrastruktur kota diberbagai sektor , karena masih banyak sarana dan prasarana kota yang masih harus ditingkatkan maupun diperbaiki . Besar harapan bahwa rencana kerja akan memperoleh pendanaan yang sesuai kebutuhan demi kelancaran penyelenggaraan ketugasan.

Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

**Yogyakarta,
Kepala Dinas**

**Agus Tri Haryono
NIP.19720306 1996 03 1 004**

